



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PEMBANGUNAN JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA

www.migas.esdm.go.id



DAFTAR ISI

BAB 1 Pendahuluan	5
Gas Bumi	
Potensi Gas Bumi Indonesia	
Apa Itu Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	
BAB 02 Pengerjaan	21
Prakonstruksi	
Konstruksi	
Operasional	
BAB 03 Permasalahan	37
Tantangan	
Solusi	
Sosialisasi dan Pengawasan	
BAB 04 Nilai Lebih	43
Murah	
Aman	
Ramah Lingkungan	
BAB 05	55
Pemanfaatan Gas Alam untuk Rumah Tangga di Sejumlah Negara	
BAB 06 Testimoni	63
BAB 07 Rangkuman Berita (2008–2013)	69







BAB 01

PENDAHULUAN

PEMBANGUNAN JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA

GAS BUMI

Gas bumi adalah bahan bakar fosil berbentuk gas. Gas bumi sering juga disebut sebagai gas alam atau gas rawa. Gas bumi dapat ditemukan di ladang minyak, gas bumi, dan juga tambang batubara.

Komponen utama dalam gas bumi adalah metana (CH_4). Metana merupakan molekul hidrokarbon rantai terpendek dan teringan. Metana adalah gas rumah kaca yang dapat menciptakan pemanasan global ketika terlepas ke atmosfer. Saat terlepas ke atmosfer, metana umumnya dianggap sebagai polutan ketimbang sumber energi yang berguna. Meskipun begitu, metana di atmosfer bereaksi dengan ozon, memproduksi karbon dioksida (CO_2) dan air. Akibatnya, efek rumah kaca dari metana yang terlepas ke udara relatif hanya berlangsung sesaat.

Komposisi gas bumi pada umumnya adalah sebagai berikut:

Komponen	Persentase
Metana (CH_4)	80%–95%
Etana (C_2H_6)	5%–15%
Propana (C_3H_8) & butana (C_4H_{10})	< 5%

Gas bumi juga mengandung molekul-molekul hidrokarbon yang lebih berat, seperti etana (C_2H_6), propana (C_3H_8), butana (C_4H_{10}), selain juga gas-gas yang mengandung sulfur (belerang). Di samping itu, komposisi gas alam bervariasi sesuai dengan sumber ladang gasnya. Gas bumi, misalnya, bisa pula mengandung nitrogen, helium, CO_2 , hidrogen sulfida (H_2S), dan air. Gas dengan jumlah pengotor sulfur yang signifikan dinamakan sour gas dan

sering disebut juga sebagai acid gas (gas asam).

Gas bumi yang telah diproses dan akan dijual bersifat tidak berasa dan tidak berbau. Namun, sebelum gas tersebut didistribusikan ke pengguna akhir, biasanya gas tersebut diberi bau dengan menambahkan *thiol*. Tujuannya agar dapat terdeteksi bila terjadi kebocoran gas.

Gas bumi yang telah diproses sebenarnya tidak berbahaya. Tapi, gas bumi tanpa proses dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Hal ini karena gas tersebut dapat mengurangi kandungan oksigen di udara pada level yang dapat membahayakan.

Gas bumi lebih ringan dari udara sehingga cenderung mudah tersebar di atmosfer. Konsentrasi gas dapat mencapai titik campuran yang mudah meledak bila ia berada dalam ruang tertutup, seperti dalam rumah. Jika tersulut api, maka bisa menimbulkan ledakan.

Gas bumi dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satunya sebagai bahan baku industri. Untuk hal ini, gas bumi digunakan antara lain sebagai bahan baku pupuk, petrokimia, metanol, plastik, hujan buatan, besi tuang, pengelasan, dan pemadam api ringan.

Selain itu, gas bumi bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Sebagai bahan bakar, gas bumi digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); kendaraan bermotor (Bahan Bakar Gas/BBG, *Liquefied Gas for Vehicle/LGV*, *Compressed Natural Gas/CNG*), industri ringan, menengah dan berat.

Selanjutnya, gas bumi bisa pula dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, hotel, restoran dan sebagainya dalam bentuk *Liquefied Petroleum Gas/LPG*. Tidak hanya itu, gas bumi dapat menjadi komoditas energi untuk ekspor, misalnya dalam bentuk gas alam cair (*Liquefied Natural Gas/LNG*). Belum cukup, Pemerintah pun terus mengembang gas nonkonvensional, seperti gas metana batubara (*Coal Bed Methane/CBM*) dan *shale gas*.

Perbedaan pemanfaatan gas bumi tidak terlepas dari karakternya masing-

masing. LPG dan LNG, misalnya, sama-sama gas yang dicairkan. Tujuannya untuk memudahkan pengangkutan dalam jarak yang tidak terjangkau dengan pipa.

Meskipun sama-sama gas cair, komponen LPG dan LNG pun berbeda. Komponen LPG didominasi oleh propane dan butane. Jenis gas ini memiliki massa jenis yang lebih besar daripada LNG. Dalam tabung, LPG berbentuk zat cair. Namun pada suhu dan tekanan normal, LPG yang keluar dari tabung akan langsung berubah menjadi gas. Tekanan yang dibutuhkan untuk mencairkan gas ini cukup rendah sehingga sesuai untuk konsumen rumah tangga. Sifatnya mudah disimpan dan bisa langsung dibakar untuk dimanfaatkan tanpa perlu infrastruktur khusus.

Saat ini, LPG diproduksi di beberapa lapangan migas, yaitu salah satunya

dengan mengumpulkan minyak yang “menguap” ketika keluar dari sumur. Perlu diingat, tidak semua gas yang keluar dari sumur bisa dijadikan LPG karena tidak semua lapangan menghasilkan “uap gas” memadai sehingga bernilai ekonomis. Produksi LPG tanah air saat ini sekitar 1,4 juta metrik ton per tahun. Sementara itu, kebutuhan LPG nasional sekitar 5 juta metrik ton per tahun. Inilah yang menyebabkan Indonesia masih harus mengimpor LPG.

Jenis gas lain, sebagai contoh, adalah LNG. LNG adalah gas yang didominasi oleh metana dan etana yang didinginkan hingga menjadi cair pada suhu antara -150°C sampai -200°C . Pengembangan dan pemanfaatan LNG memerlukan infrastruktur yang lebih kompleks.

Di sisi hulu, pengembangan LNG tidak hanya memerlukan fasilitas produksi biasa, tapi membutuhkan kilang yang

mampu mencairkan gas tersebut sampai suhu yang ditentukan. Fasilitas pendingin dan tangki kriogenik ini membutuhkan investasi sangat besar.

Di sisi hilir, pemanfaatan LNG memerlukan fasilitas untuk mengubah LNG menjadi gas kembali yang disebut LNG *regasification terminal*. Selain fasilitas regasifikasi, pemanfaatan gas yang dihasilkan juga memerlukan jaringan pipa untuk sampai ke konsumen. Dengan kebutuhan akan temperatur sangat rendah, LNG tidak bisa diedarkan dalam bentuk tabung-tabung layaknya LPG. Tapi, pemanfaatan LNG memerlukan fasilitas regasifikasi sekaligus sistem transportasi terintegrasi ke pengguna.

Untuk jaringan gas kota, jenis gas alam yang tepat memerlukan beberapa kriteria tersendiri. Kriteria tersebut antara lain memiliki kualitas yang dapat digunakan untuk konsumsi perumahan atau industri

dan memenuhi spesifikasi perusahaan transmisi perpipaan atau perusahaan penyaluran. Dalam hal ini, *lean gas* bisa menjadi contohnya.

Jadi, gas alam memiliki beragam karakter yang berimplikasi terhadap pemanfaatannya. Alhasil, satu jenis gas belum bisa menggantikan penggunaan jenis gas lain, setidaknya untuk saat ini. Memang, Indonesia memiliki potensi gas yang besar, namun infrastruktur perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk menentukan harga keekonomian dari gas itu sendiri yang masih menjadi salah satu daya tarik bagi para pelaku bisnis. Pada akhirnya, Indonesia yang memiliki infrastruktur dan jaringan gas memadai akan terwujud dengan kerja keras serta komitmen semua pihak terkait.

POTENSI GAS BUMI INDONESIA

Pemanfaatan gas alam di Indonesia dimulai pada tahun 1960-an. Saat itu, produksi gas alam dari ladang gas alam PT Stanvac Indonesia di Pendopo, Sumatera Selatan dikirim melalui pipa gas ke pabrik pupuk Pusri IA milik PT Pupuk Sriwidjaja di Palembang, Sumatera Selatan. Perkembangan pemanfaatan gas alam di Indonesia meningkat pesat sejak tahun 1974. PT Pertamina (Persero) mulai memasok gas alam melalui pipa gas dari ladang gas alam di Prabumulih, Sumatera Selatan ke pabrik pupuk Pusri II, III, dan IV di Palembang. Pemanfaatan gas bumi juga mulai merambah wilayah-wilayah lain di Indonesia.

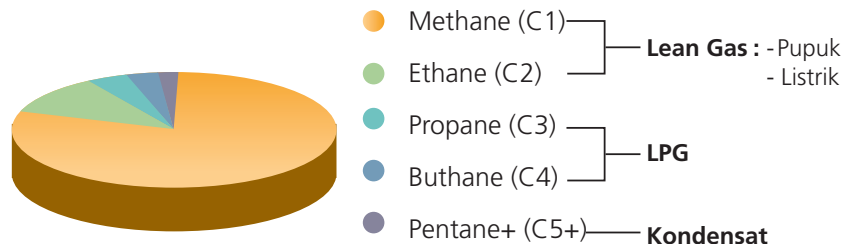
Gas bumi memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan di tanah air. Potensi cadangan gas di tanah air lebih besar daripada minyak bumi. Jumlah gas bumi yang dapat diangkat

dari dalam bumi nusantara pada tahun 2006 adalah sebesar 2,269 *trillion british thermal unit* (tbtu). Gas bumi tersebut sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik sebesar 843 tbtu (37%). Sementara itu, sisanya sebesar 1,426 tbtu (63%) diekspor dalam bentuk LNG maupun gas melalui pipa. Cadangan gas bumi diperkirakan cukup untuk

dipergunakan selama kurang-lebih 60 tahun ke depan.

Saat ini, proyek pengembangan gas bumi yang terus didukung Pemerintah antara lain Natuna D Alpha yang potensinya sekitar 46 triliun kaki kubik (*trillion cubic feet/tcf*); Tangguh Train 3 8,09 tcf; Donggi Senoro 2,8 tcf; dan Masela 9,18 tcf.

Komposisi Gas Alam



APA ITU JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA?

Sejak beberapa tahun lalu, Pemerintah berusaha melakukan berbagai upaya untuk menekan pertumbuhan penggunaan BBM dengan mengalihkan ke energi alternatif. Tujuan akhirnya untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Hal ini perlu dilakukan agar dapat meningkatkan *fuel security of supply*, tercapainya keseimbangan bauran energi (*energy mix*), dan menurunkan subsidi minyak tanah.

Di sisi lain, cadangan minyak bumi di Indonesia kian menipis. Produksinya pun cenderung menurun dari tahun ke tahun. Selain itu, harga minyak bumi cenderung naik hingga pernah menyentuh level di atas US\$100 per barel. Hal ini mengakibatkan beban subsidi untuk energi bisa membengkak. Pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah terus berupaya agar

subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak terlampaui. Sejumlah langkah strategis dilakukan. Salah satunya dengan mencari sumber energi alternatif sekaligus sebagai pengganti BBM. Maka, dengan kondisi menipisnya sumber daya minyak dan masih banyaknya sumber daya gas, tidak ada lagi istilah tawar-menawar untuk semakin fokus pada pemanfaatan gas bumi.

Dasar hukum yang menopang kebijakan pemanfaatan energi alternatif, seperti gas, sebagai pengganti minyak bumi bisa ditelusuri dari regulasi berikut ini:

1. Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

- a. Pasal 3c yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya minyak dan gas bumi sebagai sumber energi maupun bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri.
- b. Pasal 8 ayat 2 bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaraan pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi PP ini sebagai implementasi dari UU

Nomor 22 Tahun 2001. PP Nomor 36 Tahun 2004 ini menegaskan lebih jauh tentang ketentuan peningkatan pemakaian gas dalam negeri.

3. PP Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) PP ini memiliki makna mempercepat pelaksanaan penggunaan energi alternatif sebagai pengganti BBM. Hal ini berarti mengurangi subsidi BBM, khususnya minyak tanah, yang digunakan oleh rumah tangga.
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri

Sektor yang selama ini paling banyak menggunakan minyak bumi, tapi sebaliknya sangat sedikit memanfaatkan gas bumi adalah transportasi, rumah tangga, dan usaha atau pelanggan kecil. Data tahun 2005 menyatakan,

penggunaan minyak bumi untuk rumah tangga mencapai 11,3 juta kiloliter (kl).

Negara harus menyediakan subsidi yang makin besar terhadap ketiga sektor di atas bila tidak mengalihkan perhatian ke sumber energi lain di luar minyak bumi. Peralpnya, populasi manusia dan kendaraan bertambah tiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi pun menuntut ketersediaan sumber energi yang tidak sedikit. Belum lagi masalah lingkungan yang dihasilkan oleh sumber energi minyak bumi.

Dalam KUBE 1998, rumusan visi pembangunan sektor energi (visi energi) adalah terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui pendayagunaan sumber daya energi yang menghasilkan nilai tambah tinggi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam visi energi menurut KUBE, termuat tiga

kata kunci:

- **Pembangunan yang berkelanjutan**
Hal ini berarti pengembangan sumber daya energi harus berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memberikan manfaat yang merata sepanjang generasi.
- **Pendayagunaan sumber daya energi yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi**
Ini berarti pemanfaatan optimal dari seluruh sumber daya energi yang ada untuk menghasilkan nilai tambah sebesar-besarnya.
- **Kemakmuran rakyat**
Maksudnya, harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sementara itu, misi pengembangan gas bumi dari KEN 2003 adalah:

- Pengelolaan gas bumi yang seimbang antara penggunaan gas bumi untuk domestik dan ekspor;
- Memprioritaskan penggunaan gas bumi yang mempunyai nilai *multiplier effect* terbesar; dan
- Pemanfaatan secara optimal sumber-sumber gas bumi yang tidak dapat diekspor (lapangan gas marginal).

Pemerintah Indonesia melalui kebijakannya yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 tentang KEN hendak mendorong program konservasi energi. Perpres ini bertujuan untuk berusaha mewujudkan perubahan komposisi bauran energi dari kondisi saat ini.

Komposisi bauran energi nasional menunjukkan sampai dengan saat ini

masih didominasi oleh minyak bumi sebesar 49,7%. Selanjutnya adalah batubara 24,5%. Di belakangnya, gas bumi mengikuti dengan 20,1%.

Berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2006, maka diharapkan pada tahun

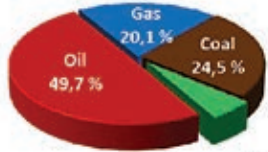
2025 nanti komposisi bauran energi akan berubah. Batubara ditargetkan menjadi sumber energi terbesar dengan 33%. Pemanfaatan gas bumi akan diperbesar hingga 30%. Lalu, peranan minyak bumi akan diperkecil menjadi hanya 20%.



Kondisi Energi Indonesia

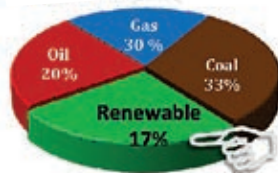
Kebijakan Energi Nasional

Kondisi saat ini



Renewable
5,7%

Target 2025



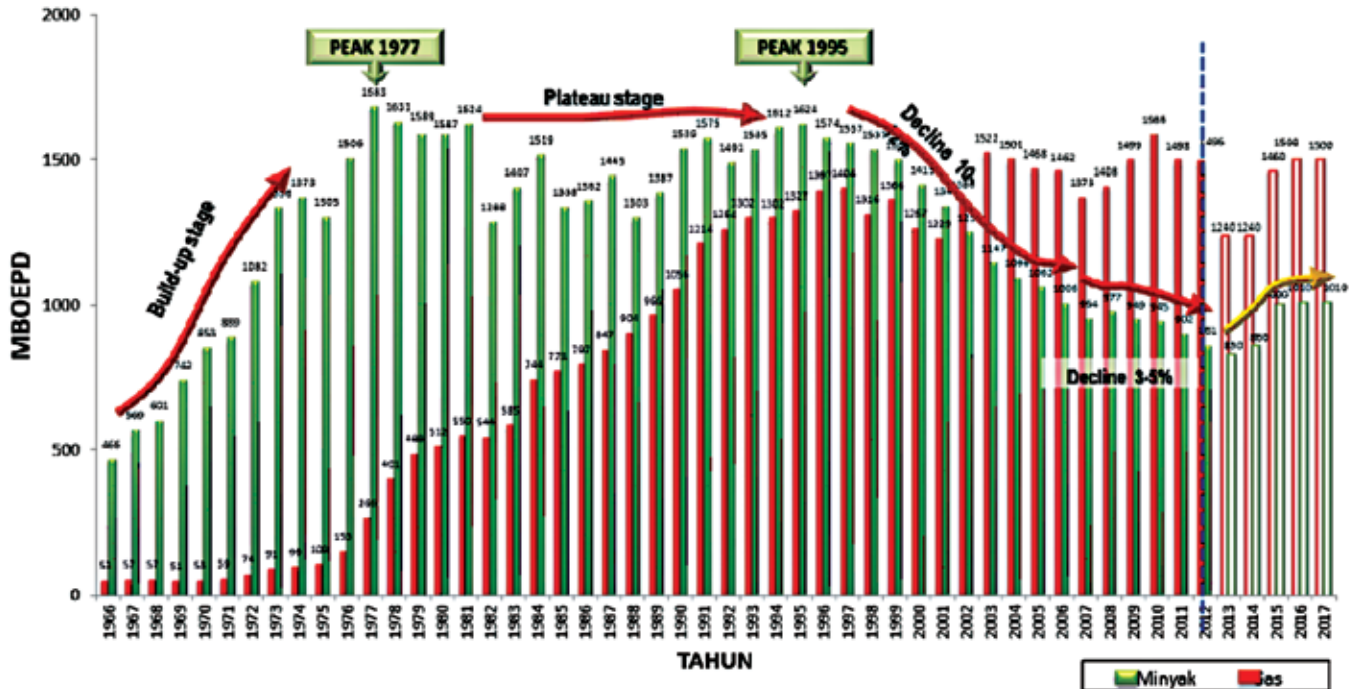
1. **28% atau Rp. 428 triliun** penerimaan negara (2012), berasal dari sektor ESDM.
2. **BBM dan listrik masih disubsidi (Rp. 225 T tahun 2012)** dan 77% tidak tetap sasaran;
3. **Investasi sektor ESDM mencapai US\$ 27 miliar (2011)**, iklim investasi cukup kondusif.
4. **Indonesia memiliki keanekaragaman energi.** Ketergantungan energi fosil masih tinggi, padahal cadangannya terbatas
5. **Minyak porsi terbesar dalam bauran energi (49,7%).**
Pemanfaatan EBT masih sekitar 6%. **EBT ditargetkan akan mencapai 17% pada tahun 2025;**
6. **Pemanfaatan gas bumi nasional yaitu 56% untuk ekspor** dan 44% untuk domestik
7. **Keterbatasan infrastruktur merupakan tantangan** dalam pemenuhan energi domestik.
8. Akses energi masih terbatas, **rasio elektrifikasi sebesar 73%**

Perubahan komposisi sumber energi menjadi mutlak dilakukan mengingat saat ini perubahan status Indonesia dari negara

pengekspor minyak bumi (*net oil exporter*) menjadi negara pengimpor minyak bumi (*net oil importer*).

Profil Produksi Migas Indonesia

Perubahan paradigma dari dominasi minyak ke gas dengan semakin berkurangnya sumber dan produksi minyak bumi serta ditemukannya cadangan gas bumi yang besar





Salah satu langkah strategis Pemerintah untuk menggantikan penggunaan minyak bumi adalah meningkatkan penggunaan bahan bakar gas bumi untuk sektor rumah tangga dan pelanggan kecil. Program ini disebut **jaringan gas untuk rumah tangga atau gas kota**. Jaringan gas untuk rumah tangga berarti mengalirkan gas melalui jaringan pipa hingga ke rumah tangga.

Pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih dan murah serta program komplementer konversi minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) untuk percepatan pengurangan penggunaan minyak bumi. Melalui program ini, masyarakat diharapkan mendapatkan bahan bakar yang lebih bersih, aman, dan murah.

Terkait hal ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapatkan penugasan penyediaan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga dari Pemerintah melalui Perpres Nomor 19 tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor.1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 serta melalui rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR.

Dalam hal ini, Kementerian ESDM mengemban amanat menyediakan jaringan gas bumi untuk rumah tangga secara gratis kepada masyarakat. Program pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga ini dibangun di kota-kota atau daerah yang dekat dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan transmisi gas bumi.

Jaringan gas untuk rumah tangga menggunakan dana dari APBN. Pemerintah membangun jaringan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga karena badan usaha tidak tertarik membangun akibat minimnya keuntungan dalam pengelolaannya. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan serta dan mewujudkan daerahnya menjadi kota gas di masa mendatang.

Pembangunan jaringan distribusi gas dibangun bertahap karena keterbatasan anggaran. Pada tahun 2007 lalu, Pemerintah—dengan melibatkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)—telah melakukan beberapa pre feasibility study dalam rangka menerapkan jaringan gas untuk rumah tangga. Setahun berselang, Pemerintah melakukan Uji Kelayakan Lingkungan UKL dan Upaya

Pengelolaan Lingkungan (UPL), membuat Front End Engineering Design (FEED), dan *Detail Engineering Design for Construction* (DEDC) antara lain untuk Blora, Palembang, Bekasi, Depok, Surabaya, dan Medan.

Kemudian, Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas Kementerian ESDM melakukan koordinasi dengan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mendapatkan pasokan gas bumi sekaligus juga pemilihan lokasi tapping pipa. Koordinasi dilakukan juga dengan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan desa/kelurahan terpilih, pembuatan desain berupa FEED/DEDC, dan termasuk calon pelanggan. Tahap selanjutnya adalah konstruksi dan pengoperasian melalui pemilihan operator. Untuk satu ini, BUMD mendapatkan prioritas pengelolaan jaringan gas tersebut.





Jaringan gas untuk rumah tangga pertama kali dapat dinikmati masyarakat tanah air pada tahun 2009. Sejak tahun itu, jumlah masyarakat penerima program ini hampir 57.000 kepala keluarga, yaitu di Palembang (3.311 sambungan rumah), Surabaya (2.900 sambungan rumah), Sidoarjo (8.647 sambungan rumah), Depok (4.000 sambungan rumah), Tarakan (3.666 sambungan rumah), Bekasi (4.628 sambungan rumah), Bontang (3.960 sambungan rumah), Sengkang (4.172 sambungan rumah), rusun Jabodetabek (5.234 sambungan rumah), Prabumulih (4.650 sambungan rumah), Jambi (4.000 sambungan rumah), Bogor (4.000 sambungan rumah), dan Cirebon (4.000 sambungan rumah).

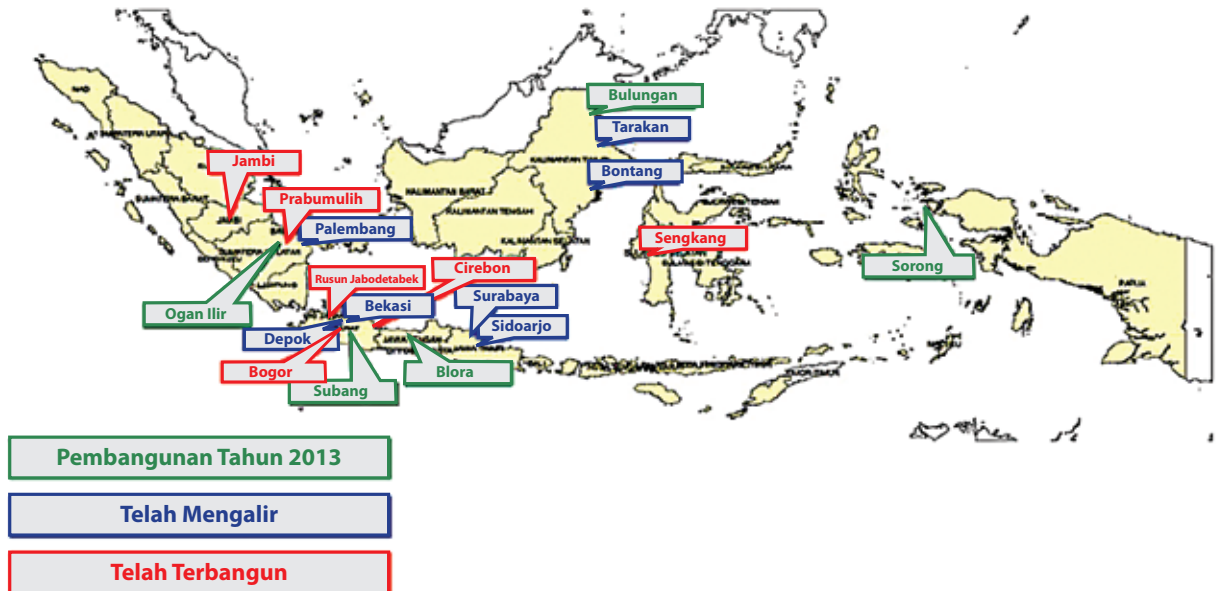
Profil Produksi Migas Indonesia

NAMA KEGIATAN	TAHUN						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Penyusunan Regulasi & kebijakan pendukung							
Proses Revisi mjd Perencanaan Pembangunan jaringan Distribusi Gas Bumi untuk 6 wilayah (FEED, DEDC & Kajian Kelembagaan							
FEED dan DEDC Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	1) Kabupaten Blora: 2) Palembang (kel.Lorok Pakjo dan kel.siring agung) 3) Bekasi (Kel.Pejuang dan Kel.kali abang) 4) Depok (Kel.Bakti jaya dan kel.Depok jaya) 5) Surabaya (kel.kalirungkut dan kel.rungkut kidul 6) Medan (kel.Sunggal dan kel.Sel sikambang)	- Tarakan, kaltim - Sidoarjo,jatim	- Rumah susun Jabodetabek - Bontang,kaltim - Sengkang,sulsel	- Prabumulih sumsel - Jambi - Bogor - Cirebon - Kalidawir. Jatim	- Sorong,Papua - Subang,jabar - Blora - Ogan ilir	- Samarinda, Kaltim - Muara Enim - Lampung - Balik papan	- Cilegon - Tenggara Kaltim
Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Tahap Konstruksi)		1. Kota Palembang; 2. Kota Surabaya	1. Bekasi 2. Depok 3. Tarakan, Kaltim 4. Sidoarjo, Jatim	1. Rusun Jabodetabek 2. Sengkang Sulsel 3. Bontang Kaltim 4. Sidoarjo 5. Bekasi	1. Prabumulih sumsel 2. Jambi 3. Bogor 4. Cirebon 5. Kalidawir jatim	- Sorong Papua - Subang Jabar - Blora - Ogan ilir	1. Samarinda Kaltim 2. Muara Enim 3. Lampung 4. Balikpapan

Aset jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga ini dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan dikelola oleh badan usaha sesuai dengan PMK No.

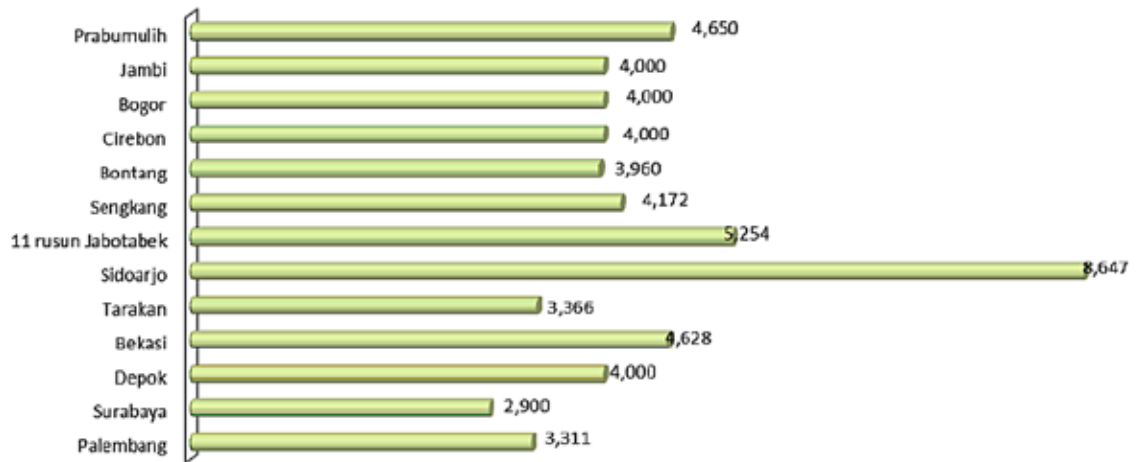
96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga

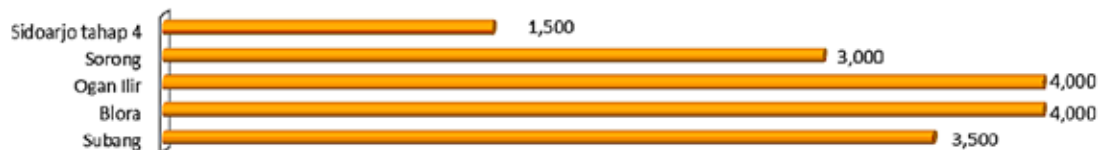


PEMBANGUNAN JARINGAN GAS KOTA (Sambungan Rumah)

Jaringan gas pipa terpasang (total : 56.888)



Rencana jaringan gas pipa tahun 2013 (total : 16.000)





Pemanfaatan gas bumi sektor rumah tangga dapat menggantikan konsumsi bahan bakar minyak. Dewasa ini, kebutuhan energi untuk rumah tangga umumnya digunakan pada berbagai peralatan, seperti untuk memasak,

TV, lemari gas, pendingin ruangan, pemanas air, mesin cuci, lampu, radio, kipas angin dan sebagainya. Kebutuhan energi tersebut umumnya dipasok oleh PLN untuk perangkat elektronik.

KOTA	PASOKAN GAS
Tarakan	Medco E&P Indonesia
Depok	Pertamina EP
Bekasi	Pertamina EP
Sidoarjo	Lapindo Brantas
Surabaya	Lapindo Brantas
Palembang	Medco E&P Indonesia
Sengkang	Energy Equity
RUSUN JABODETABEK	PGN dan Pertamina EP
Prabumulih	Pertamina EP
Bogor	-
Cirebon	Pertamina EP
Sorong	-
Blora	-
Subang	-
Bontang	Inpex Co.





BAB 02

PENGERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA

PRAKONSTRUKSI

Pengerjaan jaringan gas untuk rumah tangga terdiri atas tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasional.

Pada tahap prakonstruksi, kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemilihan lokasi dan perizinan, termasuk izin menggunakan lahan. Selain perizinan, juga dilakukan upaya koordinasi dengan instansi terkait yang memiliki

jaringan perpipaan dan kabel di sekitar lokasi jalur pipa tersebut, seperti Telkom, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PLN dan lain-lain. Dalam perizinan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat belum dilibatkan mengingat peletakan pipa berada di dalam tanah. Lahan di atasnya masih dapat digunakan oleh pemiliknya.

Mengingat seluruh lokasi jalur pipa adalah di tepi jalan dan merupakan lahan milik negara, baik jalan negara maupun jalan propinsi, maka kegiatan peletakan pipa nantinya belum membutuhkan pembebasan lahan (pembelian lahan). Namun, untuk pemasangan *Metering and Regulating Station* (MR/S) dan *Regulating System* (RS) akan dilakukan permintaan izin. Terkecuali, penempatan pipa berlokasi pada sarana umum (milik Pemerintah).



KONSTRUKSI

Tahap konstruksi merupakan tahap kegiatan fisik pelaksanaan berupa pemasangan pipa. Kegiatan ini meliputi mobilisasi peralatan dan material, penggalian, serta pengelasan *testing and comissioning*.

Kegiatan pertama yang dilakukan dalam tahap konstruksi adalah penerimaan kerja yang direkrut oleh kontraktor pelaksana. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam tahap konstruksi ini disesuaikan dengan

kebutuhan dan kualifikasi yang dimiliki. Penggunaan tenaga kerja diprioritaskan berasal dari penduduk di sekitar lokasi kegiatan. Pekerjaan pemasangan pipa dilakukan tergantung pada kondisi saat pemasangan pipa, khususnya cuaca.

Contoh Kebutuhan Tenaga Kerja Tahap Kosntruksi Jaringan Distribusi Gas Bumi di Kota Depok

No	Kegiatan	Jumlah (orang)	Asal Tenaga Kerja		Tingkat Pendidikan			
			Lokal	Komuter harian	SD	SLTP	SLTA	D3/S1
1	Site Manager	1	-	1	-	-	-	1
2	Supervisi *)	2	-	2	-	-	-	2
3	Pelaksana	4	-	4	-	-	-	4
4	Mandor	4	-	4	-	-	4	-
5	Tukang	20	10	10	5	5	10	-
6	Pembantu Tukang	40	20	20	10	30	-	-
Jumlah		71	30	41	15	35	14	7

Sumber : Ditjen Migas 2009

Keterangan : * kualifikasi tenaga kerja mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP)

Langkah selanjutnya adalah penyiapan lahan sebagai kegiatan fisik pertama pada tahap konstruksi antara lain terdiri atas:

- a. Pengukuran dan pematokan
- b. Pembersihan jalur pipa
- c. Pembuatan tanda pengaman
- d. Pembuatan direksi keet
- e. Pengangkutan pipa dan *fittings*
- f. Pembuatan papan nama proyek

Lahan yang diperlukan untuk pemasangan pipa PE diameter 63–180 milimeter (mm) adalah lebar galian 0,5 meter (m) dengan kedalaman 0,7–1,1 m. Panjang galian yang terbuka (digali) 100m. Karena lahan untuk jalur pipa umumnya terletak di sisi jalan raya dan merupakan lahan rata, maka pekerjaan yang dilakukan tidak banyak. Sebagian besar lahannya adalah lahan kosong yang digunakan sebagai bahu jalan raya atau trotoar. Pada lokasi tersebut, *marker* pos dipasang setiap 500 m di tempat-tempat penting, seperti jembatan pipa dan

bak *valve*. Sementara itu, patok gas dipasang setiap 50m. Pembuatan serta pemasangan *marker* pos dan patok gas harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Rancangan (desain) dasar pipa yang digunakan menggunakan desain standar dari Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun, kondisi lahan dan keadaan fisik di masing-masing lokasi sangat berbeda. Maka, modifikasi-modifikasi dilakukan sesuai dengan kondisi fisik lokal. Berbagai kriteria yang dipakai adalah:

- a. Diameter dan kapasitas dari sistem perpipaan harus memenuhi persyaratan daya tahan pipa itu sendiri. Orientasi desain harus memikirkan jangka panjang penggunaan pipa dan tidak hanya ditargetkan untuk jangka pendek.
- b. Kualitas tingkat tinggi selama masa konstruksi perlu mendapatkan perhatian.

- c. Jaringan pipa harus mempertimbangkan perkembangan urbanisasi di masa datang dan juga perkembangan kota tersebut.
- d. Desain dasar harus mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti kekerasan pipa dan kedalaman pipa terutama dalam kaitannya dengan jenis penggunaan lahan di lokasi pipa sehingga terhindar dari gangguan yang berasal dari luar.
- e. Desain dan rute jalur pipa harus memenuhi persyaratan perawatan dan operasional di kemudian hari.

Pelaksanaan pemasangan konstruksi harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a. Jaringan pipa yang akan dipasang harus memenuhi standar dan spesifikasi teknis, seperti yang

tertuang pada SNI WAJIB 13-3473-2002 tentang Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas

Hal ini mencakup pipa dan material yang akan digunakan, diameter pipa, rute atau lokasi yang ditentukan, tekanan yang diperlukan, sistem penyambungan pipa, dan pengamanan pipa yang terpasang.

b. Perlintasan dengan jaringan

- o Di bawah tanah
- o Bila pipa gas berlintasan dengan utilitas lain, maka pipa harus dipasang di bawah utilitas tersebut dengan jarak minimal sesuai dengan ketentuan dalam SNI. Selain itu, jarak minimal 1 m diberlakukan bila berlintasan dengan pipa gas lain. Bila pipa gas sejajar dengan jaringan lain, maka pipa harus diberi jarak minimal 2 m.

- o Pada saat penggalian, jaringan umum di bawah tanah harus diamankan. Segala kerusakan yang timbul pada utilitas tersebut akibat penggalian merupakan tanggung jawab kontraktor. Bila diperlukan untuk memindahkan sementara, penyedia barang atau jasa harus meminta izin dari instansi yang berwenang dengan catatan akan segera diperbaiki bila pipa telah selesai dipasang. Penyedia barang atau jasa tidak diperkenankan merusak saluran-saluran air yang ada pada jalur penggalian. Dalam keadaan darurat dan seizin Direksi Pengawas, kontraktor dapat melakukannya dengan tujuan memudahkan penggalian dan harus disediakan fasilitas sementara untuk memindahkan aliran air. Bila pemasangan pipa telah

dilaksanakan, maka aliran air harus dipindahkan kembali seperti keadaan semula. Semua biaya yang timbul untuk mengatasi hal seperti dijelaskan di atas merupakan beban kontraktor.

c. Di atas tanah

Bila di atas jalur penggalian terdapat tiang-tiang listrik, telepon, atau sarana lainnya, maka kontraktor agar mengamankannya dengan mengadakan dan memasang penyangga atau memindahkan untuk sementara atas seizin instansi yang berwenang. Kontraktor segera memperbaiki seperti keadaan semula bila pemasangan pipa telah dilaksanakan.

d. Saluran air

Umumnya, untuk perlintasan dengan saluran-saluran air pembuangan perkotaan,

pasangan pipa ditanam dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1.000 mm di bawah dasar saluran irigasi. Tanpa seizin Direksi Pengawas, kontraktor tidak diperkenankan melakukan kerusakan pada saluran-saluran air yang ada di sekitar tempat pemasangan pipa gas. Dalam keadaan terpaksa, dengan memudahkan penggalian dan pemasangan pipa gas, aliran air dapat dipindahkan untuk sementara dengan catatan bahwa setelah pemasangan pipa selesai, aliran tersebut dapat dikembalikan seperti keadaan semula.

- e. Konstruksi menyeberangi jalan Di beberapa lokasi, kegiatan pembangunan jaringan gas bumi akan menyeberangi jalan. Salah satu contohnya di kota Depok. Dalam hal ini, perlintasan di bawah jalan raya dilakukan dengan cara membuat konstruksi

khusus atau dengan cara pengeboran yang harus dilakukan dengan *mechanical auger*, atau alat lain yang disetujui sehingga lalu lintas tidak terganggu. Pelaksanaan pengeboran dengan cara manual tidak diizinkan. Kedalaman pipa di bawah permukaan jalan raya adalah minimal 2.000 mm dihitung dari permukaan jalan raya sampai permukaan atas pipa. Ruang kerja untuk pekerjaan harus diperhatikan untuk pemasangan mesin bor dan lain-lain. Dalam pelaksanaan pengeboran ini, harus digunakan pipa selubung (*casing pipe*). Pengeboran harus menghindari terjadinya rongga antara lubang bor dan pipa. Untuk menjaga dari pengaruh tekanan gandar maupun getaran kendaraan dari atas terhadap pipa yang terpasang, maka pemasangannya diberi pengaman, baik berupa casing pipa maupun

dilapisi batako semen tergantung dari fungsi jalan yang dilewatinya.

- f. Perlintasan dengan rel kereta api Pembangunan jaringan distribusi gas bumi di kota Depok juga melintasi rel kereta api. Penanaman pipa yang melintasi rel kereta api dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- o Jarak penggalian dan penempatan lubang perawatan pipa harus menjamin keselamatan konstruksi jalan rel dan pengeoperasian kereta api.
 - o Kedalaman pipa yang ditanam minimal 1,5 m di bawah permukaan tanah (sub grade).
 - o Dilaksanakan dengan cara pengeboran atau galian sesuai dengan persyaratan teknis.
 - o Pipa yang ditanam di bawah jalan rel tidak boleh terputus-putus.



- o Pipa yang memerlukan pengamanan tambahan harus dipasang pelindung (casing) yang tidak terputus-putus (monolite).
- o Memakai konstruksi kuat untuk pekerjaan yang dapat mengganggu konstruksi jalan rel.
- o Penanaman minimal berjarak 10 m dari sisi luar pangkal bangunan.
Pipa yang ditanam harus

diberi tanda atau logo yang menunjukkan identitas instansi terkait.

- g. Pipa dapat dipasang di atas sungai dengan syarat harus ada *risk analysis* sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 300 K/38/MPE/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Pengalir Minyak dan Gas Bumi. Ada cara khusus untuk melaksanakan perlintasan dengan sungai, yaitu dengan jembatan atau melalui dasar sungai dengan menggunakan *sinker*. Namun, beberapa hal harus diperhatikan:
 - o Bila pipa gas diseberangkan lewat atas tanah, maka digunakan jembatan yang dipasang *safety guard* pada kedua ujung jembatan.
 - o Bila pipa gas diseberangkan lewat dasar sungai, maka digunakan sistem pemberat (*sinker*). Fungsi *sinker* adalah untuk menahan pipa gas agar tidak terangkat dan bergeser dari posisi pemasangan akibat tekanan air ke atas.
- o Selain cara khusus di atas, ada cara lain, yaitu dengan ditanam dengan kedalaman sekurang-kurangnya 2 m di bawah dasar normalisasi sungai.
- h. Status lahan pemasangan pipa Status lahan yang digunakan untuk pemasangan pipa distribusi gas bumi sebagian besar milik pemerintah daerah (pemda) setempat. Hanya sebagian kecil menggunakan lahan milik penduduk, yaitu pekarangan rumah yang akan dimasuki jaringan pipa gas. Pipa distribusi gas umumnya ditanam di dalam tanah dengan kedalaman di atas 1 m sehingga tidak mengganggu tata guna lahan di atasnya. Dengan tidak terpengaruhinya

tata guna lahan tersebut, maka tidak diperlukan kompensasi atau ganti rugi dan cukup hanya menyampaikan permohonan izin saja. Izin kemungkinan didapat mengingat warga yang bersangkutan berminat untuk dimasuki jaringan pipa gas.

Untuk mengetahui tingkat kelaikan pipa, terutama dalam kaitannya adanya kebocoran dan juga ketahanan, dilakukan uji pneumatik. Sebagai catatan khusus, pelaksanaan uji pneumatik menggunakan udara yang bersih. Pada titik tertentu, tekanan pipa dipantau selama beberapa saat untuk melihat kestabilan tekanan di setiap titik pengamatan. Penekanan dilakukan selama 24 jam. Jika terjadi perbedaan tekanan berarti mengindikasikan adanya kebocoran yang selanjutnya akan diperbaiki.

OPERASIONAL

Setelah konstruksi, tahap berikutnya ialah operasional. Tahap operasional adalah tahap kegiatan pengeoperasian jaringan pipa distribusi yang telah dibangun. Tahap ini terdiri atas:

a. Pengoperasian jaringan pipa distirbusi

Pada kondisi normal, jaringan pipa distribusi dioperasikan pada tekanan yang sesuai dengan tekanan yang dibutuhkan. Alat pengatur tekanan pada distirbusi tekanan rendah adalah *Matering and Regulating Station (MRS)*, sedangkan untuk menurunkan tekanan pada meter konsumen rumah tangga menggunakan *service regulator*.

Tekanan operasi boleh maksimum (TOBM) harus lebih kecil dari:

- o Tekanan desain elemen yang terlemah dari sistem jaringan pipa.
- o Tekanan yang diperoleh dengan jalan membagi tekanan test system jaringan pipa sesudah konstruksi dengan faktor yang sesuai pada kelas lokasi yang dilibatkan seperti pada tabel di bawah ini.
- o Tekanan aman maksimum yang dialami oleh sistem jaringan pipa yang didasarkan pada pengoperasioan dan pemeliharaan.

Tekanan Operasi Boleh Maksimum

KELAS LOKASI	TEKANAN UNTUK PIPA BAJA	TEKANAN UNTUK PIPA PLASTIK
1	Tekanan test/1,10	Tekanan test/1,50
2	Tekanan test/1,25	Tekanan test/1,50
3	Tekanan test/1,40	Tekanan test/1,50
4	Tekanan test/1,40	Tekanan test/1,50

Tekanan operasi sistem jaringan pipa dikelompokkan menjadi 3 (tiga) katagori, seperti di bawah ini:

Kriteria Pembagian Tekanan Sistem Jaringan Pipa Distribusi Gas

Tekanan Operasi	Katagori Sistem
≤ 100 mbar 10	Sistem tekanan rendah
> 100 mbar – bar	Sistem tekanan menengah
≤ 4 bar	Sistem tekanan tinggi

b. Pengoperasian sistem jaringan pipa distribusi tekanan tinggi, menengah, dan rendah

Sistem pengoperasian jaringan distribusi gas dibagi menjadi tiga system, yaitu sistem jaringan tekanan tinggi, tekanan menengah, dan sistem jaringan pipa distribusi. Setiap sistem jaringan pipa distribusi dipasang dari suatu sumber gas dengan tekanan lebih tinggi. Alat pengukur tekanan dan alat untuk mencegah terjadinya

kelebihan tekanan yang digunakan pada sistem distribusi tekanan tinggi, menengah, dan rendah meliputi shut off valve, active regulator, dan monitoring regulator and shut.

Pelaksanaan pengamatan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Akan tetapi, bila terjadi kerusakan pada MR/S, maka pengamatan akan berubah sesuai dengan jadwal dan rencana.

Operasi MR/S

a. *Matering and Regulating Station (MR/S)*

Komponen MR/S terdiri atas Inlet flange, Outlet flange, Filter, Shut of valve, monitoring regulator, active regulator, meter gas, relief valve, check valce, dan kerangan.

Secara keseluruhan fungsi dan MR/S adalah:

- o Menurunkan tekanan
- o Menghilangkan fluktuasi tekanan

Dengan adanya stasiun ini, tekanan yang keluar dari M/RS dijaga pada tekanan konstan.

- o Menghilangkan kontaminan
Di dalam M/RS dilakukan juga penghilangan kontaminan dengan memasang alat penjebak (trap) atau filter.
- o Mengukur jumlah gas yang mengalir melalui stasiun terdekat

b. Prosedur pengoperasian MR/S

MR/S yang terpasang di suatu lokasi dipasang berdasarkan kebutuhan pelanggan dan disesuaikan dengan kondisi sistem jaringan pipa distirbusi gas bersangkutan. Pengoperasian M/RS disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dengan memperhatikan keadaan dan kemampuan peralatan tersebut untuk menghindari terjadinya kejadian yang membahayakan manusia, properti, dan lingkungan sekitarnya.

Pengoperasian M/R/S harus mengacu pada petunjuk manual yang dikeluarkan oleh pihak pembuat peralatan tersebut. Setiap M/R/S dilengkapi kartu M/R/S yang memuat data-data teknis dan ketentuan operasi alat tersebut.

c. Prosedur pengoperasian pengatur tekanan berlebih

Active regulator

Ketentuan yang berlaku dalam pengoperasian active regulator meliputi:

- o Menjaga dan mengawasi agar tekanan regulator aktif berada pada angka yang sesuai dengan tekanan yang ditentukan (*setting point*);
- o Menjaga dan mengawasi regulator monitor agar berfungsi dengan baik;
- o Jika terjadi penyimpangan tekanan, dilakukan pengulangan penentuan

tekanan (*resetting*);

- o Meneliti sensing line agar selalu dalam kondisi baik dan bersih;
- o Menjaga dan mengawasi filter induk dalam keadaan baik dan bersih, yaitu dengan melihat differential pressures indicator filter. Apabila sudah mencapai 0.3, maka filter segera dibersihkan;
- o Mencatat data penyaluran gas yang meliputi tekanan, suhu, dan angka meter.

Regulator monitor

Tergantung dari sistem desain dan pertimbangan keselamatan serta operasi dalam mendapatkan perlindungan yang optimal, *regulator monitor* dipasang dengan regulator operasi. *Regulator monitor* dipasang pada tekanan yang lebih tinggi dari tekanan regulator operasi dan pada posisi terbuka penuh selama operasi berjalan dengan normal.

Peletakkannya dapat dilihat pada *gas utilization project scematic of coustemer matering regulating modul*. *Setting* tekanan pada regulator monitor tergantung dari spesifikasi dan kemampuan alat serta kebutuhan operasi.

Relief valve

Relief valve akan bekerja jika tekanan operasi gas lebih besar dari *setting relief valve*. *Setting relief valve* lebih besar daripada *setting monitor regulator aktif*. Gas berlebihan tersebut akan dikeluarkan melalui *vent-stack* yang terpasang pada alat ini. *Setting* tekanan ditentukan oleh spesifikasi peralatan dan kebutuhan dari sistem jaringan distribusi gas.

Automatic Shut-Off

Automatic shut-off akan berfungsi secara otomatis menutup tekanan *setting* melebihi tekanan aliran

gas yang melebihi *setting shut-off valve*. *Setting shut-off* lebih tinggi daripada *relief valve*. Untuk mengoperasikan kembali sistem jaringan pipa distribusi gas, alat ini harus di-*setting* ulang secara manual.

d. Perawatan pipa gas dan stasiun penerima

Untuk menjaga agar jaringan pipa gas dapat bertahan seperti yang direncanakan (minimum 20 tahun), maka diperlukan perawatan terhadap pipa gas. Perawatan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap korosi (pada tahap konstruksi) gempa/bencana alam dan juga perilaku manusia.

- o Perawatan pipa dari gangguan fisik
Salah satu upaya yang dilakukan dengan memberikan tanda keberadaan pipa tersebut, yaitu memberi tanda berupa papan pengumuman

bahwa di lokasi tersebut telah ditanam pipa gas. Hal ini penting dilakukan mengingat adanya tanda tersebut membuat masyarakat pengguna di daerah itu menyadari dan mengetahui adanya pipa gas yang ditanam di dalam tanah. Selain itu, pemberian tanda di lokasi-lokasi penanaman pipa di sepanjang sisi jalan raya mengingatkan kemungkinan penggalian baru untuk berbagai kepentingan, seperti pipa air PAM. Sebaiknya, pipa yang baru ditanam setelah pipa gas dipasang plastik beberapa sentimeter (cm) di atas pipa yang bertuliskan adanya pipa gas di bawahnya. Hal ini dilakukan agar sebelum menyentuh pipa gas, penggali menemukan tanda itu terlebih dahulu sehingga dapat mengantisipasi kegiatan

mereka selanjutnya.

- o Perawatan pipa dari ancaman korosi
Perawatan gangguan korosi dilakukan dengan menggunakan bahan kimia/cat dan anode. Penggantian terhadap peralatan yang rusak dilakukan pada setiap bak kontrol dan stasiun untuk mencegah terjadinya kebocoran.
- o Perawatan pipa dari kebocoran
Operasi stasiun “off-take” pada prinsipnya untuk memantau seluruh proses distribusi gas di setiap MR/S dan R/S
Tanda-tanda gas:
 - *Marker tape*
Membuat/memasang marker tape, yaitu suatu lembaran plastik berwarna kuning, sepanjang lubang galian ± 50 cm di bawah permukaan tanah pada as lubang galian.

- *Marker post*
Membuat patok-patok gas setiap jarak 100 m dan marker post pada jarak 0,5 km atau tempat tempat lain yang telah ditetapkan.
- Pengoperasian stasiun M/RS
Pada prinsipnya, stasiun ini berfungsi untuk mengalirkan gas ke jalur distribusi dan sekaligus menjaga agar tekanan gas di dalam pipa tetap stabil. Stasiun ini dilengkapi dengan peralatan kontrol laju aliran gas dan pengaturan tekanan.
- Sistem tanggap darurat (*Emergency Central Control/ECC*)
Saat distribusi gas telah beroperasi, maka petugas ECC siap menjalankan tugasnya memantau seluruh jaringan pipa yang didistribusikan kepada



pelanggan. Ini dilakukan untuk mendeteksi bila adanya kebocoran atau masalah gangguan terhadap aliran gas ke lokasi pelanggan tersebut. Selain itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi, Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga memiliki Standard Operating Procedure (SOP) tentang penanggulangan keadaan darurat, yaitu langkah-langkah yang diambil bila terjadi keadaan darurat. Adapun upaya

yang dilakukan membuat jadwal pemeliharaan jaringan PPT dan fasilitas pendistribusian gasnya.

Sebagai contoh, tabel berikut ini menyatakan spesifikasi gas alam yang akan dipasang untuk kelurahan Beji dan Beji timur, kota Depok. Dari tabel itu diketahui kedua pipa transmisi berasal dari satu sumber. Jumlah komposisi gas aktual rata-rata serta nilai kalori adalah sebagai berikut:

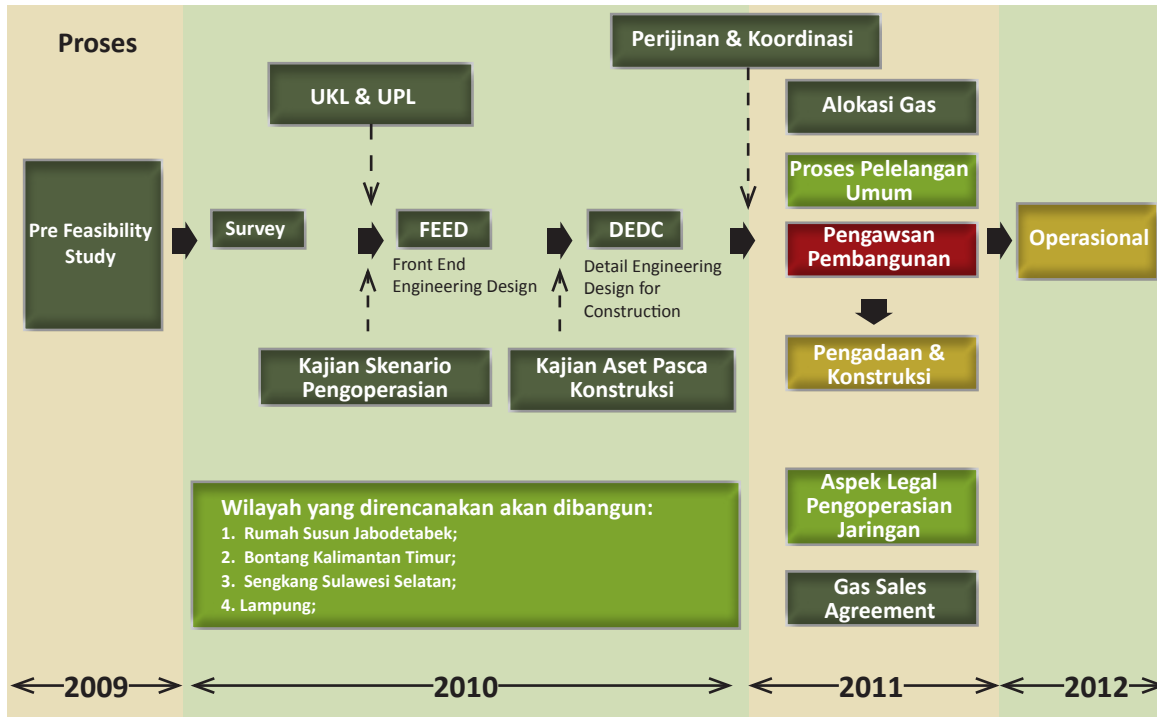
NO	KOMPOSISI GAS RATA-RATA		WILAYAH DISTRIBUSI DEPOK
	Nama Parameter	Komposisi Gas	
1.	N ₂	%	6.21
2.	CO ₂	%	7.98
3.	C ₁ H ₄	%	80.93
4.	C ₂ H ₆	%	2.32
5.	C ₃ H ₈	%	1.39
6.	n-C ₄ H ₁₀	%	0.32
7.	i-C ₄ H ₁₀	%	0.34
8.	N – C ₅ H ₁₂	%	0.08
9.	i-C ₅ H ₁₂	%	0.16
10.	C ₆ H ₁₄₊	%	0.27
11.	SG	-	0.7045
12.	Gross Heating Value	BTU/CSF	940.9756

Sumber : Pertamina EP Region Jawa, 2009

Spesifikasi untuk Material Pipa:

- KEPMEN ESDM 300 K : Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi
- SNI 13-3473-2002 : Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas
- SNI 13-3507-1994 : Konstruksi Sistem Pipa Polyethylene
- SNI 3-6908-2022 : Inspeksi dan Pengetasan Katup

Skema Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (contoh pembangunan jaringan gas bumi untuk kota Sengkang)







BAB 03

PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA

TANTANGAN

Berbeda dengan lapangan minyak bumi, lapangan gas bumi tidak dapat seketika diproduksi atau dikembangkan apabila ditemukan cadangan yang terbukti. Kendala atau hambatan untuk melakukan eksploitasi lapangan gas bumi dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- Tidak adanya jaringan atau infrastruktur gas bumi yang terdekat, misalkan jaringan transmisi gas bumi, jaringan distribusi gas bumi, ataupun LNG *Liquefaction*.
- Jauhnya pasar gas bumi terhadap sumber gas bumi, misalkan pabrik pupuk, pabrik pembuatan besi/ baja, pabrik manufaktur, pabrik petrokimia dan lain sebagainya.
- Tidak adanya jaringan transmisi listrik yang dekat dengan sumber gas bumi tersebut sehingga tidak memungkinkan untuk membangun

pembangkit listrik berbahan bakar gas.

- Subsidi bahan bakar minyak yang dapat disubstitusikan dengan gas bumi sehingga harga gas bumi kurang kompetitif.
- Ketakutan pihak investor untuk berinvestasi akibat kurang jelasnya landasan hukum di negara ini.
- Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kelemahan gas bumi ada pada sisi biaya pengembangan jaringan distribusinya yang sangat mahal per kepala keluarga atau per titik. Hal ini disebabkan volume konsumsi bahan bakar gas bumi rumah tangga rata-rata per harinya dalam setahun sangat kecil atau rendah. Kendala ini hampir tidak ditemui pada negara-negara dengan empat musim. Gas bumi akan mengalami *peak demand/ supply* pada saat musim dingin

tiba karena digunakan untuk memanaskan suhu ruangan sepanjang hari sehingga secara rata-rata dalam satu tahun akan lebih tinggi konsumsi gasnya dibandingkan negara-negara yang menganut dua musim seperti Indonesia. Inilah yang menjadi tantangan atau hambatan utama terkait lambatnya laju pemanfaatan gas bumi di sektor rumah tangga. Perusahaan Gas Negara (PGN) atau perusahaan distribusi gas bumi lainnya menyadari akan hal ini. Bagi mereka yang berorientasi profit, hal ini tidak menarik karena waktu pengembalian modalnya akan sangat lama. Hal inilah yang menghalangi atau mengurangi minat investor, baik lokal maupun internasional, untuk menanamkan investasinya.

SOLUSI

Untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi, maka mutlak diperlukan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi yang handal. Jaringan handal dapat menghubungkan gas bumi dari sumbernya dengan daerah/pasar yang membutuhkannya. Saat ini, kecenderungan dalam pembangunan jaringan pipa transmisi gas bumi adalah sependek mungkin jarak yang dibuat untuk menghubungkan sumber gas bumi dan lokasi pasarnya. Hal ini dapat dimaklumi karena bertujuan untuk meminimalisasikan biaya investasi. Sebenarnya, akan lebih bermanfaat apabila jaringan pipa transmisi yang dibangun diusahakan melalui sebanyak-banyaknya kota, meskipun akan membutuhkan biaya investasi untuk material dan penambahan peralatan *compressor* untuk menjaga tekanan yang akan

dialirkan ke konsumen. Dengan demikian, setiap kota akan terlayani oleh pasokan gas bumi. Bila jumlah gas bumi dari sumbernya suatu saat tidak mencukupi atau *short-fall*, maka akan lebih mudah dan cepat dengan membangun LNG *Receiving Terminal* di dekat pusat sumber gas bumi daripada membangun jaringan pipa transmisi dari sumber-sumber gas lain yang jaraknya teramat jauh, apalagi harus melewati laut. Pertimbangan dalam pemilihan LNG *Receiving Terminal* dikarenakan karena LNG dapat diperoleh dari banyak tempat, baik di dalam maupun di luar negeri.

Penggunaan jaringan gas bumi untuk rumah tangga pascakonstruksi menggunakan pola kerja sama Pemerintah dan badan usaha dengan Penetapan Status Penggunaan (PSP).

Dasar hukum kerja sama Pemerintah dan badan usaha adalah Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur. Untuk penetapan status penggunaan, landasan hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006.

Pembangunan infrastruktur jaringan pipa gas kota bukanlah perkara mudah. Selain keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintah, diperlukan pula koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar tidak terjadi tumpang tindih serta memberikan pemahaman masyarakat untuk mengalihkan penggunaan bahan bakar ke gas. Akibat keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintah, maka pihak swasta diharapkan dapat lebih berperan dalam kegiatan ini.

Tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi yang turut membantu penerapan jaringan gas untuk rumah tangga. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB) Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), Kementerian ESDM, misalnya, memperkenalkan salah satu karya penelitian dan pengembangan berupa kompor beserta tabung Absorbed Natural Gas (ANG) dan Dymetil Ether (DME) untuk rumah tangga. Teknologi ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif untuk konversi pemakaian BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk rumah tangga.

Meski memiliki keterbatasan dana, Pemerintah berencana untuk tetap melanjutkan pembangunan pipa jaringan distribusi gas untuk rumah tangga berdasarkan road map yang sudah ada. Sebab, program ini memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun negara. Pemerintah berharap, berjalannya Program Jaringan Gas Kota ini dapat membuat pemerintah daerah lebih mandiri dari sisi energi dan masyarakat mendapatkan kemudahan mengakses energi yang lebih murah, bersih, dan aman.





SOSIALISASI DAN PENGAWASAN

Jaringan gas untuk rumah tangga tak terlepas dari sosialisasi dan pengawasan agar penerapannya lebih optimal. Hal ini dilakukan oleh Kementerian ESDM, salah satunya, via video conference dengan tiga kota, yakni Surabaya, Palembang, dan Tarakan. Kegiatan berupa rapat kerja ini diselenggarakan dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan pengaliran gas, kendala yang dihadapi daerah sehingga mendapatkan masukan, tukar pendapat dan saran dari pihak-pihak terkait. Acara *video conference* tersebut juga memberi kesempatan bagi warga di tiga kota untuk terlibat tanya jawab.





BAB 04

NILAI LEBIH

PEMBANGUNAN JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA

MURAH

Produk	Unit	BTU/ Unit Gross	Rp/Unit	Rp/BTU	Rp/MMBTU
Gas Bumi	M3	35.336	2.226	0,063	63.000
Minyak Tanah	Liter	36.191	2.500	0,069	69.078
Elpiji	Kg	46.825	4.250	0,091	90.763

1 US\$ = Rp. 9000

Tabel di atas menunjukkan perbandingan nilai kalori (BTU) minyak tanah, LPG, dan gas bumi. Terlihat bahwa rupiah yang dikeluarkan oleh konsumen rumah tangga per mmbtu-nya dengan program konversi minyak tanah ke LPG naik menjadi 30%, sedangkan seandainya beralih dari minyak tanah ke gas bumi menjadi turun hampir sekitar 10% dengan asumsi harga gas bumi untuk rumah tangga adalah US\$7 per mmbtu (kurs 1 dollar US\$ sama dengan Rp9.000). Apabila beralihnya dari elpiji ke gas bumi, maka biaya yang dikeluarkan

per mmbtu-nya akan turun menjadi 30%. Dengan demikian, dari sisi konsumen atau pemakai akan lebih menguntungkan menggunakan gas bumi dibandingkan LPG atau minyak tanah walaupun keduanya masih disubsidi. Apalagi, seandainya konversi minyak tanah ke LPG dicabut subsidiya, maka jelas gas bumi akan sangat kompetitif alias jauh lebih murah.

Manfaat mudahnya menggunakan gas untuk rumah tangga terdiri atas dua macam, yaitu manfaat nyata (*tangible*) dan tidak nyata (*intangible*). Ilustrasinya bisa dilihat seperti di bawah ini:

- a. Penghematan beralih ke gas bumi dari bahan bakar semula (minyak tanah atau LPG) ke gas bumi dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Untuk 1 m}^3 \text{ gas bumi} &= \text{harga mitan ekuivalen} - \text{harga gas bumi} \\
 &= \text{Rp 10.625} - \text{Rp 2.615} \\
 &= \text{Rp 8.010}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk } 1 \text{ m}^3 \text{ gas bumi} &= \text{harga LPG ekuivalen} - \text{harga gas bumi} \\ &= \text{Rp3.3,75} - \text{Rp2.615} \\ &= \text{Rp760} \end{aligned}$$

Untuk perhitungan *benefit* dari penghematan biaya, digunakan harga rata-rata dari kedua jenis bahan bakar di atas, yaitu sebesar Rp4.385/m³ gas bumi.

- b. Peningkatan penjualan gas bumi untuk rumah tangga sebagai bagian dari program diversifikasi dan konservasi energi sehingga tercapai fuel security of supply melalui energy mix yang proporsional secara bertahap. Dalam rapat dengar pendapat antara Pertamina dan Komisi VII DPR RI, terkuak Pertamina harus menanggung biaya produksi LPG per kilogram sebesar Rp8.275. Sementara itu, Pertamina harus menjual LPG ke pasaran dengan harga Rp4.912/kg. Artinya,

Pertamina harus menanggung kerugian sebesar Rp3.363/kg sehingga peningkatan penjualan gas bumi mengurangi beban Pertamina sebesar Rp2.523 untuk penggunaan 1 m³ gas bumi.

- b. Penghapusan uang jasa untuk membayar kurir yang membaca tabung isi ulang atau dirigen minyak tanah dari rumah konsumen ke distributor/agen/pangkalan LPG/minyak tanah. Hal ini diasumsikan penghematan sebesar Rp250 untuk setiap penggunaan 1 m³ gas bumi.
- c. Pengurangan subsidi dari minyak tanah ke gas bumi adalah Rp3.068/liter dan pengurangan subsidi dari gas bumi ke LPG adalah Rp3.235/

kg (blue print program pengalihan minyak tanah ke LPG). Perhitungan pengurangan subsidi rata-rata adalah $(1.25 * \text{Rp3.068} + 0.75 * \text{Rp3.235}) / 2 = \text{Rp3.131}$.

- d. Peningkatan kesejahteraan rakyat (kesra) adalah uang yang dapat dihemat jika beralih ke energi gas bumi, dihitung berdasarkan statistik rata-rata pengeluaran energi dikurangi dengan besarnya biaya jika menggunakan gas bumi atau selisih antara biaya rata-rata semula dikurangi dengan biaya rata-rata pemakaian energi. Nilai rata-rata statistik yang digunakan adalah Rp11.500/bulan, yaitu selisih besarnya biaya energi per bulan dengan tarif energi gas bumi per bulan sebesar Rp40.000 (data hasil survei pembangunan jaringan gas di rumah susun Jabodetabek).

Peniadaan biaya simpan (efisien tata niaga), biaya distribusi



(termasuk *handling*) dan margin badan usaha (beta) untuk LPG tabung ukurang 3 kg di 2010 akan menjadi Rp1.797,30 per kg. Biaya sebesar Rp1.797,30/kg ini terdiri atas komponen biaya simpan Rp497,73/kg, sarana prasarana distribusi (tabung) Rp103,51/kg, biaya distirbusi Rp905,06/kg, dan margin badan usaha Rp292/kg

Salah satu komponen biaya yang tidak diperlukan dalam gas pipa adalah tempat penyimpanan. Untuk penggunaan 1 m³ gas bumi, akan menghemat biaya penyimpanan sebesar $0,75 \times \text{Rp}497,73 = \text{Rp}373$.

Dalam analisis, nilai benefit yang diperhitungkan adalah nilai pengurangan subsidi, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peniadaan biaya simpan. Pertimbangannya–dari

sisi Pemerintah, nilai investasi, dan biaya simpan–harus sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh. Dari sudut pandang konsumen, beralih ke gas bumi akan dapat menghemat sejumlah uang yang merupakan selisih anggaran belanja energi karena beralih ke gas bumi.

Berdasarkan identifikasi dan analisis di atas, maka besaran benefit yang akan digunakan dalam perhitungan adalah pengurangan subsidi sebesar Rp3.131 untuk setiap pemakaian 1 m³ gas bumi. Benefit kesra dihitung sebesar Rp11.500 untuk 1 rumah tangga per bulan. Lalu, besarnya biaya simpan adalah Rp373 untuk setiap pemakaian 1 m³ gas bumi.

AMAN

Berdasarkan standarisasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan gas bumi, Kementerian ESDM bahwa standar desain untuk saringan pipa memiliki daya tahan perpipaan minimal 20 tahun. Diameter pipa yang dipergunakan adalah 6", 4", 10 mm, 125 mm, dan 90 mm.

PIPA CS Pipa Carbon Steel Diameter 4"

PIPA PE standar yang digunakan untuk pipa PE adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) 13-3507-1994 Konstruksi Sistem Pipa Polyethiline untuk gas bumi, kecuali ditetapkan oleh Dirjen Migas.

Tekanan maksimum pada suatu sistem distribusi di perkotaan pada umumnya memiliki batas maksimum 7 bar, meskipun dalam aktualisasi

Penentuan Jenis Material Pipa Berdasarkan Tingkat Tekanan Gas Bumi

Tingkat Tekanan	Kisaran Operasi	Material Pipa
Rendah	0–100 mbar	<i>Poliethilen (PE)</i>
Sedang	100 mbar–4 bar	Baja Carbon (<i>Carbon Steel/CS</i>) atau PE
Tinggi	4–40 bar	CS

pengoperasian sebagian besar dari sistem tidak dioperasikan pada kisaran tepat tekanan tersebut.

Dengan demikian, sistem tekanan rendah akan diaplikasi untuk pelayanan konsumen rumah tangga. Tekanan pada titik-titik cluster atau penyerahan akan diatur sedemikian rupa untuk tetap berada di bawah tekanan maksimum 50 mbar dan di atas 23,2 mbar (rekomendasi dari PGN tekanan rata-rata 30 mbar).

Kondisi ini dimaksudkan untuk tetap menjaga pasokan gas tetap konsisten serta berada dalam kondisi aman untuk meminimalisasikan kemungkinan terjadinya kebocoran. Dengan mempertimbangkan inisiasi biaya yang ditimbulkan serta perhitungan faktor keamanan yang lebih ketat, masih dimungkinkan untuk pengoperasian gas pada tekanan lebih tinggi.

Tekanan merupakan variabel yang relatif mudah untuk dipantau. Caranya dengan menentukan setting

operasi dari regulator. Maka, untuk mempertahankan kondisi seperti di atas akan lebih mudah jika regulator menggunakan sistem otomatis (self-operating) yang akan mengatur laju alir dan menjaga tekanan operasi pada kisaran setting point-nya. Kalkulasi secara detil akan dilakukan dengan menggunakan bantuan software khusus untuk aliran gas.

Pada basis perpipaan distribusi tekanan menengah yang bertekanan 4 bar atau lebih menggunakan material pipa besi baja (CS). Selanjutnya, pada perpipaan jaringan distribusi untuk gas bertekanan sedang dan rendah yang menggunakan material pipa polyethylene (PE), jaringan distribusi gas tekanan menengah (MPDS) ke arah pembangunan akan ditanam di dalam tanah. Rencananya, menggunakan pipa polyethylene MDPE dan dioperasikan pada tekanan 4 bar sampai dengan 100 mbar.

Jaringan distribusi tekanan rendah (LDPS) di tempat pembangunan terdiri atas jaringan pipa distribusi Polyethylene MDPE. Ini merupakan pipa service yang menjadi penghubung antara jaringan pipa distribusi tekanan rendah dan metering konsumen yang dioperasikan pada tekanan maksimum 100 mbar. Selanjutnya, metering gas bumi dialirkan ke kompor dengan menggunakan material pipa galvise dengan tekanan operasi maksimum 20–23 mbar.

Pemilihan material pipa didasarkan atas segi keamanan dan keekonomiannya. Hal ini berdasarkan pada regulasi yang berlaku, seperti SNI atau standar Internasional lainnya. Untuk itu, dipilih pipa MDPE-80 SDR 11 dengan pertimbangan secara umum adalah sebagai berikut:

a. Pipa MDPE cocok untuk tekanan di bawah 4 bar, dipasang di bawah tanah dan tidak perlu dilindungi dari proses korosi. Maka, tidak

perlu adanya *material wrapping* dan *cathodic protection*.

- b. Mempunyai berat jenis lebih ringan dibandingkan dengan pipa dari *carbon steel* sehingga lebih ringan dan memudahkan pengangkutan serta pemasangan di lapangan. Akibatnya, waktu pemasangan lebih cepat.
- c. Kekurangannya adalah pipa tidak boleh dipasang di atas tanah atau di dalam tanah dengan temperatur sekeliling tidak lebih dari 40°C.
- d. Dari segi biaya awal lebih murah dibandingkan dengan pipa *carbon steel*.

Perlindungan terhadap pipa baja:

1. Pembalutan (coating)

- a. Pembalutan (*coating*) dengan menggunakan koal tar yang menggunakan secara mekanik oleh pabrik atau di lapangan. Sebelum pembalutan, pipa harus bersih dari kotoran.

- b. Pembalutan (*coating*) dengan menggunakan *coating tape* yang terdiri atas dua macam, yaitu *inner wrap* dan *outer wrap*. Sebelum dibalut, pipa dibersihkan dari kotoran dan diberi primer coating. Selanjutnya, pipa dibalut dengan lapisan pertama, yaitu *inner wrap* dan lapisan kedua *outer wrap*.

2. **Catodic Protection**

Untuk perlindungan pipa dengan cara proteksi katodik ini dilakukan dengan anode karbon (*sacrifical anode*).

Metering and Regulating System (MR/S)

MR/S diperuntukkan untuk mengatur dan mengukur volume gas yang keluar dari sistem. MR/S sebagai stasiun pengukuran dan pengaturan tekanan gas bumi diperlukan untuk memastikan bahwa aliran gas didistribusikan pada

jumlah (debit) dan tekanan tertentu. Hal ini harus memenuhi persyaratan terhadap tekanan yang masuk. Tekanan ini bisa bervariasi antara nilai maksimum dan minimumnya. Tekanan masuk minimum yang diperlukan dan kapasitas yang diperlukan akan berpengaruh terhadap penentuan ukuran dari *fitting*. Maka, tekanan menjadi parameter yang penting dalam perancangan stasiun pengatur. MR/S memiliki persyaratan spesifikasi kerja sebagai berikut:

1. MR/S harus sesuai dengan tekanan desain dan mempunyai tingkat akurasi lebih baik dari 1% volume.
2. MR/S harus sesuai dengan gambar desain dan mempunyai proses komposisi gas sesuai dengan yang diinginkan.
3. MR/S harus dirancang untuk dapat mengatasi kandungan kontaminan dari gas.

Selain itu, pada umumnya MR/S memiliki konfigurasi sebagai berikut:

1. *Stream* pada stasiun pengatur tekanan harus dilengkapi dengan fasilitas aliran cadangan (*stand by*) yang mempunyai kapasitas dan desain keseluruhan sama dengan aliran utama.
2. Tersedia *by pass meter* sehingga unit meter dapat dipindahkan dari jalur utama tanpa menghentikan aliran pasokan gas
3. Semua sambungan perpipaan dirancang dengan *velocity* maksimum 20 meter/detik untuk gas sebelum filter dan 40 meter/detik untuk gas sesudah filter pada kondisi sama. Persyaratan ini tidak berlaku untuk *tube meter* dan *valve regulator*. Pada keduanya berlaku spesifikasi sesuai dengan desain pembuat.
4. Sambungan pada aliran gas masuk dan keluar harus dipasang insulating joint untuk mengisolasi secara proteksi katodik. *Insulating joint* ini disegel oleh pabrik

- pembuat sebanyak dua unit.
5. *Valve* darurat harus dapat bergerak/ beroperasi dengan cepat kurang dari satu detik untuk mendeteksi kelebihan tekanan di hulu. Semua *valve* harus dilengkapi dengan sarana mekanis untuk membuka dan terlindung dari penutupan tidak sengaja karena getaran mesin.
 6. *Gas filter* dirancang dan dibuat sesuai dengan standar ASME VIII atau BS5500 atau yang sejenis.

Elemen dari filter mempunyai *pressure drop* tidak lebih dari 0,1 bar dengan ukuran saringan 50 mikron. Pada aliran utama di dalam filter dilengkapi dengan kunci pengaman dan penutup untuk mencegah terlepasnya filter akibat tekanan.

7. *Meter turbine* harus merupakan turbin dengan tipe aliran penuh dan sesuai dengan standar pencatatan aliran gas yang diakui. Selain itu, *tube meter* didesain

husus, indeks meter integral, dan dilengkapi peralatan koreksi aliran terus-menerus sesuai dengan tekanan serta temperatur standar yang dipersyaratkan. Semua meter dan korektor harus dikalibrasi dan disahkan oleh Kementerian Perindustrian.

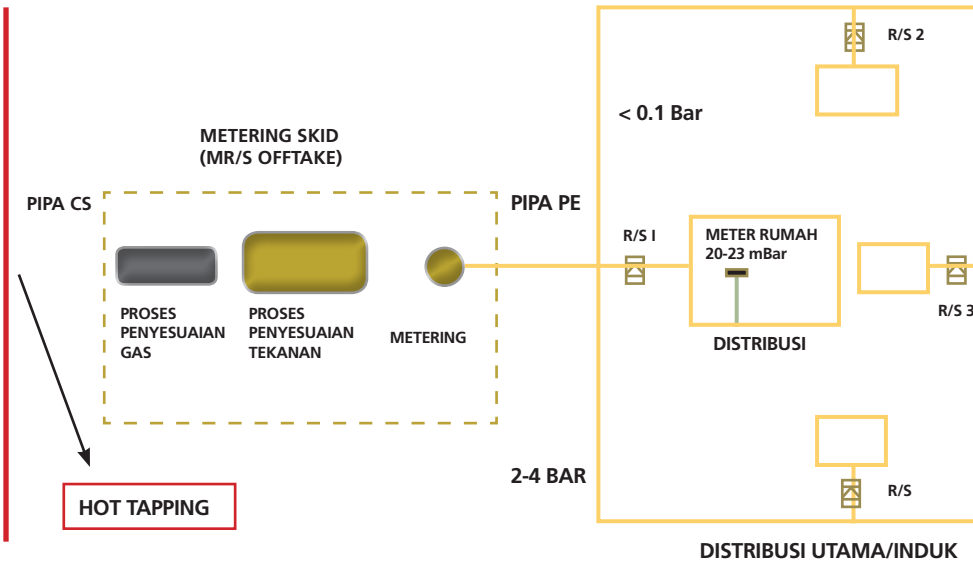
8. *Valve* pengatur tekanan harus ada di dalam konfigurasi kendali monitor/aktif dengan ketepatan pengendalian keluar lebih baik daripada 5% dari tekanan *setting* dalam semua kondisi.
9. Masing-masing pengatur tekanan (*regulator*) harus dilengkapi dengan *relief valve* untuk pelepasan ke atmosfer. Di antara *valve regulator* aktif dan *check valve* yang diukur untuk melepas tidak lebih daripada 1% dari kapasitas aliran *regulator*.
10. *Check valve* harus bertipe “*wafer*” dan mampu menahan tekanan balik sebesar 10 bar untuk item 1–4 dan 15 bar untuk item 5 dan mempunyai *differential pressure* tidak melebihi 0,1 bar.



Gambar di bawah memperlihatkan diagram alir proses (PFD) dari MR/S. Setiap lintasan proses memiliki komponen utama: filter (1), *shut-off* (2), regulator (3), dan *relief valve* (4).

ATURAN PENENTUAN TEKANAN

PIPA TRANSMISI



Pipa utama membaca gas dari MR/S ke MR/S *take-off* dalam kondisi HPDS. Tekanan diturunkan di MR/S *take-off* dan gas mengalir dalam pipa distribusi pada kondisi MDPS. Kemudian, dari kondisi MPDS, tekanan diturunkan kembali menjadi LPDS dengan menggunakan regulator sektor. *Valve* dipasang sepanjang sistem distribusi untuk memungkinkan pembagian dan konfigurasi ulang jaringan untuk pemeliharaan serta pengembangan. Beberapa jenis *valve* berfungsi untuk mencegah tekanan berlebihan dan aliran balik. *Valve* dapat dioperasikan secara otomatis, dengan *remote*, atau manual tergantung dari filosofi tingkat tekanan dan pengoperasiannya.

Regulator digunakan untuk mengendalikan tekanan dari bagian tertentu sistem distribusi. Jika tekanan hulu (*upstream*) dari regulator station menjadi lebih rendah daripada tekanan hilir (*downstream*) yang telah di-*setting*, maka *regulator* akan membuka

penuh. Dengan demikian, *regulator station* akan melindungi sistem distribusi hilir dari kelebihan tekanan yang mungkin dapat terjadi. Hal ini terutama dilakukan oleh *regulator* itu sendiri. Tapi, jika alat tersebut gagal, maka alat tambahan, seperti *shut-off valve* dan *relief valve*, digunakan untuk merendahkan tekanan hilir (*downstream*).

Dari PFD MR/S ini, kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan simulasi proses dengan memakai *simulator procces* HYSYS.

Untuk P & ID MR/S sendiri, ada empat bagian penting yang ada di dalamnya, yaitu:

a. Inlet section

Terdapat intrument *insulating joint* (IJ) dan *pressure gauge inlet*. *Insulating joint* (IJ), intinya pada section ini, yaitu sebagai *inlet gas* dan untuk melindungi sistem MR/S dari beda potensial yang

ditimbulkan dari pipa sebelum masuk ke sistem MR/S dengan pipa sistem MR/S.

b. Regulating section

Pada *regulating section*, instrumen-instrumen yang terlibat antara lain *ball valve*, *filter*, *regulator* (*active* dan *monitor*), *relief valve*, dan *check valve*. *Regulating section* ini digunakan untuk mengatur tekanan gas sesuai dengan desain dan menyaring gas dari kotoran-kotoran. Pada bagian ini, dapat dilengkapi oleh *scrubber* jika kandungan air dalam gas lebih dari 5 lb/MMSCFD dan filter secara bersamaan. Namun, dalam kondisi gas bumi telah diproses dan komposisi gas tidak mengandung air yang melebihi batas yang dipersyaratkan, maka cukup dipasang dengan filter. Filter berfungsi untuk memisahkan kandungan pengotor dari aliran gas bumi.

c. Matering section

Pada bagian ini, volume gas diukur dengan mengetahui seberapa banyak gas yang akan digunakan. Bagian ini terdiri atas *ball valve*, *straighening vane*, *turbine meter*, *volume corrector*, *pressure indicator*, dan *temperature indicator*.

d. Outlet section

Pada *outlet section*, komponen instrumen dan fungsinya hampir sama dengan *inlet section*.



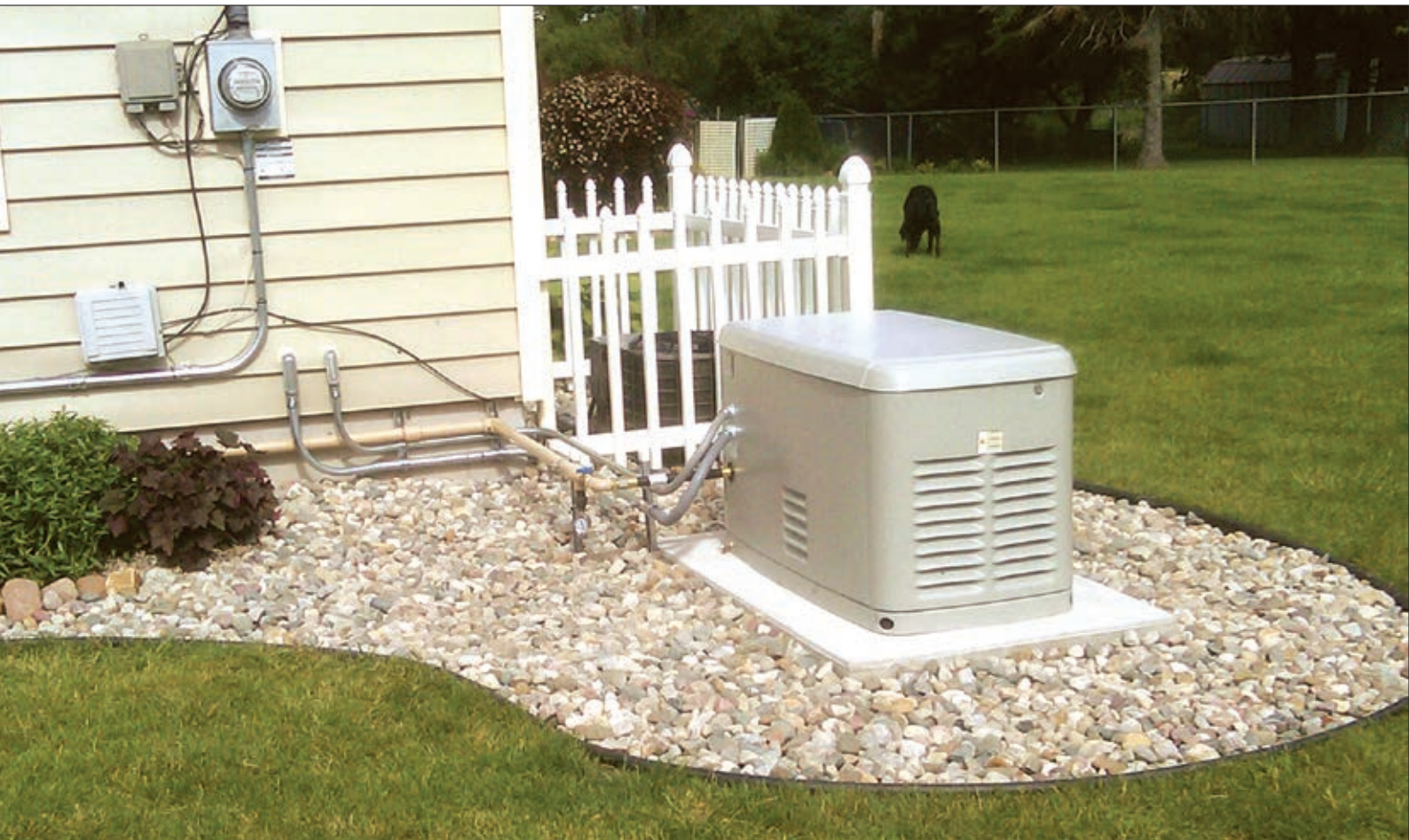
RAMAH LINGKUNGAN

Pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga juga ramah lingkungan. Terlebih, jaringan gas untuk rumah tangga bisa menjadi pendukung terhadap program-program lingkungan yang dijalankan oleh Pemerintah.

Gas bumi yang bersifat ramah lingkungan bisa dilihat dari, misalnya, pengurangan emisi karbon dioksida (CO₂) hasil pembakaran. Pengurangan emisi CO₂ dari minyak tanah ke gas bumi adalah 1,139 kg untuk penggunaan 1 m³ gas bumi atau 56%. Pengurangan emisi CO₂ dari LPG ke gas bumi adalah 0,218 kg untuk penggunaan 1 m³ gas bumi atau 11%. Jika kebijakan konversi dari minyak tanah ke gas diterapkan, maka emisi CO₂ akan berkurang sebesar 0,15 %.

Selain itu, gas bumi sebagai bahan bakar lebih bersih karena tidak mengeluarkan banyak asap dan tidak meninggalkan jelaga.







BAB 05

PEMANFAATAN GAS ALAM UNTUK RUMAH TANGGA DI SEJUMLAH NEGARA

PEMBANGUNAN JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA

Selain Indonesia, sejumlah negara juga memanfaatkan gas bumi untuk keperluan rumah tangga. Sebagian negara telah memulainya jauh sebelum Indonesia. Sebagian lain baru akan memulainya.

Salah satu negara dengan cadangan gas alam terbesar di dunia adalah Amerika Serikat (AS). Sebagian besar sistem pipa gas alam di AS dibangun pada tahun 1930-an dan 1940-an. Sistem pipa gas alam di AS adalah sistem yang kompleks. Kompleksnya jaringan pipa di negara itu karena digunakan untuk keperluan domestik, ekspor, dan juga impor. Di seluruh negara ini, terdapat lebih dari 210 sistem pipa dengan total panjang lebih dari 305 ribu mil (488 ribu km).

Gas alam adalah salah satu bahan bakar yang paling populer untuk pemanasan perumahan di negeri Paman Sam ini. Sekitar 62 juta rumah di AS dipanaskan menggunakan gas alam. Pada 2009, angka ini mewakili sekitar 56% rumah tangga di AS. Di daerah-daerah dingin AS, gas alam dimanfaatkan sebagai sumber energi pemanas ruangan untuk 24,8 juta rumah (2009). Untuk memanaskan air, gas alam telah berkontribusi pada 23,7 juta rumah.

Dari total gas alam yang dikonsumsi di AS, sekitar 23% digunakan untuk keperluan perumahan. Popularitas gas alam juga ditunjukkan melalui tingginya proporsi rumah baru yang dibangun dengan pemanasan gas alam. Data tahun 2010 menunjukkan, 54% rumah keluarga baru AS menggunakan gas alam untuk pemanasan, diikuti oleh 43% yang menggunakan listrik, 1% memakai minyak bumi, dan 2% dengan sumber energi lain.

Data tahun 2012 menunjukkan, jumlah konsumsi gas alam oleh perumahan di AS mencapai 4.148.970 juta kaki kubik. Konsumen gas alam juga meningkat. Tahun 2012, jumlah konsumen gas alam untuk residensial di AS tercatat 66.624.457. Angka ini meningkat dibanding tahun 2011 yang mencapai 65.940.522.

Selain pemanasan rumah, gas alam di AS juga dimanfaatkan sebagai pendingin ruangan. *Air Conditioning* (AC) gas alam

bukan hal baru di AS. Dengan kemajuan teknologi, AC gas memiliki masa kerja hingga 20 tahun dengan sangat sedikit pemeliharaan. Peralatan lainnya yang telah menggunakan gas alam di AS antara lain pengering pakaian, kolam renang, *jacuzzi*, perapian, pemanggang *barbeque*, dan lampu. Semua peralatan ini menawarkan alternatif yang aman, efisien, dan ekonomis. Pembuatan instalasinya pun sederhana dan mudah. Dari berbagai peralatan di atas, pemanas ruangan dan air adalah dua gadget yang paling banyak menggunakan gas alam.

Semua gas di Inggris melewati sistem transmisi National Grid National dalam perjalanannya ke konsumen. National Grid Gas plc (National Grid Gas) adalah anak perusahaan dari National Grid plc yang berbasis di Inggris. National Grid Gas bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain untuk memastikan ketersediaan gas.

Ada empat elemen utama dalam industri gas Inggris. Pertama adalah produksi dan impor. Gas berasal dari lapangan lepas pantai di utara dan laut Irlandia, Belgia, dan Belanda melalui tiga pipa interconnector dan impor dalam bentuk gas alam cair (LNG). Kedua ialah transmisi. National Grid Gas adalah satu-satunya pemilik dan operator infrastruktur transmisi gas di Inggris. Ketiga distribusi. Ada delapan jaringan distribusi regional di Inggris, empat dimiliki oleh National Grid Gas dan empat oleh perusahaan lain. Terakhir adalah pasokan. Gas dikirim ke tempat konsumen melalui pipa milik jaringan distribusi lokal. Jaringan gas yang dimiliki National Grid Gas sendiri mampu menggapai 10,9 juta konsumen.

Namun, National Grid Gas tidak memproduksi gas untuk pasar Inggris. Lalu, siapa yang membayar dan untuk apa? Produsen gas dan importir menjual gas kepada pengirim berlisensi.

Pengiriman melibatkan pembelian gas dari produsen. Pengirim membayar National Grid Gas untuk menjalankan gas melalui jaringan transmisi nasional. Importir LNG membayar untuk hak atas tanah LNG di terminal impor National Grid Gas. Pengirim juga membayar Grid Nasional dan operator jaringan distribusi gas lain untuk mengangkut gas ke rumah dan bisnis. Biaya ini diteruskan kepada konsumen dan mencerminkan biaya pembangunan, pemeliharaan, dan operasi jaringan.

Beralih ke Afrika. Sektor gas alam di Mesir berkembang pesat dengan produksi lebih dari dua kali lipat sejak 2003. Gas alam merupakan komponen utama dalam ketahanan energi dalam negeri Mesir. Gas di negara itu berperan penting dalam menggerakkan industri petrokimia, pupuk, dan juga listrik. Selain untuk keperluan domestik, Mesir juga mengekspor gas ke berbagai negara. Jumlah ekspor gasnya mencapai 18,3 miliar m³ (bcm) di tahun 2009,

dengan jumlah Liquefied Natural Gas (LNG) sebanyak 12,8 bcm.

Perusahaan milik Pemerintah mengendalikan pasar minyak dan gas bumi di Mesir. Perusahaan minyak milik Pemerintah Mesir Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) didirikan pada tahun 1957 untuk mengelola kepentingan minyak pemerintah dan melakukan eksplorasi. EGPC mengendalikan berbagai kegiatan di sektor minyak bumi meliputi perizinan, eksplorasi, produksi, penyulingan, transportasi, dan pemasaran.

Pada tahun 2001, Pemerintah Mesir mendirikan Egyptian National Gas Holding Company (EGAS) untuk mendorong investasi, mengelola transmisi, sistem distribusi, memperluas jaringan serta berpartisipasi dalam eksplorasi, khususnya melalui pemberian konsesi. Kemudian, Mesir mengembangkan jaringan pipa ekspor dan proyek LNG secara individu

atau dengan mitra nasional dan internasional.

Cadangan gas alam *proven* Mesir sendiri naik menuju rekor 2.161 bcm per 30 Juni 2009. Sekitar 81% dari cadangan ini terletak di daerah Mediterania, diikuti oleh Gurun Barat (11%), Teluk Suez (6%), dan Delta Nil (2%). Cadangan gas terbukti di Mesir melonjak sebesar 5% per tahun sejak 2003. Sementara itu, cadangan gas Mesir yang belum terbukti diperkirakan mencapai 3.360 bcm. Di Mesir, produksi gas yang dipasarkan diperkirakan mencapai 62,9 bcm pada tahun 2009, naik 6,3% dari tahun 2008. Pasokan gas ini digunakan untuk sejumlah sektor.

Untuk sektor perumahan dan komersial, ada sekitar 2,4 juta pelanggan terhubung ke sistem gas di Mesir pada tahun 2008. Mayoritas rumah tangga perumahan di Delta Nil terus menggunakan LPG untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Dalam

rangka untuk mengurangi subsidi LPG (sebagian konsumsi LPG harus diimpor), Pemerintah Mesir telah menargetkan untuk memiliki total enam juta rumah tangga terhubung ke jaringan gas di tahun 2012.

Satu negara raksasa lainnya di bidang gas bumi adalah Cina. Pertumbuhan pemanfaatan gas alam untuk residensial juga terlihat di negeri Tirai Bambu ini. Sebelum 2009, konsumsi gas didominasi untuk industri minyak dan kimia di negara ini. Seiring pemasangan jaringan pipa raksasa, bauran energi tahun 2009 di Cina berubah drastis.

Pemanfaatan gas kota meningkat menjadi 43%. Di akhir tahun 2009, Cina telah membangun jaringan pipa sepanjang 38 ribu km dengan kapasitas hampir 90 miliar kubik meter per hari (bcm). Pada 2000, total konsumsi gas alam untuk residensial adalah 3,2 bcm. Pada 2007, jumlahnya meningkat hingga 13,3 bcm. Artinya, meningkat 22% per tahun.

Sekitar satu dekade ke depan, Cina diharapkan dapat menambah jaringan pipa gas sepanjang 25 ribu km. Diperkirakan, pemanfaatan gas alam untuk residensial di Cina pada 2020 akan naik menjadi 64 bcm. Pada 2030, meningkat lagi hingga 105,4 bcm. Hal ini terkait dengan kemungkinan bertambahnya jumlah produksi gas alam di Cina.

International Energy Agency (IEA) memperkirakan jumlah kota-kota di Cina yang dilewati jaringan distribusi gas berjumlah di atas 140 pada tahun 2005. Pada 2010, angka ini diperkirakan naik menjadi 270 kota. Sementara itu, jumlah penduduk perkotaan dengan akses ke gas naik lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu 2001 hingga 2005. Pada 2001, diperkirakan 32 juta penduduk Cina memiliki akses ke gas alam. Angka ini meningkat menjadi 71 juta jiwa di tahun 2005.

Salah satu negara di Asia lainnya yang mencanangkan proyek besar gas alam untuk rumah tangga adalah India. Pada 2017 nanti, India menargetkan memiliki jaringan pipa gas alam sepanjang 30 ribu km. Saat ini, India telah memiliki jaringan gas negara sepanjang 12 ribu km. Sepanjang 12 ribu km lainnya masih dalam tahap pembangunan.

Panjang pipa 30 ribu km itu berkapasitas 875 juta standar meter kubik per hari. Saat ini, pipa gas di India memiliki kapasitas untuk mengangkut 230 juta standar meter kubik per hari. Di India, sudah 51 kota tercakup dalam Distribusi Gas Kota. Sebagian pipa gas alam itu digunakan untuk memasak. Rencananya, Distribusi Gas Kota di India akan menjangkau lebih dari 300 wilayah. Untuk memenuhi ekspansi besar di pasar gas, India juga mengejar pipa gas transnasional, seperti jaringan pipa 1.800 km yang menghubungkan Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, dan India (TAPI).

Salah satu negara tetangga Indonesia, yakni Malaysia, juga telah menjalankan program gas kota (*city gas*). Malaysia adalah eksportir terbesar kedua di dunia gas alam cair setelah Qatar pada tahun 2012. Malaysia memiliki 83 triliun kaki kubik (Tcf) cadangan gas alam terbukti pada Januari 2013, terbesar ketiga di kawasan Asia-Pasifik.

Sistematika distribusi gas kota di Malaysia melibatkan berbagai pihak dan tahapan hingga sampai di konsumen. Secara garis besar, pasokan gas alam Malaysia bersumber dari perusahaan energi Pemerintah Malaysia Petronas. Melalui pipa Peninsular Gas Utilization (PGU), gas mengalir ke Stasiun City Gate. Proyek PGU yang dimulai pada tahun 1984 adalah terpanjang di Malaysia yang membentang lebih dari 2.500 km.

Setiap Stasiun City Gate, utamanya, terdapat stasiun odoriser yang menyuntikkan bau ke gas alam sebagai bagian dari persyaratan keselamatan.

Dari sini, gas alam didistribusikan melalui feeder line ke District Station. Dari sini, dialirkan lagi ke Service Station, Regulating Station, dan Area Station. Setelah tekanan disesuaikan, gas dikirim ke sistem perpipaan internal pelanggan.

Meski bersumber dari Petronas, perusahaan ini bukan pemasok gas ke konsumen. Di Malaysia, ada berbagai pemasok gas. Pemasok terbesar gas di Malaysia adalah Gas Malaysia Berhad. Pada Juli 2005, perusahaan ini memiliki 452 pelanggan industri, lebih dari 600 pelanggan komersial, dan lebih dari 3.000 pelanggan perumahan. Pada Februari 2011, Gas Malaysia Berhad memiliki 33.707 pelanggan perumahan dan komersial serta 691 pelanggan industri. Pada tahun 2010, total gas yang dijual oleh Gas Malaysia adalah 117.800.000 British thermal unit di seluruh Semenanjung Malaysia. Pada Februari 2011, jaringan pipa gas perusahaan mencapai 1.726,6 km (1.072,9 mil).

Secara keseluruhan, pemanfaatan gas untuk rumah tangga di Malaysia tumbuh pesat. Jumlah rumah tangga yang memanfaatkan jaringan gas di Malaysia pada tahun 2012 adalah 11.392. Angka ini hampir 300% lebih besar daripada tahun 2004. Panjang jaringan pipa gas alam pun melonjak tajam. Pada tahun 2012, panjang pipa gas di Malaysia adalah sekitar 2.600 km.

Year	Number of Consumers Residential
2004	4239
2005	4805
2006	6679
2007	8887
2008	7032
2009	7960
2010	10433
2011	10541
2012	11392

Semenanjung

Year	Pipe Length (km) Total Length (km)
1993	9
1994	19
1995	207
1996	283
1997	335
1998	348
1999	422
2000	455
2001	508
2002	603
2003	689
2004	1,023
2005	1,169
2006	1,403
2007	1,485
2008	1,522
2009	1,686
2010	1,708
2011	1,791.47
2012	1,818.05

Sabah dan Labuan

Year	Pipe Length (km) Total Length (km)
1993	0
1994	0
1995	0
1996	2.4
1997	2.4
1998	2.4
1999	2.4
2000	2.4
2001	2.4
2002	4.5
2003	4.5
2004	5.06
2005	5.98
2006	5.98
2007	6.43
2008	7.8
2009	7.8
2010	7.8
2011	7.861
2012	8.018







BAB 06

TESTIMONI

PEMBANGUNAN JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA



“Menurut saya, harga sebanding. Kalau pakai tabung, habis dua tabung ukuran 15 kg sebulan. Jadi sama saja. Justru pengguna lebih enak dan aman. Jadi menurut saya, program ini sangat bagus. Selain di warung, di rumah juga pakai. Di rumah, pemakaian cuma untuk masak air, beban bulanan rata-rata Rp26.000,” kata pemilik rumah makan Minang Maimbau di Beji, Depok, Jawa Barat yang bernama Yahya.

“Pemakaian gas bumi Rp48.000 sampai Rp52.000. Kalau lagi ngirit, pakai dua tabung gas dalam sebulan. Kalau lagi masak banyak, pakai tiga tabung. Sebenarnya, hampir sama. Tetapi, lebih enak pakai gas alam karena lebih aman,” kata warga Depok Aminah.



“Berarti, nanti nggak masak pakai tungku dan kayu bakar lagi,” kata seorang warga Desa Cidahu, Subang, Oman.

“Penggunaan gas alam yang langsung melalui saluran lebih praktis. Kalau pakai tabung gas biasanya lagi masak tiba-tiba bisa habis. Akan repot jika habisnya pada waktu tengah malam,” kata warga Beji, Depok Dewi Lestari.





“Jika pakai gas itu, saya tidak perlu capek nenteng tabung gas ke warung,” kata warga Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Depok Nya Suwandi.

“Untuk keluarga yang pas-pasan seperti kami, selisih biaya Rp10.000 (antara gas alam yang lebih murah daripada LPG dalam sebulan) tentu sangat berarti. Uang itu bisa disisihkan untuk keperluan dapur,” kata seorang ibu, Ati.



“Sementara dengan pemakaian 20–25 meter kubik gas alam, saya hanya membayar Rp25.000–Rp30.000 per bulan (dibandingkan dengan biaya pemakaian minyak tanah Rp75 ribu). Jelas, ini sangat mengurangi beban keuangan keluarga untuk membeli bahan bakar setiap bulan,” kata seorang warga Palembang Fitri.

“Pemakaian gas aman, saya tidak takut. Saya sebelumnya menggunakan LPG 3 kg. Empat buah per bulan dengan harga satu tabung 3 kg, Rp20.000 hingga Rp21.000. Adanya gas bumi ini sangat membantu. Proses masakinya juga sama dengan menggunakan LPG, tidak ada masalah,” kata seorang warga Prabumulih Sri Uliati.





“Kalau kita memasang jaringan gas bumi melalui program city gas, gratis. Kalau pasang sendiri harus mengeluarkan uang sendiri,” ungkap warga Sidoarjo, Nasik.

“Kalau pakai tabung kan takut ada yang bocor, sementara kalau pakai peralatan city gas, cukup menggunakan keran penutup dan pembuka gas yang terpasang di meteran dan di sambungan ke kompornya,” imbuh seorang ibu rumah tangga bernama Nani di Cirebon.



“Sekarang ini kan susah cari elpiji, kadang suka telat di agennya,” terang seorang warga bernama Nurdin dari Cirebon.





“Meski saat ini kami belum bisa membayarnya, gas alam lebih bagus. Selain aman juga tidak menimbulkan bau dan bisa bebas menggunakannya karena belum ada kendala sampai saat ini,” kata seorang warga Bontang bernama Suroso.

“Gas alam lebih gampang, dan kami dimudahkan karena tidak perlu mengganti tabung. Juga bebas menggunakannya,” ujar warga Bontang bernama Hajra.

“Dengan gas alam, pengeluaran dana untuk bahan bakar hanya sekitar Rp23.000 per bulan. Sangat murah dibandingkan menggunakan elpiji setidaknya butuh Rp85.000 per bulan atau satu tabung isi 12 kg,” kata seorang warga bernama Ibu Sariah asal Palembang.





BAB 07



RANGKUMAN BERITA

PEMBANGUNAN JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA

2008

EMPAT LOKASI DISIAPKAN UNTUK PROYEK GAS KOTA 2009

Senin, 1 Deseember 2008

Jakarta -BPH Migas menyiapkan empat kota sebagai pengembangan proyek gas kota di 2009. Keempat kota ini adalah Depok, Palembang, Bekasi dan Surabaya.

Demikian disampaikan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VII di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (1/12/2008).

“Tahun depan gas kota kita coba lakukan di Depok, Palembang, Bekasi, dan Surabaya,” katanya.

Gas kota merupakan penggunaan gas bumi untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Gas bumi ini disalurkan melalui pipa ke beberapa rumah yang berada dalam suatu kota.

Proyek gas kota ini sudah ada di beberapa daerah seperti Jakarta dan Palembang. Penggunaan gas kota diharapkan bisa menekan konsumsi minyak tanah dalam rumah tangga.

“Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mulai, tahun ini memang belum (diperluas) karena masih kajian,” katanya.

Selain gas kota yang dimaksudkan untuk menekan konsumsi minyak tanah di rumah tangga, pemerintah juga sempat berencana menerapkan smart card untuk menekan konsumsi premium dan solar.

Namun hingga kini BPH Migas belum bisa memastikan apakah smart card akan jadi diterapkan atau tidak di 2009. Hal

ini karena disparitas harga yang kecil bisa menekan kemungkinan penyelewengan BBM subsidi.

“Belum bisa dipastikan, kita lihat situasi. Penurunan harga keekonomian dan subsidi tidak jauh, kita harap dengan disparitas harga yang kecil tidak ada penyalahgunaan. Kalaupun terjadi relatif kecil. Tapi tetap akan kita ajukan bulan Januari melalui ESDM,” katanya.

(lih/ir)

<http://finance.detik.com/read/2008/12/01/135003/1045903/4/empat-lokasi-disiapkan-untuk-proyek-gas-kota-2009>

GAS KOTA SIAP BEROPERASI DI DEPOK & BEKASI

Senin, 1 Desember 2008

Pengoperasian gas kota ini, pemerintah menggunakan dana APBN 2009.

VIVAnews - Pemerintah menjanjikan pada 2009 mendatang akan mengalirkan gas ke empat kota. Pengaliran gas yang sering disebut sebagai gas kota itu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Tubagus Haryono mengatakan, keempat kota tersebut

yaitu Palembang, Depok, Bekasi, dan Surabaya. "Tahun depan instalasi gas keempat kota tersebut sudah bisa digunakan," ujar Tubagus usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin 1 Desember 2008.

Tubagus mengatakan, untuk pengoperasian gas kota ini, pemerintah akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009.

Program gas kota bertujuan agar masyarakat mendapatkan energi dengan harga murah dan ramah lingkungan. Seperti yang telah dirintis PT Perusahaan Gas Negara, masyarakat membayar gas 50-60 persen lebih murah daripada menggunakan gas elpiji tabung.

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/12873-gas_kota_siap_beroperasi_di_depok__bekasi

2009

JARINGAN GAS KOTA DIBANGUN DI BEKASI, DEPOK DAN TARAKAN TAHUN DEPAN

Selasa, 24 Februari 2009

Tahun 2010 mendatang, pemerintah akan membangun jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga di tiga kota yaitu Bekasi, Depok dan Tarakan (Kaltim).

Selain itu, akan dilakukan Front End Engineering Design (FEED) dan Design Engineering & Design Construction (DEDC) jaringan gas bumi untuk rumah tangga di rumah susun Jabodetabek dan di Propinsi Jambi.

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam penjelasannya kepada Komisi VII DPR mengemukakan, untuk

tahun 2009, pembangunan jaringan distribusi gas bumi akan dilaksanakan di Kelurahan Lorok Pakjo dan Siring Agung di Kota Palembang yang akan mengaliri 4200 rumah serta Kelurahan Rungkut Kidul dan Kalirungkut di Kota Surabaya yang akan mengaliri 3200 rumah. Pembangunan dilaksanakan pemerintah melalui anggaran Ditjen DIPA Ditjen Migas tahun 2009.

Tahun ini juga akan dilakukan FEED dan DEDC jaringan gas kota untuk 9 kota hasil kajian BPH Migas tahun 2008 yaitu Tarakan, Bontang, Samarinda, Balikpapan, Sorong, Lhokseumawe,

Jambi, Prabumulih dan Semarang. Tahun lalu, pemerintah telah melakukan FEED dan DEDC di 6 kota yaitu Bekasi, Depok, Surabaya, Blora, Medan dan Palembang.

Gas kota bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri sekaligus menggantikan peran minyak tanah dan elpiji.

<http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigas/detail/1250/Jaringan-Gas-Kota-Dibangun-di-Bekasi,-Depok-dan-Tarakan-Tahun-Depan>

Jaringan Gas di Palembang dan Surabaya Selesai Dibangun Akhir Tahun

Senin, 2 Maret 2009

Jika semuanya berjalan sesuai rencana, pada akhir tahun ini pembangunan jaringan gas kota akan selesai dibangun di Palembang dan Surabaya.

Saat ini, menurut Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H. Legowo, pemerintah sedang menunggu kepastian pasokan gas secara tertulis dari BPMIGAS.

“Sebetulnya secara lisan sudah (ada pasokannya), namun kita tunggu tertulisnya,” kata Evita.

Segera setelah kepastian pasokan gas secara tertulis diterima, lanjut Evita, pemerintah akan segera melakukan tender untuk membangun jaringan gas tersebut.

Untuk tahun ini, jaringan gas kota akan dibangun di Kelurahan Lorok Pakjo

dan Siring Agung di Kota Palembang yang akan mengalir 4200 rumah serta Kelurahan Rungkut Kidul dan Kalirungkut di Kota Surabaya yang akan mengalir 3200 rumah. Pembangunan dilaksanakan pemerintah melalui anggaran Ditjen DIPA Ditjen Migas tahun 2009.

Pada tahun 2009 ini juga akan dilakukan Front End Engineering Design (FEED) dan Design Engineering & Design Construction (DEDC) untuk 9 kota yaitu Tarakan, Bontang, Samarinda, Balikpapan, Sorong, Lhokseumawe, Jambi, Prabumulih dan Semarang. Tahun lalu, pemerintah telah melakukan FEED dan DEDC di 6 kota yaitu Bekasi, Depok, Surabaya, Blora, Medan dan Palembang.

Sementara untuk tahun 2010 mendatang, pemerintah akan membangun jaringan distribusi gas bumi

untuk rumah tangga di tiga kota yaitu Bekasi, Depok dan Tarakan (Kaltim) serta melakukan FEED dan DEDC jaringan gas bumi untuk rumah tangga di rumah susun Jabodetabek dan di Propinsi Jambi.

<http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigas/detail/1258/Jaringan-Gas-di-Palembang-dan-Surabaya-Selesai-Dibangun-Akhir-Tahun>

2009

MoU Gas Kota Ditandatangani Pekan Depan

Rabu, 18 Maret 2009

Jika tidak ada perubahan, Senin (23/3) mendatang akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman pasokan gas bumi untuk rumah tangga di Palembang dan Surabaya. Penandatanganan akan dilakukan di Auditorium Departemen ESDM serta dihadiri Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro.

Penandatanganan ini terkait dengan program pemerintah membangun infrastruktur gas untuk rumah tangga, sebagai upaya meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri dan mempercepat diversifikasi energi.

Untuk Palembang, jaringan gas kota akan di bangun di Kelurahan Lorok Pakjo dan Siring Agung yang akan mengaliri 4.200 rumah. Sedangkan di Surabaya. Jaringan gas kota akan mengaliri 3.200 rumah di Kelurahan Rungkut Kidul dan Kalirungkut.

Pasokan gas untuk Palembang berasal dari PT Medco E&P, sedangkan untuk Surabaya dipasok oleh PT Lapindo Brantas. Kebutuhan gas untuk Palembang sekitar 1 MMSCFD, sedangkan Surabaya sedikit lebih kecil.

“Diharapkan pada akhir tahun ini pembangunan jaringan gas kota

di Palembang dan Surabaya selesai dilakukan,” ujar Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H. Legowo.

Sementara untuk 2010 mendatang, jaringan gas kota akan dibangun di 3 kota yaitu Bekasi, Depok dan Tarakan serta melakukan Front End Engineering Design (FEED) dan Design Engineering & Design Construction (DEDC) rumah tangga di rumah susun Jabodetabek dan di Propinsi Jambi.

<http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigas/ detail/1284/MoU-Gas-Kota-Ditandatangani-Pekan-Depan>

Operator Gas Kota Ditentukan September

Senin, 23 Maret 2009

Pemerintah akan menentukan operator untuk jaringan distribusi gas di Palembang dan Surabaya pada September mendatang.

Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H. Legowo, dalam jumpa pers usai penandatanganan nota kesepahaman pasokan gas untuk rumah tangga di Palembang dan Surabaya, Senin (23/3), mengatakan, ada 2 opsi penentuan operator jaringan gas yang dibangun pemerintah yaitu dihibahkan langsung ke pemerintah daerah atau dilelang untuk swasta, namun kepemilikan jaringan gas tetap berada di tangan pemerintah.

“Untuk hibah, harus ada BUMD yang mengelolanya dengan dibimbing PGN. Sedangkan jika tender, kepemilikan tetap pada pemerintah, swasta hanya mendapat fee operatorshipsaja,” kata Evita.

Direktur Utama PT PGN Hendi Prio Santoso menambahkan, pihaknya telah mempersiapkan anak perusahaan untuk membantu bila perusahaan daerah memerlukan mitra untuk mengoperasikan jaringan distribusi gas.

“Kita akan membantu sampai bisa mandiri. Setelah bisa, akan dilepas,” ucap Hendi.

Sementara itu mengenai penandatanganan perjanjian jual beli gas (PJBG) antara KKKS dengan operator, akan dilakukan sekitar bulan Desember. Untuk Palembang, volume gas yang disepakati sebesar 1 MMSCFD dengan harga US\$ 3 per MMBTU. Jangka waktu kontrak disesuaikan dengan jangka waktu kontrak Wilayah Kerja South and Central Sumatera. Sedangkan Surabaya, volume gasnya sekitar 2 MMSCFD dengan harga US\$ 5 per MMBTU.

Jangka waktu kontrak jual beli 5 tahun.

“Volume gas yang tersedia di Surabaya lebih besar dari kebutuhan, jadi bisa dipakai untuk lainnya,” kata Evita.

Harga tersebut hanya sampai wellhead (titik serah). Harga untuk rumah tangga, akan ditentukan kemudian oleh BPH Migas. Namun demikian pemerintah tetap menjamin, harga gas untuk rumah tangga relatif murah. Sebagai gambaran, rata-rata rumah tangga hanya membayar sekitar Rp 30.000 tiap bulan untuk pemakaian gasnya atau 30% jika dibanding menggunakan elpiji.

<http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigas-an/detail/1291/Operator-Gas-Kota-Ditentukan-September>

2009

Pemerintah Gandeng Medco dan Lapindo Pasok Gas RT

Senin, 23 Maret 2009

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah gandeng Medco E&P Indonesia dan Lapindo Brantas Inc bekerja sama memasok gas bumi untuk sekitar 7.400 rumah tangga di Kota Palembang dan Surabaya.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama dilakukan di Gedung Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin (23/3), disaksikan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Dirjen Migas ESDM Evita Legowo, Kepala BP Migas R Priyono, dan Kepala BPH Tubagus Haryono.

Kesepakatan itu kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) PT Medco memasok gas hingga 1 MMSCFD (juta kaki kubik) untuk 4.200 rumah tangga, dan Lapindo Brantas memasok 2 juta kaki kubik untuk 3.200 rumah tangga di Surabaya.

Dirjen Migas Evita Legowo mengatakan,

penyediaan jaringan distribusi gas di dua kota tersebut dibangun dengan dana anggaran DIPA Ditjen Migas tahun 2009, yang diharapkan mulai mengalir Desember tahun ini. "Program penyediaan gas untuk rumah tangga kota menjadi prioritas nasional tahun 2009 yang sudah disusun hingga sampai dengan tahun 2014," katanya.

la menjelaskan, untuk tahun 2010, pemerintah akan membangun jaringan gas kota di Bekasi, Depok, Tarakan (Kalimantan Timur), serta di rumah susun Jabodetabek dan Jambi.

la menjelaskan, pasokan gas rumah tangga di sejumlah wilayah tidak hanya dilakukan di daerah penghasil gas, tetapi juga wilayah yang dilalui jaringan transmisi pipa gas. "Program pasokan gas untuk rumah tangga ini merupakan yang pertama difasilitasi anggaran APBN," tegas

Evita.

Menurutnya, program ini sudah sesuai peraturan, seperti UU Migas No 22 Tahun 2001, termasuk telah mendapat persetujuan dari DPR.

Sementara itu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, kerja sama penyediaan gas kota ini untuk memenuhi kebutuhan energi gas bumi secara mandiri dan mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) khususnya mintak tanah. "Bisa saja program kerja sama pasokan gas rumah tangga ini disebut sebagai bagian dari domestic market obligation (DMO) gas karena di dalamnya tidak ada unsur paksaan," kata Purnomo.

Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, sejak tujuh tahun lalu, pasokan untuk gas rumah tangga sudah mulai dilakukan. Namun, jumlahnya masih

sangat terbatas. “Kami berharap kerja sama ini tidak sekadar pilot project, tetapi dapat memenuhi lebih dari 50 persen masyarakat Palembang dapat menikmati gas rumah tangga,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Bambang DH menjelaskan, jaringan gas di wilayah itu sudah ada. Namun, umumnya dipasok kepada industri dan perusahaan jasa seperti perhotelan. “Kalau pasokan gas untuk rumah tangga dapat terwujud maka masyarakat akan diuntungkan karena harga penggunaan per bulan sangat murah,” kata Bambang.

<http://lipsus.kompas.com/grammyawards/read/2009/03/23/14072343/Pemerintah.Gandeng.Medco.dan.Lapindo.Pasok.Gas.RT>

Jaringan Gas Akan Dibangun di 18 Kota

Selasa, 24 Maret 2009

Hingga 2014 mendatang, pemerintah akan membangun jaringan distribusi gas untuk rumah tangga di 18 kota. Pembangunannya dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran.

Untuk tahap pertama, papar Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H. Legowo, jaringan distribusi gas dibangun di Palembang dan Surabaya. Untuk 2010, jaringan gas akan dibangun di Bekasi, Depok, Tarakan (Kaltim) dan Sengkang (Sulawesi Selatan) dan tahun 2011 akan dibangun di rumah susun Jabodetabek, Propinsi Jambi dan Makassar (Sulawesi Selatan).

Jaringan distribusi gas di Bangkalan (Madura), Balikpapan (Kaltim) dan Semarang (Jateng) akan dibangun di 2012. Tahun selanjutnya akan dibangun di Sorong (Papua), Pekanbaru (Riau) dan Subang (Jabar). Terakhir pada 2014, jaringan distribusi gas dibangun di Samarinda (Kaltim), Muara Enim dan Lampung.

Pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga ini disambut hangat pemerintah daerah. Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengemukakan, jaringan gas kota sangat membantu masyarakat karena biaya bahan bakar untuk memasak relatif murah, hanya sekitar Rp 30.000 per bulan. Ia berharap, pembangunan jaringan distribusi gas ini dapat diteruskan agar lebih dari 50% masyarakat Palembang dapat menikmati gas yang murah dan bersih.

Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono menambahkan, jaringan distribusi gas di Surabaya sudah lama ada. Namun selama ini lebih diperuntukan bagi industri dan hotel. Dengan pembangunan jaringan distribusi gas ini, katanya, masyarakat akan merasakan manfaatnya.

<http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigas/detail/1292/Jaringan-Gas-Akan-Dibangun-di-18-Kota>

2009

Pengelolaan Jaringan Distribusi Gas Bumi Pasca Konstruksi Dibahas

Selasa, 12 Mei 2009

Jakarta. Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibiayai APBN di Palembang dan Surabaya telah memasuki tahap konstruksi. Pemerintah saat ini sedang membahas pengelolaan jaringan gas kota tersebut pasca konstruksi.

Pembahasan pengelolaan jaringan distribusi dihadiri wakil instansi terkait seperti BPKP, Bappenas, Ditjen Kekayaan Negara Depkeu, BPH Migas dan Itjen Departemen ESDM. Pertemuan dipimpin Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H. Legowo yang didampingi oleh Sesditjen Migas Rida Mulyana dan Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Edy Hermantoro, Senin (11/5) petang.

Dari masukan beberapa instansi terkait, semula terdapat 5 alternatif pengelolaan yaitu hibah, penyertaan modal pemerintah, badan layanan umum (BLU), kerja sama

pemerintah dan badan usaha dan penetapan status penggunaan (PSP). Namun setelah dibahas lebih mendalam, pilihan alternatif pengelolaan mengerucut menjadi dua yaitu kerja sama pemerintah dan badan usaha dan penetapan status penggunaan.

Dasar hukum opsi kerja sama pemerintah dan badan usaha adalah Peraturan Presiden No 67 tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sedangkan untuk opsi penetapan status penggunaan, landasan hukumnya adalah Peraturan pemerintah No 6 tahun 2006.

Rapat akan dilanjutkan pekan depan untuk memberi kesempatan pada peserta mempelajari opsi mana yang paling tepat.

Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga ini, baru pertama kalinya dibangun oleh pemerintah.

Pembangunan jaringan belum dapat dilakukan swasta karena terkait dengan alasan keekonomian.

Tahun ini, pembangunan jaringan distribusi gas dibangun di Palembang dan Surabaya. Untuk Palembang, jaringan dibangun di kelurahan Lorok Pakjo dan Siring Agung serta mengaliri 4.200 rumah tangga. Sedangkan jaringan distribusi gas di Surabaya akan dibangun di kelurahan Rungkut Kidul dan Kali Rungkut, mengaliri 3.200 rumah tangga.

Pembangunan jaringan distribusi gas dibangun bertahap karena keterbatasan anggaran. Tahun 2010, jaringan distribusi gas untuk rumah tangga rencananya akan dibangun di Bekasi, Depok, Tarakan dan Sidoarjo.

<http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigas/detail/1353/Pengelolaan-Jaringan-Distribusi-Gas-Bumi-Pasca-Konstruksi-Dibahas>

Pengelolaan Gas Kota Berbentuk KSP

Jumat, 28 Mei 2009

Pemerintah memutuskan pengelolaan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga berbentuk kerja sama pemerintah dalam hal status penggunaan.

Bentuk kerja sama ini, jelas Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H. Legowo pada seminar mengenai peluang dan tantangan bisnis gas kota yang diselenggarakan FWESDM, Kamis (28/5), didasarkan pada masukan instansi terkait seperti BPKP, Departemen Keuangan dan Bappenas.

“Dalam waktu dekat kami akan segera mengajukan ijin ke Menkeu terkait pengelolaan ini,” ujar Evita.

Dasar hukum kerja sama pemerintah dengan badan usaha adalah Peraturan Presiden No 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan

No 96/PMK 06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Sebelumnya, penyaluran gas bumi untuk sektor rumah tangga baru dilakukan PT PGN di distrik Jakarta, Banten, Bekasi, Bogor, Cirebon, Palembang, Surabaya-Gresik, Sidoarjo-Mojokerto dan Medan.

Untuk tahun ini, pemerintah akan membangun jaringan distribusi gas untuk rumah tangga di Surabaya dan Palembang. Untuk Surabaya, jaringan dibangun di Kelurahan Kalirungkut dan Rungkut Kidul yang akan mengaliri 3.200 rumah tangga. Sedangkan Palembang, jaringan dibangun di Kelurahan Lorok Pakjo dan Siring Agung untuk 4.200 rumah tangga.

Saat ini, pembangunan telah mencapai

tahap persiapan konstruksi. Diharapkan akhir tahun ini pembangunan sudah dapat diselesaikan, demikian pula penandatanganan perjanjian jual beli gas (PJBG) dengan PT Medco E&P Indonesia untuk kawasan Palembang dan Lapindo Brantas, Inc untuk Surabaya.

Pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga dilakukan bertahap karena keterbatasan dana dari pemerintah. Diharapkan pada masa mendatang, swasta dapat berperan serta.

“Awalnya jaringan distribusi dibangun pemerintah. Untuk perluasan, diharapkan dapat dilakukan oleh swasta,” kata Evita.

Pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga, bukan perkara mudah. Selain terkendala dana yang terbatas, perlunya koordinasi dengan daerah dan instansi terkait, kurangnya

2009

pemahaman masyarakat untuk penggunaan gas pipa dan perlunya tata ruang atau ruas jalur pipa yang cukup aman terhadap lingkungan, merupakan tantangan lain yang dihadapi.

Khusus mengenai tantangan koordinasi dengan daerah dan instansi terkait, kata Evita, dialami dalam pembangunan jaringan di Surabaya, di mana PT PGN telah memiliki jaringan pipa di kawasan yang sama untuk konsumennya.

“Ini membuat pemerintah harus bekerja sama dengan Pemda dan PGN agar tidak terjadi tumpang tindih,” imbuhnya.

<http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigas/detail/1375/Pengelolaan-Gas-Kota-Berbentuk-KSP>

Diusulkan Subsidi Gas Untuk Rumah Tangga

Kamis, 28 Mei 2009

Untuk mendorong pelaksanaan program gas kota, diusulkan adanya subsidi gas bumi untuk rumah tangga.

Usulan disampaikan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono dalam seminar mengenai peluang dan tantangan bisnis gas kota di Hotel Borobudur, Kamis (28/5).

Menurut Tubagus, subsidi memungkinkan pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan, sementara masyarakat tetap dapat membeli gas dengan murah.

“Selisih antara harga keekonomian dengan harga subsidi ditanggung oleh pemerintah,” katanya.

Harga gas bumi untuk rumah tangga yang berlaku saat ini masih di bawah harga keekonomiannya, tidak menarik bagi pelaku usaha. Untuk mengembangkan gas kota, dibutuhkan biaya tidak sedikit.

Sebagai contoh, untuk 1.000 pelanggan rumah tangga dibutuhkan investasi sebesar Rp 4,83 miliar atau Rp 4,83 juta per rumah tangga.

Harga keekonomian gas bumi untuk rumah tangga dengan tingkat keuntungan (IRR) sebesar 12%, berkisar antara US\$ 11,34-12,38 per MMBTU, tergantung dari harga beli gas bumi dari produsen. Atau dengan kata lain, besar biaya distribusi gas bumi untuk rumah tangga berkisar antara US\$ 9,34-9,38 per MMBTU.

Akibat tingginya biaya tersebut, tak mengherankan bila sampai saat ini pemakaian gas bumi sebagai bahan bakar rumah tangga baru mencapai sekitar 2 MMSCFD.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPMIGAS Abdul Muin mengemukakan, jarak antara sumber

BPH Lakukan Kajian Gas Kota di 9 Wilayah

Senin, 01 Juni 2009

pasokan dengan jaringan gas kota dapat menjadi kendala dalam keekonomian proyek. BPMIGAS akan memberikan prioritas pasokan gas untuk gas kota di wilayah yang dekat dengan fasilitas hulu yang tersedia, misalnya Palembang, Kalimantan Timur dan Surabaya.

Abdul Muin juga menekankan perlunya kajian yang komprehensif dari hulu hingga hilir agar proyek pengembangan gas kota dapat diimplementasikan secara ekonomis dan mempunyai jaminan kelangsungan pasokan selama pengoperasiannya.

<http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigas/detail/1376/Diusulkan-Subsidi-Gas-Untuk-Rumah-Tangga>

Untuk meningkatkan pemakaian gas bumi sebagai bahan bakar rumah tangga, BPH Migas melakukan kajian gas kotapada beberapa kota yang dipandang memungkinkan untuk dijadikan sebagai kota gas. Tahun ini, rencananya akan dilakukan kajian di 9 kota yaitu Muara Enim, Cilegon, Bojonegoro, Bangkalan, Tenggarong, Pekabaru, Bandar Lampung dan Subang.

Kepala BPH Migas Tubagus Haryono dalam seminar mengenai gas kota, mengemukakan, pemilihan kota yang dijadikan obyek kajian dengan pertimbangan kota-kota tersebut terletak tidak jauh dari sumber produksi gas bumi atau pipa transmisi dan distribusi gas bumi existing.

Hingga saat ini, telah dilakukan kajian di 10 kota yaitu Bloram Lhokseumawe, Prabumulih, Semarang, Jambi, Samarinda,

Tarakan, Balikpapan, Bontang dan Sorong.

Tubagus mengemukakan, penggunaan gas bumi melalui pipa lebih murah dibandingkan menggunakan bahan bakar fosil. Sebagai gambaran, harga rata-rata gas bumi untuk rumah tangga pada 1 Februari 2009 sebesar US\$ 6,6 MMBTU, sementara harga minyak tanah bersubsidi di pasaran dapat mencapai harga Rp 5.500 per liter atau setara US\$ 12,2 per MMBTU. Sedangkan harga minyak tanah bersubsidi yang ditetapkan pemerintah masih dalam kisaran Rp 2.500 per liter.

“Penggunaan gas bumi dapat mengurangi subsidi yang dikeluarkan pemerintah,” kata Tubagus.

Sayangnya, pengembangan gas bukan perkara mudah sebab biaya untuk pembangunan infrastruktur sangat mahal.

2009

Contohnya, untuk 1.000 pelanggan rumah tangga dibutuhkan investasi sebesar Rp 4,83 miliar atau Rp 4,83 juta per rumah tangga.

Harga keekonomian gas bumi untuk rumah tangga dengan tingkat keuntungan atau IRR sebesar 12% berkisar antara US\$ 11,34 per MMBTU sampai dengan US\$ 12,38 per MMBTU, tergantung dari harga beli gas bumi atau dengan produsen. Dengan kata lain, besar biaya distribusi gas bumi untuk rumah tangga berkisar antara US\$ 9,34 per MMBTU sampai US\$ 9,38 per MMBTU.

<http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigasas/detail/1379/BPH-Lakukan-Kajian-Gas-Kota-di-9-Wilayah>

Agustus, Lelang Pengelolaan Gas Kota

Jumat, 05 Juni 2009

Palembang. Pembangunan jaringan distribusi gas kota di Palembang kini telah memasuki tahap survei ulang dan pengadaan barang. Diharapkan pada Agustus atau September mendatang, dapat dilakukan lelang pengelolaan jaringan tersebut.

Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H. Legowo di Palembang, kemarin, mengemukakan, pemerintah membuka kesempatan bagi badan usaha termasuk bahan usaha milik daerah (BUMD) untuk berpartisipasi dalam lelang itu.

Lelang akan dilakukan setelah mendapat surat ijin dari Menteri Keuangan terkait dengan mekanisme pengelolaan jaringan distribusi yang telah diputuskan berbentuk kerja sama pemerintah (KSP) yaitu penetapan status penggunaan yang dilandasi ketentuan hukum PP No 06 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Walikota Palembang Eddy Santana menyambut baik lelang tersebut dan akan mendorong badan usaha di daerah agar dapat turut berpartisipasi.

Dikatakan Eddy, pembangunan jaringan pipa untuk rumah tangga di Palembang telah dilakukan sejak 8 tahun lalu. Sayangnya, tidak banyak kepala keluarga yang dapat menikmati fasilitas ini yaitu hanya sekitar 1,5%.

“Baru 1,5% dari seluruh kepala keluarga di 16 kecamatan yang terlayani,” katanya.

Ia mengharapkan pembangunan jaringan distribusi gas kota di Palembang tidak hanya menjadi pilot project, tetapi dikembangkan lebih lanjut.

<http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigas/detail/1387/Agustus,-Lelang-Pengelolaan-Gas-Kota>

Warga Gembira Pemerintah Bangun Jargas

Senin, 08 Juni 2009

Jakarta. Pembangunan jaringan distribusi gas kota oleh pemerintah disambut gembira masyarakat Palembang. Dengan menggunakan gas kota, masyarakat berharap dapat menghemat pengeluaran.

Demikian benang merah kunjungan kerja Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro yang didampingi Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H. Legowo dan Kepala BPMIGAS di Kota Palembang, akhir pekan lalu.

Dalam tanya jawab dengan masyarakat di Kelurahan Lorok Pakjo dan Siring Agung, masyarakat berharap agar pembangunan jaringan distribusi gas dapat dipercepat sehingga gas segera mengalir ke rumah-rumah.

Ada pula yang mengharapkan agar pemerintah memberikan keringanan

untuk pemasangan instalasi ke rumah-rumah yang besarnya sekitar Rp 1 juta.

“Kalau boleh biaya pemasangan alatnya bisa dicicil 3-4 kali, Pak,” kata seorang warga.

Dalam kunjungannya ke Palembang, Menteri ESDM dan rombongan juga mendatangi rumah warga yang belum dan telah menggunakan gas kota, pabrik mie instan PT Indofood dan pabrik biskuit PT Interbis.

M. Toha yang belum menggunakan gas kota menuturkan, dalam sebulannya ia membeli LPG tabung ukuran 12 kg sebanyak 3 kali atau sekitar Rp 225 ribu. Pedagang makanan ini telah berhitung, jika menggunakan gas kota maka pengeluarannya untuk bahan bakar kurang dari Rp 100 ribu.

2009

Sedangkan untuk pabrik mie instan, dengan menggunakan gas kota, maka penghematannya dapat mencapai 54% dibanding menggunakan solar.

Menurut Antony Kamaludin, GM PT Indofood Palembang, perusahaannya menggunakan gas sejak 2002 yang jumlahnya terus bertambah. Tahun 2002, konsumsi gas mencapai 4.181 ton m3, sementara tahun 2008 mencapai 6.318 ton m3.

<http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigas/detail/1388/Warga-Gembira-Pemerintah-Bangun-Jargas>

Pemkot Bontang Harap Dialiri Gas Kota

Selasa, 23 Juni 2009

Pemerintah Kota Bontang berharap seluruh pelosok kotanya dapat dibangun jaringan distribusi gas kota. Untuk mendukung keterbatasan dana pemerintah pusat, pemkot akan mengusahakan dana dari pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Wakil Walikota Bontang Syahid Dairomi dalam pertemuan dengan Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H. Legowo, kemarin.

Menurut Syahid, jika pemerintah hanya membangun jaringan distribusi gas kota untuk 2 kelurahan saja, dikhawatirkan dapat menimbulkan kecemburuan masyarakat.

“Kalau cuma dibangun di 2 kelurahan saja, kami khawatir akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Jika

memang Bontang sudah masuk dalam perencanaan pemerintah menjadi kota gas, kami akan berusaha membantu melalui dana APBD,” katanya.

Syahid mengemukakan, pemerintah tidak perlu membangun instalasi sampai ke rumah-rumah penduduk, agar jaringan distribusi yang dibangun dapat lebih luas. Jika disetujui pemerintah daerah, instalasi ke rumah akan dibangun melalui dana dari daerah.

Terhadap keinginan tersebut, Evita mengemukakan hal itu dapat dibicarakan lebih lanjut. Pembangunan jaringan distribusi sampai dengan instalasi ke rumah-rumah seperti yang dilakukan di Palembang dan Surabaya, dimaksudkan agar masyarakat dapat langsung menikmati gas kota tanpa harus mengeluarkan uang.

“Tapi kalau pemda mau membangun instalasi ke rumah-rumah agar jaringan distribusi gas yang dibangun dapat lebih luas, dapat kita bicarakan lagi. Tapi perlu diingat, kami harus bersikap adil. Jadi jika Bontang jadi dibangun jaringan gas, maka besaran biayanya harus sama dengan daerah lain dan karena keterbatasan biaya, tidak seluruh kota dapat dibangun jaringan,” ujar Evita.

Berdasarkan roadmap pembentukan gas kota, akan dilakukan Front End Engineering Design (FEED) dan Detail Engineering Design for Construction (DEDC) di Kota Bontang pada tahun 2010 dan pembangunan jaringan distribusi pada 2011. Pasokan gas sebesar 2 MMSCFD direncanakan berasal dari KKKS yang berlokasi di sekitar wilayah tersebut.

Target pembangunan infrastruktur kota gas direncanakan meliputi 2 kelurahan yaitu Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara sebanyak 6.163 KK dan kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara sebanyak 8.352 KK.

<http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigas/detail/1401/Pemkot-Bontang-Harap-Dialiri-Gas-Kota>

Disusun, Pedoman Pengelolaan Jaringan Distribusi Gas Kota

Selasa, 28 Juli 2009

Jakarta.

Pemerintah tengah menggodok Keputusan Menteri ESDM tentang pedoman pelaksanaan penunjukan badan usaha dalam pengoperasian jaringan distribusi gas untuk rumah tangga yang pembangunannya dibiayai APBN. Diharapkan pada Agustus mendatang, aturan ini sudah dapat diselesaikan.

Sekretaris Ditjen Migas Rida Mulyana menjelaskan, aturan yang masih dibahas internal dengan instansi terkait ini, disusun untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan badan usaha dalam pengoperasian jaringan distribusi gas.

2009

Sebelum ditetapkan nantinya, pemerintah akan mengundang stakeholder untuk memberikan masukan terhadap aturan ini.

Hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut, antara lain penetapan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dilakukan oleh Menteri ESDM. Jaringan distribusi gas untuk rumah tangga ini ditawarkan kepada badan usaha melalui mekanisme lelang.

Badan usaha yang diijinkan menjadi peserta lelang terdiri dari BUMN, BUMD, koperasi, usaha kecil dan badan usaha swasta. Peserta harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Setelah badan usaha pemenang lelang terpilih, lanjut Rida, Menteri ESDM akan mengusulkan ke Menteri Keuangan untuk menyetujuinya. Hal ini perlu dilakukan karena jaringan distribusi gas merupakan aset negara. Setelah Menkeu menyetujui, barulah

penandatanganan kontrak jual beli gas antara pengelola dan pemasok dapat dilakukan.

Mekanisme pengelolaan jaringan distribusi gas ditetapkan berbentuk PSP (Penetapan Status Penggunaan) yang dilandasi ketentuan hukum PP No 06 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Untuk tahun 2009, pemerintah membangun jaringan gas di Palembang dan Surabaya yang disekitarnya terdapat sumber gas. Pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Kelurahan Lorok Pakjo dan Siring Agung dipasok dari PT Medco E&P Indonesiasebesar 1 MMSCFD dalam jangka waktu sampai akhir tahun 2013. Sedangkan untuk Surabaya yaitu di

Kelurahan Kali Rungkut dan Rungkut Kidul, pasokan gas diperoleh dari PT Lapindo Brantas.

Saat ini pembangunan jaringan distribusi gas tersebut telah mencapai tahap pembangunan konstruksi. Diharapkan pembangunannya dapat diselesaikan pada tahun ini.

Pembangunan jaringan distribusi gas merupakan salah satu wujud keseriusan pemerintah mendorong penggunaan gas untuk rumah tangga yang lebih murah, bersih dan aman terhadap lingkungan. Peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga, diharapkan dapat mempercepat pengurangan penggunaan minyak bumi serta mengurangi subsidi BBM.

<http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigasannya/detail/1437/Disusun,-Pedoman-Pengelolaan-Jaringan-Distribusi-Gas-Kota>

Hingga 2014, Jaringan Gas Rumah Tangga Akan Dibangun di 21 Kota

Selasa, 8 September 2009

Jakarta. Pemerintah telah membuat roadmap pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga hingga tahun 2014. Selama 5 tahun, jaringan distribusi gas akan dibangun di 21 kota.

Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H. Legowo di Jakarta, Selasa (8/9), menjelaskan, untuk tahun 2009, jaringan distribusi gas dibangun di Palembang dan Surabaya dan kini telah memasuki tahap konstruksi. Sedangkan untuk 2010, jaringan distribusi gas akan dibangun di 4 kota yaitu Bekasi, Depok, Tarakan dan Sidoarjo. Jaringan distribusi gas untuk 2011 rencananya akan dibangun di rumah susub bersubsidi Jabodetabek, Semarang, Bontang dan Sengkang.

Madura, Balikpapan dan Jambi akan dibangun jaringan distribusi gas pada 2012. Setahun kemudian, giliran Sorong, Pekanbaru, Subang dan Lhokseumawe.

Sedangkan 2014, jaringan distribusi gas akan dibangun di Samarinda, Muara Enim, Lampung dan Prabumulih.

Pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga dilakukan secara bertahap karena keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah. Untuk tahun ini, pemerintah menyediakan dana sekitar Rp 140 miliar. Pembangunan dilakukan hingga instalasi di rumah-rumah, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang.

“Nantinya masyarakat hanya membayar biaya gas yang mereka pakai saja. Seperti kita berlangganan air bersih saja,” katanya.

Jaringan distribusi gas hanya dibangun di daerah-daerah yang dekat atau memiliki sumber gas. Untuk daerah atau kawasan yang tidak memiliki sumber gas, dapat

menggunakan LPG.

“Selain itu, jaringan gas juga dibangun di kawasan yang telah memiliki jaringan transmisi,” tambah Evita.

Mengenai pengelolaan jaringan distribusi gas pasca konstruksi, Evita menjelaskan, pemerintah memiliki 2 opsi yaitu menghibahkan kepada pemda untuk dikelola atau dilelang kepada badan usaha yang berminat dan memiliki kemampuan. Dari 2 opsi tersebut, pemerintah cenderung memilih mekanisme lelang karena hingga saat ini belum perusahaan daerah yang memiliki kemampuan dan pengalaman mengelola jaringan gas.

Pengamat ekonomi Aviliani mendukung upaya pemerintah membangun jaringan distribusi gas untuk rumah tangga ini. Menurutnya, pembangunan jaringan

2009

distribusi gas ini merupakan langkah antisipasi pemerintah terkait dengan semakin meningkatnya harga minyak dunia yang berdampak pada tingginya harga BBM.

Pembangunan jaringan distribusi gas ini dinilainya juga dapat mengurangi beban subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah. Ia mengusulkan agar dana yang tadinya digunakan untuk subsidi BBM dapat dialihkan untuk membangun jaringan distribusi gas untuk rumah tangga.

<http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigas/detail/1482/Hingga-2014,-Jaringan-Gas-Rumah-Tangga-Akan-Dibangun-di-21-Kota>

Gas Rumah Tangga Mengalir Januari 2010

Selasa, 17 November 2009

Jakarta. Pemerintah merencanakan gas bumi melalui jaringan pipa distribusi yang dibangun menggunakan dana APBN di Palembang dan Surabaya, sudah dapat dinikmati masyarakat pada akhir Januari 2010.

“Tahap konstruksi diharapkan selesai akhir tahun ini. Setelah dilakukan uji coba dan sebagainya, diharapkan akhir Januari gas sudah dapat mengalir ke rumah-rumah,” kata Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H. Legowo.

Ia mengemukakan, pembangunan jaringan distribusi gas kota di Palembang dan Surabaya kini memasuki tahap konstruksi. Pipa yang dibangun meliputi pipa distribusi hingga ke meteran di masing-masing rumah tangga yang mendapat fasilitas ini.

Evita mengakui, dalam pelaksanaan pembangunan jaringan ini, pihaknya menemui sejumlah kendala seperti kondisi jalan yang terlalu sempit, lokasi yang dituju menyeberangi sungai. Ada pula kawasan yang ternyata sudah dilalui pipa jaringan gas bumi milik PT PGN.

“Akibatnya, pelaksana harus menyesuaikan daerah yang dapat dipasang jaringannya agar hasilnya optimal,” kata Evita.

Terkait pengelolaan jaringan distribusi gas ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No 29 Tahun 2009 tentang tata cara penawaran pengoperasian jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh pemerintah. Dalam aturan tersebut, ditetapkan bahwa

penawaran pengoperasian jaringan ini dilaksanakan melalui lelang serta dapat diikuti oleh badan usaha dan BUMD.

Khusus mengenai BUMD ini, pemerintah memberikan hak perubahan penawaran (right to match) dengan ketentuan BUMD harus mempunyai komitmen pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di wilayahnya. Hak right to match diberikan apabila hasil penilaian terhadap dokumen partisipasi yang diberikan BUMD, lebih rendah dari

badan usaha peserta lelang yang lain, dengan ketentuan sekurang-kurangnya menyamai penawaran tertinggi untuk komitmen teknis dan finansial.

Sementara itu mengenai harga berlangganan yang harus dibayar masyarakat nantinya, masih dalam pembahasan pemerintah.

Menurut rencana untuk 2010, jaringan distribusi gas akan dibangun di 4 kota yaitu Bekasi, Depok, Tarakan dan Sidoarjo. Jaringan distribusi gas untuk 2011 rencananya akan

dibangun di rumah susun bersubsidi Jabodetabek, Semarang, Bontang dan Sengkang.

Madura, Balikpapan dan Jambi akan dibangun jaringan distribusi gas pada 2012. Setahun kemudian, giliran Sorong, Pekanbaru, Subang dan Lhokseumawe. Sedangkan 2014, jaringan distribusi gas akan dibangun di Samarinda, Muara Enim, Lampung dan Prabumulih.

<http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigas/detail/1556/Gas-Rumah-Tangga-Mengalir-Januari-2010>

2010

Menteri ESDM : Program Jaringan Gas Kota Menghemat Anggaran Subsidi Rp. 1 Triliun

Jum'at, 19 Maret 2010

JAKARTA. Pemerintah telah mencanangkan beberapa program terkait peningkatan pemanfaatan gas bumi sebagai pengganti bahan bakar minyak sebagai wujud diversifikasi energi. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-852/MK.02/2008 tanggal 10 Juli 2008, Program Jaringan Gas Kota (Jargas) untuk rumah tangga merupakan kegiatan prioritas nasional dari Sub Sektor Migas.

Kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Daerah menentukan keberhasilan Program Jargas. Jargas merupakan program komplemen dalam rangka diversifikasi energi untuk mempercepat pengurangan penggunaan minyak tanah sebagai bahan bakar sehingga dapat membantu terwujudnya kemandirian energi selain itu, masyarakat dapat

memperoleh sumber energi rumah tangga yang lebih murah, bersih dan aman.

“Peningkatan pemanfaatan energi alternatif khususnya gas bumi dalam rangka mengurangi pemanfaatan minyak bumi adalah dalam rangka memenuhi target diversifikasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 untuk menuju bauran energi yang lebih baik dan berimbang”, ujar Menteri ESDM dalam sambutannya pada acara Peresmian Pemanfaatan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Alokasi Pasokan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun 2010 yang dilaksanakan di Gedung Kementerian ESDM, Kamis (18/3).

Pemanfaatan gas bumi guna

mengurangi pemanfaatan minyak bumi berdampak langsung terhadap besaran subsidi. Menurut Menteri ESDM, pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga melalui program Jargas dapat menghemat penggunaan minyak tanah sebanyak 2,8 juta liter atau ekuivalen dengan Rp 1 triliun.

Tahun 2009 yang lalu lanjut Menteri, pemerintah memerlukan subsidi untuk BBM sekitar Rp. 45 triliun termasuk minyak tanah, untuk itu diharapkan dengan program pembangunan jaringan distribusi gas bumi ini dapat mengurangi beban subsidi.

Lebih lanjut Menteri mengatakan, komitmen pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM secara bertahap merupakan langkah yang harus diambil agar dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pokok

lainnya seperti, pendidikan dan kesehatan.

“Jaringan distribusi gas bumi sektor rumah tangga merupakan wujud penghematan bahan bakar dan subsidi sehingga lebih banyak anggaran negara yang dapat dipergunakan bagi program pro rakyat lainnya”, tutur Menteri. (SF)

<http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/3241-menteri-esdm-program-jaringan-gas-kota-menghemat-anggaran-subsidi-rp-1-triliun.html>

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Meminta Tambahan Jaringan Gas Kota

Sabtu, 20 Maret 2010

JAKARTA. Program Jaringan Gas Kota (jargas) yang telah dilaksanakan Pemerintah di Kota Palembang tahun 2009 lalu baru menjangkau 3.310 sambungan. Dengan segala kelebihan yang dimiliki bahan bakar gas bagi rumah tangga dan ketersediaan pasokan gas bumi yang dimiliki, Pemerintah Kota Palembang meminta agar Jargas bagi masyarakat Palembang dapat ditingkatkan.

Keinginan meminta tambahan Jargas bagi masyarakat tersebut diungkapkan Walikota Palembang, H. Eddy Santana Putra dalam acara Peresmian Pemanfaatan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Penandatanganan Nota Kesepahaman

Alokasi Pasokan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun 2010 yang

dilaksanakan di Gedung Kementerian ESDM, Kamis (18/3).

Pasokan gas bumi bagi konsumen rumah tangga di Kota Palembang saat ini baru mencapai 0.24 MMfcs dengan pasokan yang kurang dari seperempat MMSCFD tersebut sudah dapat mengaliri hampir 4.000 sambungan, ujar Gubernur Sumsel.

Dengan ketersediaan pasokan gas yang melimpah di Sumsel Gubernur meminta agar Pasokan gas untuk Kota Palembang yang berasal dari PT Medco E&P Indonesia dapat ditingkatkan setidaknya mencapai 10 kali lipat atau 40.000 sambungan.

“Kami mohon agar Jargas di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang tidak dibatasi hanya

2010

di dua kelurahan ", pinta Gubernur.

Permohonan senada diungkapkan pula oleh Walikota Palembang, H. Eddy Santana Putra menurutnya jaringan gas bagi konsumen rumah tangga di Kelurahan Siring Agung dan Lorok Pakjo tersebut baru mencapai 3% konsumen rumah tangga.

"Warga yang bersebelahan dengan dua kelurahan tersebut bertanya, kenapa disana tersedia gas bumi sedang disini tidak? ", ujarnya. Untuk itu maka lanjut Beliau Pemerintah Pusat dapat meningkatkan jumlah sambungan Jargas bagi masyarakat Kota Palembang.

Penggunaan bahan bakar gas melalui Jaringan Gas Kota bagi konsumen rumah tangga dinilai lebih hemat,

aman dan bersih. Program Jargas merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih dan murah serta program komplementer konversi minyak tanah ke LPG untuk percepatan pengurangan penggunaan minyak bumi.

Pemerintah membangun jaringan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga menggunakan dana APBN karena badan usaha belum tertarik untuk membangun akibat minimnya keuntungan dalam pengelolaannya. Pengelolaan jaringan distribusi gas bumi di Kota Palembang setelah melalui proses lelang diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu, PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya dan selanjutnya bertindak sebagai

pengawas adalah Dirjen Migas dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (SF)

<http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/3240-pemerintah-provinsi-sumatera-selatan-meminta-tambahan-jaringan-gas-kota.html>

Pemerintah Dampingi BUMD Kelola Jaringan Gas Kota

Selasa, 23 Maret 2010

Jakarta. Dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT Pembangunan Sarana Palembang Jaya dan PT Petrogas Jatim Utama telah ditetapkan sebagai pengelola jaringan distribusi gas untuk rumah tangga di Kota Palembang dan Surabaya. Meski demikian, Pemerintah Pusat akan tetap mendampingi dalam pelaksanaan di lapangan.

“Ini barang baru, kita tetap akan mendampinginya,” ungkap Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo.

Dikatakan Evita, Pemerintah Pusat akan melakukan pembinaan terhadap BUMD yang telah ditunjuk tersebut. PT PGN (Persero) yang telah memiliki pengalaman mengenai hal ini, telah menyatakan kesiapannya membantu dalam pengelolaannya.

Dengan telah diresmikan pemanfaatannya oleh Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh pada pekan lalu, maka jaringan distribusi gas untuk rumah tangga di Kota Palembang dan Kota Surabaya, diharapkan dapat segera dinikmati masyarakat.

Untuk Kota Palembang, jaringan distribusi gas dibangun di Kelurahan Siring Agung dan Lorok Pakjo, dengan jumlah sambungan rumah yang siap dialirkan gas mencapai 3.310 sambungan. Sedangkan di Kota Surabaya, dibangun di Kelurahan Kalirungkut dan Rungkut Kidul, dengan jumlah sambungan rumah mencapai 2.900 sambungan. Pasokan gas untuk Kota Palembang berasal dari PT Medco E&P Indonesia. Sedangkan Kota Surabaya dipasok oleh PT Lapindo Brantas.

PT Pembangunan Sarana Palembang Jaya dan PT Petrogas Jatim Utama ditetapkan sebagai pengelola setelah melalui proses pelelangan umum. Aset jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga ini dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan dikelola oleh badan usaha sesuai dengan PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Negara.

<http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigas/detail/1708/Pemerintah-Dampingi-BUMD-Kelola-Jaringan-Gas-Kota>

2010

Serah Terima Pembangunan Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga

15 April 2010

PRESS RELEASE

HUMAS DAN PROTOKOL KOTA DEPOK, 7 April 2010

Walikota Depok, H. Nur Mahmudi Isma'il dan Wakil Walikota Depok, H. Yuyun Wirasaputra menyaksikan penandatanganan serah terima lapangan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga yang bertempat di Ruang Noto Hamidprojo Lt.3 Hotel Bumi Wiyata, Depok. Penandatanganan dilakukan oleh Ahmad Sholeh (Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Migas), Muhamad Firdaus (Direktur PT. Kelsri) selaku kontraktor pembangunan, dan Wisnu Hadi (Direktur Pt. Desonta) selaku pengawas pembangunan.

Acara yang berlangsung pada Rabu (7/4) dihadiri oleh Sekretaris Daerah,

Kabag Humas dan Protokol, Kepala Bagian Ekonomi Pemkot Depok, Kadis Bina Marga dan SDA Depok, Kadis Tarkim Depok, Kepala Satpol PP Depok, Dishub Depok, serta jajaran Kementerian ESDM, khususnya Dirjen Migas. Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Depok akan direalisasikan di 3770 rumah di 2 Kelurahan, yaitu Kelurahan Beji dan Beji Timur.

Dalam sambutannya, Walikota berterima kasih kepada ESDM yang telah memasukkan Kota Depok sebagai wilayah yang akan dibangun jaringan gas bumi untuk rumah tangga. Pemimpin Kota Depok juga bersyukur karena Depok menjadi salah satu wilayah yang terpilih dari 400 kabupaten yang ada di Indonesia. "Kita harus mendukung pembangunan jaringan gas ini karena

pembangunan ini akan bermanfaat bagi warga. Banyak keuntungan yang bisa diambil dari adanya jaringan gas bumi untuk rumah tangga ini bila dibandingkan dengan elpiji, antara lain; pemakaian yang tahan lama, harga yang 20% lebih murah dibanding elpiji, pemakaian yang mudah dan efisien, ramah lingkungan, dan tidak adanya bahaya ledakan" ujar Walikota mengakhiri sambutannya. (OLS)

KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

SETDA KOTA DEPOK

HANI HAMIDAH, S.Sos. M.Si

PEMBINA

NIP. 19630627 198409 2 001

<http://www.depok.go.id/en/15/04/2010/08-infrastruktur/serah-terima-lapangan-pembangunan-jaringan-gas-bumi-untuk-rumah-tangga>

2011

Jaringan Distribusi Gas Bumi Mulai Dimanfaatkan

Rabu, 6 April 2011

JAKARTA - Menteri (ESDM) Darwin Zahedy Saleh meresmikan pemanfaatan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga di 2010 dan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman alokasi pasokan gas bumi untuk rumah tangga di 2011.

Sebelumnya, jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dibangun sejak setahun yang lalu di Kota Tarakan, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Sidoarjo. Untuk Kota Tarakan dibangun di Kelurahan Karang Balik dan Sebengkok, dengan jumlah sambungan rumah yang siap dialirkan gas mencapai 3.366 sambungan.

Kota Bekasi dibangun di Perumnas Bojong Rawalumbu dengan jumlah Sambungan Rumah mencapai 1.800 sambungan, Kota Depok dibangun di Kelurahan Beji dan Beji Timur dengan

jumlah Sambungan Rumah mencapai 4.000 sambungan, sementara untuk Kabupaten Sidoarjo, dibangun di Desa Ngingas dan Desa Wedoro, dengan jumlah sambungan rumah mencapai 4.000 sambungan.

“Pasokan gas untuk Kota Tarakan diambil dari PT Medco E&P Indonesia. Kota Bekasi dan Kota Depok dari PT Pertamina EP, sedangkan Kabupaten Sidoarjo dipasok oleh Lapindo Brantas Inc,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas ESDM, Sutisna Prawira dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Rabu (6/4/2011).

Peresmian pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga di Tarakan, Bekasi, Depok, dan Sidoarjo, ditandai dengan penyerahan sertifikat pengelolaan jaringan distribusi gas bumi kepada Perusda Kota Tarakan (Tarakan), PT

Sinergi Patriot Bekasi (Bekasi), PT Jabar Energi (Depok), dan PT Petrogas Jatim Utama (Sidoarjo), yang menjadi pemenang setelah melalui proses pelelangan umum.

Aset jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga ini dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan dikelola oleh badan usaha.

Sementara itu, untuk tahun anggaran 2011 akan ditandatangani nota kesepahaman alokasi gas bumi jaringan distribusi untuk rumah tangga di Bontang yang dipasok oleh Total E&P Indonesia, Sengkang yang dipasok oleh Energy Equity Epic (Sengkang) serta rusun Jabodetabek yang dipasok oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

2011

Jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga di 2011 akan dibangun di Kota Bontang, Sengkang, Rusun Jabodetabek, Bekasi tahap II dan Sidoardjo tahap II, sebanyak 25 ribu sambungan rumah. Untuk Kota Bontang, akan dibangun di Kelurahan Gunung Elai, Api-api sebanyak 4.000 sambungan rumah.

Sementara untuk Kota Sengkang, dibangun di Kelurahan Lapongkoda, Siengkang, Madukeleng, Bulu Pabulu, Atakae dan Lempa sebanyak 4.000 sambungan rumah. Sedangkan untuk Rusun Jabotabek, akan dibangun di 24 rusun dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 11 ribu.

Di Kota Bekasi tahap II, dibangun di Perumnas Bojong Rawalumbu sebanyak 2.200 sambungan rumah

dan Sidoardjo tahap II di Tambaksawah, Medaeng sebanyak 5.000 sambungan rumah.

Pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih dan murah serta program komplementer konversi minyak tanah ke LPG untuk percepatan pengurangan penggunaan minyak bumi.

Pemerintah membangun jaringan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga karena badan usaha tidak tertarik membangun akibat minimnya keuntungan dalam pengelolaannya. Di masa mendatang, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan serta dan mewujudkan menjadi kota gas.

Program pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga ini dibangun di kota-kota atau daerah yang dekat dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan transmisi gas bumi.

<http://economy.okezone.com/read/2011/04/06/320/442978/large>

Peresmian Jaringan Gas untuk Rumah Tangga

Rabu, 6 April 2011

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
NOMOR: 18/HUMAS KESDM/2011
Tanggal: 6 April 2011

**Peresmian Pemanfaatan Jaringan Distribusi Gas Bumi
Untuk Rumah Tangga Tahun 2010 dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Alokasi Pasokan Gas Bumi
Untuk Rumah Tangga Tahun 2011**

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada hari Rabu tanggal 6 April 2011, meresmikan pemanfaatan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga tahun 2010 dan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman alokasi pasokan gas bumi untuk rumah tangga tahun 2011 di Lobby Utama Lantai 1 KESDM.

Jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dibangun tahun 2010 di Kota Tarakan, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Sidoarjo. Untuk Kota Tarakan

dibangun di Kelurahan Karang Balik dan Sebangkok, dengan jumlah sambungan rumah yang siap dialirkan gas mencapai 3.366 sambungan, Kota Bekasi dibangun di Perumnas Bojong Rawalumbu dengan jumlah Sambungan Rumah mencapai 1.800 sambungan, Kota Depok dibangun di Kelurahan Beji dan Beji Timur dengan jumlah Sambungan Rumah mencapai 4.000 sambungan, sementara untuk Kabupaten Sidoarjo, dibangun di Desa Ngingas dan Desa Wedoro, dengan jumlah sambungan rumah mencapai 4.000 sambungan.

Pasokan gas untuk Kota Tarakan berasal dari PT Medco E&P Indonesia. Kota Bekasi dan Kota Depok dari PT. Pertamina EP, sedangkan Kabupaten Sidoarjo dipasok oleh Lapindo Brantas, Inc.

Peresmian pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga di Tarakan, Bekasi, Depok dan Sidoarjo, ditandai dengan penyerahan sertifikat pengelolaan jaringan distribusi gas bumi kepada Perusda Kota Tarakan (Tarakan), PT. Sinergi Patriot Bekasi (Bekasi), PT. Jabar Energi (Depok) dan PT Petrogas Jatim Utama (Sidoarjo), yang menjadi

2011

pemenang setelah melalui proses pelelangan umum. Aset jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga ini dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan dikelola oleh badan usaha.

Sementara itu, untuk tahun anggaran tahun 2011 akan ditandatangani nota kesepahaman alokasi gas bumi jaringan distribusi untuk rumah tangga di Bontang yang dipasok oleh Total E&P Indonesia, Sengkang yang dipasok oleh Energy Equity Epic (Sengkang) serta rusun Jabodetabek yang dipasok oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk.

Jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga tahun 2011 akan dibangun di Kota Bontang, Sengkang, Rusun Jabodetabek, Bekasi tahap II dan Sidoarjo tahap II, sebanyak 25.000 sambungan rumah. Untuk Kota Bontang, akan dibangun di Kelurahan Gunung Elai, Api-api sebanyak

4.000 sambungan rumah. Sementara untuk Kota Sengkang, dibangun di Kelurahan Lapongkoda, Siengkang, Madukeleng, Bulu Pabulu, Atakae dan Lempa sebanyak 4.000 sambungan rumah.

Sedangkan untuk Rusun Jabotabek, akan dibangun di 24 rusun dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 11.000. Di Kota Bekasi tahap II, dibangun di Perumnas Bojong Rawalumbu sebanyak 2.200 sambungan rumah dan Sidoarjo tahap II di Tambaksawah, Medaeng sebanyak 5.000 sambungan rumah.

Pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih dan murah serta program komplementer konversi minyak tanah ke LPG untuk

percepatan pengurangan penggunaan minyak bumi.

Pemerintah membangun jaringan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga karena badan usaha tidak tertarik membangun akibat minimnya keuntungan dalam pengelolaannya. Di masa mendatang, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan serta dan mewujudkan menjadi kota gas.

Program pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga ini dibangun di kota-kota atau daerah yang dekat dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan transmisi gas bumi.

Kepala Biro Hukum dan Humas

Sutisna Prawira

<http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/4366-peresmian-jaringan-gas-untuk-rumah-tangga.html>

KKKS Diminta Sisihkan Produksi Untuk Program Jargas Rumah Tangga

Rabu, 6 April 2011

Jakarta. Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) diminta menyisihkan sebagian kecil produksi gasnya untuk mendukung program jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga. Volume gas yang dibutuhkan tidak besar, hanya sekitar 1-2 MMSCFD untuk setiap kota.

Harapan itu disampaikan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno pada acara peresmian pemanfaatan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga tahun 2010 dan penandatanganan nota kesepahaman jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga 2011 di Kementerian ESDM, Rabu (6/4).

Darwin mengatakan, cadangan gas bumi Indonesia diperkirakan cukup untuk dipergunakan selama 60 tahun

ke depan. Namun, pemanfaatannya di dalam negeri belum maksimal. Karena itu, diperlukan dukungan berbagai rencana untuk peningkatan pemanfaatannya di dalam negeri, termasuk rencana pembangunan gas bumi yang terpadu guna memicu pertumbuhan pasar gas, ekonomi, pengembangan wilayah dan pembukaan lapangan kerja.

Pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga ini, lanjut Darwin, diharapkan dapat mempercepat pengurangan penggunaan minyak tanah untuk rumah tangga, sehingga dapat membantu terwujudnya kemandirian energi.

"Selain itu, masyarakat dapat memperoleh energi rumah tangga yang murah, bersih dan aman," katanya.

Pembangunan distribusi gas bumi untuk rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional. Kementerian ESDM mendapatkan penugasan penyediaan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga dari pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden No 19 tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011, yang antara lain memuat upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan energi.

"Dalam hal ini adalah pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga secara gratis," tambahnya.

Untuk tahun 2010, telah dilaksanakan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Kelurahan Beji dan Beji Timur di Kota Depok, Kelurahan Karang Balik dan Sebengkok di Kota Tarakan, Desa Ngingas dan Wedoro

2011

di Kabupaten Sidoarjo dan Perumnas Bojong Rawalumbu Kota Bekasi dengan total 13.166 sambungan rumah yang siap dialirkan gasnya.

Selanjutnya, pemerintah mengharapkan agar pemerintah daerah dapat mengembangkan dan mewujudkan menjadi kota gas.

Sementara untuk tahun 2011, jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga akan dibangun di Kota Bontang, Sengkang, Rusun Jabodetabek, Kota Bekasi tahap II dan kabupaten Sidorarjo tahap II, sebanyak 25.000 sambungan rumah.

Khusus untuk Kabupaten Sidoarjo, pemerintah membangunkan jaringan dalam 2 periode dengan volume

sambungan rumah mencapai 9.000 atau dua kali lipat dibandingkan kota-kota lainnya. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kepedulian pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat yang terkena semburan lumpur Lapindo.

<http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigasian/detail/2201/KKKS-Diminta-Sisihkan-Produksi-Untuk-Program-Jargas-Rumah-Tangga>

Program gas bumi, pemerintah klaim hemat Rp52,8 T

ekonomi - Rabu, 6 April 2011

INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah mengklaim berhasil melakukan penghematan sebesar Rp52,8 triliun dari program penyaluran jaringan gas bumi di 2010.

Dengan adanya penghematan tersebut pemerintah berharap subsidi pemerintah untuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bisa berkurang sehingga tidak mengganggu APBN. "Dengan penghematan sebanyak itu, tentu kita bikin puluhan pasar, rumah sakit dan sekolah dan jembatan," ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karno, usai membuka peresmian pemanfaatan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga tahun 2010 dan penandatanganan nota kesepahaman alokasi

pasokan gas bumi untuk rumah tangga tahun 2011, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (6/4).

Terkait pengembangan jaringan gas bumi, dirinya meminta agar peran swasta bisa terlibat langsung, sehingga diharapkan program tersebut bisa berkembang kedepannya. "Kalau program jargas (jaringan gas) swasta belum terlibat otomatis pemerintah harus berjuang lebih keras lagi. Sehingga program jargas ini tidak mandeg/berhenti ditengah jalan," ucap dia.

Namun dirinya memastikan bahwa progra jargas merupakan program yang akan terus dijalankan. "Ini bukan program tahunan, tapi akan terus kita kembangkan," tambah dia.

[cms]

<http://teknologi.inilah.com/read/detail/1392902/URLTEENAGE#.Uoh6YtJHLxo>

Gas Bumi Sebagai Bahan Bakar, Pemerintah dan Masyarakat Sama-Sama Untung

Kamis, 07 April 2011

JAKARTA. Untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat, khususnya pada sektor rumah tangga, Pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar melalui program Jaringan Gas Kota (Jargas). Pemanfaatan bahan bakar gas selain menguntungkan Pemerintah juga menguntungkan masyarakat. Melalui program gas kota diharapkan dapat mengurangi penggunaan minyak tanah sebagai bahan bakar sehingga mengurangi beban subsidi dan masyarakat mendapatkan bahan bakar yang lebih bersih, aman dan murah.

"Pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga merupakan energi alternatif yang sangat potensial karena lebih efektif dalam penggunaannya. Pembangunan jaringan distribusi gas

bumi untuk rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional dalam rangka penyediaan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga," demikian Sekretaris Jenderal, Kementerian ESDM, Waryono Karno dalam sambutannya pada acara "Peresmian Pemanfaatan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun 2010 dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun 2011. Rabu (6/4/2011).

Ditambahkannya, " karena Badan Usaha tidak tertarik membangun jaringan ini karena tidak ada keuntungan dalam pengelolaannya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendapatkan penugasan penyediaan infrastruktur jaringan gas bumi untuk

2011

rumah tangga dari Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2011, yang diantaranya memuat upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan energi yang dalam hal ini adalah pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga secara gratis," ujar Beliau.

Agar program ini dapat segera menyebar dengan cepat di wilayah-wilayah lain Waryono meminta Pemerintah Daerah untuk bersinergi dengan Pemerintah Pusat, dan karena keterbatasan anggaran Kementerian ESDM, bagi Pemerintah Daerah yang sudah "mampu" diminta berkontribusi dalam pembangunan jaringan infrastruktur gasnya.

Pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar di sisi Pemerintah dapat penghemat anggaran Negara untuk BBM. Sedangkan disisi masyarakat, masyarakat mendapatkan bahan bakar yang lebih bersih, lebih sehat, lebih murah dan lebih aman karena tekanan gas bumi ini sangat rendah. (SF)

<http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/4371-gas-bumi-sebagai-bahan-bakar-pemerintah-dan-masyarakat-sama-sama-untung.html>

Pemda Dukung Pembangunan Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga

Kamis, 7 April 2011

Jakarta. Pemerintah daerah mendukung program pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga karena dapat menghemat pengeluaran bahan bakar untuk memasak hingga 70%.

Hal itu dikemukakan wakil Pemerintah Daerah Depok, Tarakan, Sidoarjo dan DKI Jakarta dalam jumpa pers usai peresmian pemanfaatan jaringan distribusi gas bumi tahun 2010 di Kementerian ESDM, kemarin.

Walikota Tarakan Udin Hianggio, mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat sehingga jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dapat dibangun di

kotanya. Diharapkan dalam waktu dekat, jaringan ini sudah dapat mengalirkan gas dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dikatakan, jaringan gas ini sangat membantu masyarakat Tarakan karena dapat menghemat pengeluaran biaya pengeluaran bahan bakar untuk memasak hingga 70%. Setiap bulannya, setiap kepala keluarga membutuhkan 1 tabung gas ukuran 12 kg yang harganya sekitar Rp 150 ribu. Jika menggunakan jaringan gas kota ini, maka pengeluarannya hanya sekitar Rp 50 ribu per bulan.

Hal senada juga diungkapkan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah yang telah menikmati manfaat pembangunan gas bumi di rumahnya. Saiful berharap agar pembangunan jaringan distribusi ini dapat mengurangi beban masyarakat

Sidoarjo yang terkena dampak lumpur Lapindo.

Sementara itu Walikota Depok M. Nur Mahmudi mengemukakan, pihaknya akan mengembangkan penggunaan gas bumi untuk angkutan kota. Rencana ini juga akan dilakukan oleh Pemda Tarakan dan DKI Jakarta.

Jaringan distribusi gas bumi yang telah selesai dibangun tahun 2010 mencapai 13.166 sambungan rumah. Sebelumnya, jaringan distribusi telah dibangun di Palembang dan Surabaya.

<http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigasana/detail/2203/Pemda-Dukung-Pembangunan-Jargas-Rumah-Tangga>

Tahun 2012, Jargas Rumah Tangga Akan Dibangun di 4 Kota

Senin, 11 April 2011

Jakarta. Untuk tahun 2012 mendatang, pemerintah akan membangun jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga di 4 kota yaitu Pekanbaru, Bangkalan, Jambi dan Prabumulih.

Menurut rencana, di tiap kota tersebut akan dibangun sekitar 4.000 sambungan rumah atau total sekitar 16.000 sambungan rumah.

Sementara untuk tahun ini, pemerintah membangun jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga di Bontang, Sengkang, Rusun Jabodetabek, Bekasi tahap II dan Sidoarjo tahap II, sebanyak 25.000 sambungan rumah.

Sedangkan untuk tahun 2013,

2011

rencananya akan dibangun di Sorong, Subang, Lhokseumawe dan Balikpapan. Tahun berikutnya, jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga akan dibangun di Samarinda, Muara Enim, Lampung dan Semarang.

Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dibangun pemerintah sejak 2009 di Palembang dan Surabaya. Melalui program ini, diharapkan dapat mempercepat pengurangan penggunaan minyak tanah untuk rumah tangga sehingga dapat membantu terwujudnya kemandirian energi. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh energi yang murah, bersih dan aman.

Pemerintah membangun jaringan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga karena badan usaha tidak

tertarik membangun akibat minimnya keuntungan dalam pengelolaannya. Di masa mendatang, diharapkan badan usaha swasta dapat berperan serta dan mewujudkan menjadi kota gas.

Program pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga ini dibangun di kota-kota atau daerah yang dekat dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan transmisi gas bumi.

<http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigas/detail/2206/Tahun-2012,-Jargas-Rumah-Tangga-Akan-Dibangun-di-4-Kota>

Gas Untuk Rumah Tangga Resmi Mengalir di Kota Tarakan

Senin, 13 Juni 2011

Tarakan, Tambangnews.com Ditandai dengan pengguntingan pita di Metering Regulation System(MRS) Kelurahan Karang Balik oleh Walikota Tarakan Udin Hianggio, Senin (13/6), resmi sudah gas untuk rumah tangga mengalir di Kota Tarakan. Hadir dalam kesempatan tersebut, Sesditjen Migas Edi Purnomo, wakil BPH Migas dan BPMIGAS serta pejabat lainnya.

Peresmian pengaliran gas untuk rumah tangga di Kota Tarakan, menurut Dirjen Migas Evita H. Legowo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sesditjen Migas Edi Purnomo, merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan pelayanan umum, ekonomi daerah

serta kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan energi yang murah, bersih, aman dan mudah pemakaiannya.

“Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga juga merupakan program pemerintah untuk mengurangi beban subsidi,” tambah Evita.

Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dilakukan pemerintah karena badan usaha tidak tertarik melakukannya akibat minimnya keuntungan. Kementerian ESDM mendapat penugasan penyediaan infrastruktur ini melalui Peraturan Presiden No 19 tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2010 dan Inpres No 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 serta melalui rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR.

Pada tahun 2009, pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga telah dilaksanakan di Kota Palembang dan Surabaya, di mana masyarakat di kedua kota tersebut telah menikmati pelayanan pemerintah dalam penyediaan gas bumi sebagai energi murah, bersih dan aman. Sementara untuk tahun 2010, pemerintah membangun infrastruktur di Kota Tarakan, Depok, Bekasi dan Sidoarjo.

“Meningat terbatasnya anggaran pemerintah, Pemerintah Kota Tarakan diharapkan dapat mengembangkan dan membangun infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga sehingga dapat terbentuk gas kota di Tarakan,” ujar Evita.

Program pembangunan jaringan distribusi gas bumi, dilakukan di kota-kota atau daerah yang memiliki atau dekat dengan sumber gas bumi. Diutamakan daerah yang telah memiliki fasilitas jaringan

gas bumi karena akan meringankan pembiayaan yang berasal dari APBN.

Untuk Kota Tarakan, pemerintah membangun jaringan distribusi gas bumi sebanyak 3.366 sambungan rumah di Kelurahan Karang Balik dan Sebangkok. Pasokan gas disediakan oleh PT Medco E&P sebanyak 0,7 MMSCFD.

“Ini merupakan salah satu partisipasi BPMIGAS dan PT Medco untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal ini patut dibanggakan dan bisa dijadikan contoh bagi KKKS lainnya dalam mendukung program pemerintah,” tambahnya.

<http://www.tambangnews.com/berita/daerah/1445-gas-untuk-rumah-tangga-resmi-mengalir-di-kota-tarakan.html>

2011

Pengaliran Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Sidoarjo

Senin, 27 Juni 2011

Pemerintah membangun jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga di Desa Ngingas dan Wedoro, Kabupaten Sidoarjo. Menandai peresmian pengaliran gasnya, Bupati Sidoarjo Saifullah, melakukan pengguntingan pita dan menyalakan kompor gas di salah satu rumah warga, Sabtu (25/6).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Saryono Hadiwidjoyo, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, Perwakilan BPMIGAS Jawa Timur, Papua dan Maluku Budi Arman, Presdir Lapindo Brantas Dharma Irawan Jenie dan pejabat terkait lainnya.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Saryono Hadiwidjoyo mengemukakan, pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga merupakan program pemerintah yang dimaksudkan untuk mengurangi beban subsidi, khususnya subsidi minyak tanah dan LPG 3 kg.

Pembangunan jaringan ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan pelayanan umum dan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan energi yang murah, bersih dan aman.

Lebih lanjut Evita mengungkapkan, cadangan gas bumi Indonesia saat ini

cukup untuk dipergunakan selama 60 tahun ke depan. Sementara produksi minyak bumi selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Dengan besaran tingkat konsumsi minyak bumi saat ini, cadangan minyak bumi hanya mampu bertahan hingga 23 tahun mendatang, dengan asumsi tanpa adanya penemuan minyak baru. Untuk itu, pemerintah perlu mengenalkan energi alternatif kepada masyarakat dan salah satunya adalah pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga yang dinikmati masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional karena badan usaha tidak tertarik membangun

jaringan ini karena tidak ada keuntungan dalam pengelolaannya.

“Kementerian ESDM mendapatkan penugasan penyediaan infrastruktur jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dari pemerintah melalui PP No 19 tahun 2009 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 serta melalui RDP dengan Komisi VII DPR,” tambah Evita.

Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga dilakukan sejak 2009 di Palembang dan Surabaya. Khusus untuk Kabupaten Sidoarjo, pemerintah membangun 2 periode yaitu tahun 2010 dan 2011, dengan total volume sambungan rumah sebanyak 6.500 atau dua kali lipat dibandingkan kota-kota lainnya.

“Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kepedulian pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat yang terkena dampak semburan lumpur Lapindo,” papar Evita.

Mengakhiri sambutannya, Evita mengucapkan terima kasih kepada BPMIGAS dan Lapindo Brantas Inc sebagai penyedia gas yang telah mengalokasikan dan menyuplai gas sebesar 2 MMSCFD untuk rumah tangga di Desa Ngingas dan Wedoro.

<http://www.migas.esdm.go.id/wap/artisa.php?op=Berita&id=2302>

2012

Pemerintah Alokasikan Rp 230 Miliar untuk Gas Kota

Selasa, 31 Januari 2012

JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan Rp 230 miliar untuk membangun jaringan gas di lima kota pada 2012. Lima kota tersebut adalah Prabumulih, Jambi, Cibinong, Cirebon, dan Kalidawir di Jatim.

“Kami akan membangun setidaknya 16.000 sambungan gas ke rumah tangga di 2012,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo usai memonitor jaringan gas kota di Palembang, Surabaya, dan Tarakan melalui “video conference” di Jakarta, Selasa.

Selain itu, menurut dia, pada 2012, pemerintah akan menyelesaikan desain rinci pembangunan jaringan gas di enam kota yakni Sorong, Balikpapan, Subang, Lhokseumawe, Semarang, dan Cilacap.

Selanjutnya, pada rentang waktu 2013-2014, pemerintah merencanakan pembangunan jaringan gas di sembilan kota dengan total kebutuhan dana sekitar Rp 450 miliar atau Rp 50 miliar per kota.

Pada 2013, pemerintah merencanakan pembangunan jaringan gas di lima kota yaitu Sorong, Balikpapan, Subang, Lhokseumawe, dan Semarang.

Sedang, pekerjaan desain pada 2013 akan dilakukan di Samarinda, Muara Enim, Lampung, dan Pekanbaru dan dilanjutkan pembangunannya di empat kota tersebut pada 2014. “Lalu, kami akan melanjutkan desain di empat kota tahun 2014 yakni Cilegon, Tenggara, Nunukan, dan Blora,” kata Evita.

Menurut dia, setiap kota direncanakan dibangun jaringan gas kota di dua

kelurahan dengan 3.000-4.000 sambungan per kelurahan.

Ia juga mengatakan, pihaknya akan mengatasi permasalahan kewajiban maksimal pembelian (take or pay/TOP) gas. “Mungkin bisa diamandemen supaya tidak terkena TOP,” ujarnya.

Pemerintah sudah membangun jaringan gas kota sejak 2009. Sampai 2011, tercatat sembilan kota yang terdapat gas kota, yakni Palembang, Surabaya, Tarakan, Depok, Bekasi, Sengkang, Bontang, Bekasi, dan Sidoarjo. (tk/ant)

<http://www.investor.co.id/energy/pemerintah-alokasikan-rp-230-miliar-untuk-gas-kota/29107>

Jangkauan Gas Bumi Rumah Tangga Diperluas

Selasa, 31 Januari 2012

Kota yang mendapatkan gas bumi adalah Palembang, Surabaya, Bekasi, Depok, Medan dan Blora.

VIVAnews - Program pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (gas kota) yang diluncurkan pemerintah sejak 2008 terus berkembang. Penggunaan gas kota diutamakan untuk daerah-daerah penghasil gas untuk menciptakan kemandirian energi.

Direktur Hulu Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Edy Hermantoro, menjelaskan, pada 2008 pemerintah telah menyelesaikan Front End Engineering Design (FEED) untuk bisa mendistribusikan gas bumi ke pelanggan rumah tangga di enam kota, yaitu Palembang, Surabaya, Bekasi, Depok, Medan, dan Blora.

“Dan pada 2009 kami sudah melakukan

pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di kota Palembang yang mengaliri kurang lebih 3.311 rumah tangga dengan pasokan gas dari Medco E&P sebanyak 1 juta kaki

kubik,” kata Edy dalam Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Jakarta, Selasa 31 Januari 2012.

Pada tahun yang sama, sekitar 2.900 rumah tangga di Surabaya mendapatkan pasokan gas dari Lapindo Brantas Inc sebanyak 2 juta kaki kubik. Sementara itu, pada 2010, telah selesai dibangun jaringan gas bumi untuk rumah tangga di kota Depok (Beji dan Beji Timur) yang mengaliri sekitar 4 ribu rumah tangga dengan pasokan gas dari PT Pertamina EP sebanyak 1 juta kaki kubik.

Kota Bekasi, khususnya di Kelurahan Bojong Rawalumbu, program gas kota juga telah berjalan sekitar 1.800 rumah tangga yang juga mendapat pasokan dari PT Pertamina EP. Kota Tarakan juga telah teraliri sekitar 3.366 rumah tangga dengan pasokan gas dari Medco E&P sebanyak 0,7 juta kaki kubik.

Pada 2010, Kabupaten Sidoarjo mendapatkan pasokan gas dari Lapindo Brantas Inc sebanyak 2 juta kaki kubik untuk mengaliri gas di sekitar 4 ribu rumah tangga. Program pembangunan gas kota pada 2011 dilanjutkan di kota Bontang yang saat ini telah mengaliri gas di sekitar 3.960 rumah tangga. Kota Sengkang telah teraliri gas di sekitar 4.172 rumah tangga.

Pada 2011 juga terdapat pengembangan di Kabupaten Sidoarjo tahap 2 yang mengaliri sekitar 2.500 rumah tangga,

2012

kota Bekasi tahap dua mengalir 2.828 rumah tangga, dan 11 rusun di Jabodetabek yang mengalir 5.254 rumah tangga.

“Pada 2012, pembangunan akan dilanjutkan di kota Prabumulih Sumatera Selatan, Jambi, Cibinong (Bogor), Cirebon (Jawa Barat) dan Kalidawir (Jawa Timur),” katanya.

Tri Munawarti, warga Surabaya menjelaskan, sejak menggunakan gas kota, usaha masakan yang dimilikinya dapat menghemat pemakaian gas hingga Rp200 ribu per bulan.

“Pengeluaran untuk Elpiji sekitar Rp400-500 ribu, dengan adanya gas kota turun menjadi Rp300 ribu. Jadi, ada tambahan lagi buat keluarga,” katanya. (art)

<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/284288-jangkauan-gas-bumi-rumah-tangga-diperluas>

Roadmap Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga

Rabu, 1 Februari 2012

JAKARTA - Pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih dan murah serta program komplementer konversi minyak tanah ke LPG untuk percepatan pengurangan penggunaan minyak bumi. Pemanfaatan gas bumi guna mengurangi pemanfaatan minyak bumi berdampak langsung terhadap besaran subsidi.

Pemerintah membangun jaringan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga karena badan usaha tidak tertarik membangun akibat minimnya keuntungan dalam pengelolaannya. Di masa mendatang, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan serta dan mewujudkan menjadi kota gas. Program pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga ini dibangun di kota-

kota atau daerah yang dekat dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan transmisi gas bumi.

Berikut roadmap pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga tahun 2008-2014 yang sudah dibuat Pemerintah :

Tahun 2008, Pemerintah menyelesaikan FEED dan DEDC jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Kabupaten Blora, Palembang, Bekasi, Depok, Surabaya dan Medan.

Tahun 2009, Pemerintah menyelesaikan FEED dan DEDC untuk Kota Tarakan dan Sidoarjo serta mulai membangun jaringan gas di Kota Palembang dan Kota Surabaya. Untuk Kota Palembang dibangun di Kelurahan Siring Agung dan Lorok Pakjo, dengan jumlah sambungan rumah yang siap dialirkan gas mencapai 3.310 sambungan. Sementara untuk Kota Surabaya, dibangun di Kelurahan Kalirungkut dan Rungkut Kidul, dengan

jumlah sambungan rumah mencapai 2.900 sambungan. Pasokan gas untuk Kota Palembang berasal dari PT Medco E&P Indonesia. Sedangkan Kota Surabaya dipasok oleh PT Lapindo Brantas.

Selanjutnya, tahun 2010, Pemerintah kembali menyelesaikan FEED dan DEDC untuk rumah susun Jabodetabek, kota Bontang dan Sengkang, Sulawesi Selatan dan membangun jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga di Kota Tarakan, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Sidoarjo. Untuk Kota Tarakan dibangun di Kelurahan Karang Balik dan Sebengkok, dengan jumlah sambungan rumah yang siap dialirkan gas mencapai 3.366 sambungan, Kota Bekasi dibangun di Perumnas Bojong Rawalumbu dengan jumlah Sambungan Rumah mencapai 1.800 sambungan, Kota Depok dibangun di Kelurahan Beji dan Beji Timur dengan jumlah Sambungan Rumah mencapai 4.000 sambungan, sementara untuk Kabupaten Sidoarjo, dibangun di Desa Ngingas dan Desa Wedoro, dengan jumlah

sambungan rumah mencapai 4.000 sambungan.

Jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga tahun 2011 menyelesaikan FEED dan DEDC untuk kota Prabumulih, Jambi, Cibinong, Cirebon dan Kaligawir serta membangun jaringan gas di Kota Bontang, Sengkang, Rusun Jabodetabek, Bekasi tahap II dan Sidoarjo tahap II, sebanyak 25.000 sambungan rumah. Untuk Kota Bontang, akan dibangun di Kelurahan Gunung Elai, Api-api sebanyak 4.000 sambungan rumah. Sementara untuk Kota Sengkang, dibangun di Kelurahan Lapongkoda, Siengkang, Madukeleng, Bulu Pabulu, Atakae dan Lempa sebanyak 4.000 sambungan rumah.

Sedangkan untuk Rusun Jabotabek, dibangun di 24 rusun dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 11.000. Di Kota Bekasi tahap II, dibangun di Perumnas Bojong Rawalumbu sebanyak 2.200 sambungan rumah dan Sidoarjo tahap II di Tambaksawah, Medaeng

sebanyak 5.000 sambungan rumah.

Tahun 2012 ini, Pemerintah berencana menyelesaikan FEED dan DEDC untuk Sorong, Balikpapan, Subang, Lhokseumawe, Semarang dan Cilacap dan membangun jaringan gas kota Prabumulih, Jambi, Cibinong, Cirebon dan Kaligawir.

Menyelsaikan FEED dan DEDC untuk Samarinda, Muara Enin, Lampung dan Pekanbaru serta membangun jaringa gas bumi untuk rumah tangga di Sorong, Balikpapan, Subang, Lhokseumawe, Semarang dan Cilacap merupakan rencana Pemerintah di tahun 2013 nanti.

Rencana selanjutnya Pemerintah di tahun 2014 adal menyelesaikan FEED dan DEDC untuk 4 wilayah (Cilegon, Tenggarong, Nunukan dan Blera) serta membangun jaringan gas untuk Samarinda, Muara Enin, Lampung dan Pekanbaru. (SF)

<http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/5409-roadmap-pembangunan-jaringan-distribusi-gas-bumi-untuk-rumah-tangga.html>

2012

SIARAN PERS Sidang Paripurna Ke-1 Dewan Energi Nasional

DEWAN ENERGI NASIONAL

SIARAN PERS, NOMOR : 02/HUMAS/2012

TANGGAL : 7 MARET 2012

SIDANG PARIPURNA KE-1 DEWAN ENERGI NASIONAL

Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Maret 2012, telah dilaksanakan Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional Ke-1 yang dihadiri oleh Anggota DEN yang terdiri dari 7 (tujuh) Menteri Anggota DEN dari Unsur Pemerintah dan 7 (tujuh) Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan, dengan agenda membahas Rancangan Kebijakan Energi Nasional yang telah dirumuskan oleh Anggota Dewan Energi Nasional.

Dalam Sidang Paripurna ke - 1 Dewan Energi Nasional disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Januari 2012, Dewan Energi Nasional telah melaksanakan

Sidang Anggota Dewan Energi Nasional ke-7 dan telah mensepakati Rancangan Kebijakan Energi Nasional (Rancangan-KEN) yang telah dirumuskan dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Anggota Dewan Energi Nasional.

2. Rancangan KEN disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam pengelolaan energi untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Kebijakan penting dalam Rancangan KEN adalah perubahan paradigma pengelolaan energi nasional, yang menempatkan sumber daya energi

sebagai modal pembangunan nasional, bukan hanya sebagai komoditi ekspor.

3. Rancangan KEN menetapkan sasaran sebagai berikut:
 - a. tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025 yang diselaraskan dengan target pertumbuhan ekonomi;
 - b. tercapainya penurunan intensitas energi final sebesar 1 (satu) persen per tahun pada tahun 2025;
 - c. tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 85% pada tahun 2015 dan mendekati sebesar 100% pada tahun 2020;
 - d. tercapainya rasio penggunaan gas

- rumah tangga pada tahun 2015 sebesar 85%;
- e. terpenuhinya sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi, melalui peningkatan penyediaan energi pada tahun 2025 sebesar 400 MTOE dan pada tahun 2050 menjadi sebesar 1000 MTOE; peningkatan pemanfaatan energi primer per kapita pada tahun 2025 sebesar 1,4 TOE per kapita dan pada tahun 2050 menjadi sebesar 3,2 TOE per kapita; peningkatan penyediaan kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2025 sebesar 115 GW dan pada tahun 2050 menjadi sebesar 430 GW; peningkatan penggunaan listrik per kapita pada tahun 2025 sebesar 2500 KWh dan pada tahun 2050 menjadi sebesar 7000 KWh;
 - f. tercapainya bauran energi primer yang optimal: pada tahun 2025 pangsa EBT mencapai paling sedikit 25%, dan pada

tahun 2050 paling sedikit 40%. Mengurangi penggunaan minyak bumi, menjadi lebih kecil dari 25% pada tahun 2025 dan lebih kecil dari 20% pada tahun 2050. Batubara masih menjadi andalan dalam penyediaan energi nasional, dengan pangsa yang relatif tetap, yaitu pada tahun 2025 minimal sebesar 30% dan pada tahun 2050 minimal sebesar 25%, apabila ketersediaan energi bersih belum mencapai sasaran. Penggunaan gas bumi didorong secara optimal, menjadi minimal 20% pada tahun 2025, dan minimal 15% pada tahun 2050, apabila ketersediaan energi bersih belum mencapai sasaran.

4. Untuk mencapai tujuan dan sasaran KEN, arah kebijakan energi meliputi:
 - a. Ketersediaan energi;
 - b. Prioritas penyediaan energi;
 - c. Pemanfaatan sumber daya energi;
 - d. Cadangan energi nasional;
 - e. Konservasi dan diversifikasi;

- f. Lingkungan dan keselamatan;
 - g. Harga, subsidi dan insentif energi;
 - h. Infrastruktur dan industri energi;
 - i. Penelitian dan pengembangan energi;
 - j. Kelembagaan dan pendanaan.
5. Rancangan Kebijakan Energi Nasional ini akan segera disampaikan kepada DPR-RI untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditetapkan Pemerintah.
 6. Kebijakan Energi Nasional akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

Kepala Biro Fasilitas Kebijakan Dan Persidangan

Farida Zed

<http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/5535-sidang-paripurna-ke-1-dewan-energi-nasional.html>

2012

Pemerintah Bangun 16.000 Jaringan Gas Rumah Tangga

Kamis, 05 April 2012

TEMPO.CO, Cirebon - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memasang 16 ribu jaringan gas bumi untuk rumah tahun ini. Namun pengembangan jaringan gas bumi masih terkendala persetujuan dana.

Hal tersebut diungkapkan Plt Direktur Usaha Hilir Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Nunuk Wiryawan, Kamis, 5 April di Cirebon. "Tahun ini dianggarkan pemasangan 16 ribu sambungan rumah baru," katanya seusai serah terima lapangan pembangunan distribusi jaringan gas bumi untuk rumah di Balai Kota Cirebon.

Pemasangan tersebut tersebar di lima daerah, masing-masing Kota Cirebon, Bogor, Prabumulih, Jambi, dan Sidoarjo. "Total dana yang dianggarkan sebesar Rp 230 miliar," katanya. Untuk Kota Cirebon akan dipasang jaringan distribusi gas bumi sebanyak 4.000 sambungan rumah di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Kalijaga,

Argasunya, dan Harjamukti.

Pembangunan jaringan distribusi gas bumi di lima kota ini, menurut Nunuk, akan dilakukan serentak mulai April hingga Desember tahun ini. "Jika gasnya sudah siap, bisa langsung digunakan pada Desember," katanya.

Ditambahkan Nunuk, pemerintah akan terus melakukan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah sebanyak-banyaknya. "Sejak 2009 sudah ada sekitar 30 ribu sambungan rumah di beberapa daerah di Indonesia," katanya.

Tujuannya, menurut Nunuk, tidak lain untuk mengurangi subsidi BBM serta mengurangi ketergantungan pada minyak tanah dan LPG pada sektor rumah tangga dan pelanggan kecil.

Saat ditanyakan daerah mana saja yang menjadi prioritas untuk pembangunan jaringan gas bumi, Nunuk menjelaskan yang menjadi prioritas adalah daerah yang memiliki sumber gas bumi. "Daerah-daerah

itulah yang menjadi prioritas," kata dia.

Daerah-daerah itu diprioritaskan dengan alasan penghematan karena jaringan yang dibangun tidak terlalu panjang. "Namun setiap tahun memang banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki sumber gas bumi yang meminta pembangunan jaringan ini," katanya.

Wali Kota Cirebon, Subardi, menyambut baik adanya pemasangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Kota Cirebon. "Walaupun memang alokasi yang dianggarkan masih jauh dari yang kami minta," katanya.

Sebelumnya Pemkot Cirebon meminta jaringan gas bumi untuk 12 ribu pelanggan, tapi yang disetujui ternyata hanya 4.000. "Kami tetap berharap agar tahun depan bisa disetujui lagi 4.000 lagi. Begitu juga tahun berikutnya, sehingga bisa terpasang sebanyak 12 ribu," katanya.

IVANSYAH

<http://www.tempo.co/read/news/2012/04/05/090394997/Pemerintah-Bangun-16000-Jaringan-Gas-Rumah-Tangga>

Sambungan Jaringan Gas Rumah Tangga

Jumat, 04 Mei 2012

Pada 2012 ini, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, ESDM, menganggarkan Rp 230 milyar untuk pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga di 5 wilayah, yaitu Prabumulih, Jambi, Cibinong, Cirebon, dan Kalidawir. "Jaringan gas bumi untuk rumah tangga merupakan program nasional yang harus disukseskan bersama. Utamanya adalah dalam rangka mencapai kemandirian energi daerah di dalam penyediaan energinya sendiri," tutur Dirjen Migas, Evita Herawati Legowo, dalam rapat kerja dengan Wali Kota Palembang, Surabaya, dan Tarakan, Selasa, 31 Januari 2012.

Tahun 2011 yang lalu, jaringan distribusi gas bumi telah dibangun di Kota Bontang, Sengkang, Rusun Jabodetabek, Bekasi tahap II, dan Sidoarjo tahap II, sebanyak 25.000 sambungan rumah.

Setiap tahunnya, pemerintah menargetkan

sambungan rumah tangga untuk empat desa di dua wilayah kota atau dua kabupaten. Untuk tahun 2012 ini, pemerintah menargetkan 16.000 sambungan rumah tangga di lima wilayah, dengan target sekitar 3000-4000 sambungan per kelurahan. "Kebutuhan investasi untuk pembangunan jaringan gas kota di lima wilayah tersebut Rp 230 milyar atau sekitar 40-50 milyar per kota (dua kelurahan)," lanjut Dirjen Migas.

Untuk memasok gas ke lima kota tersebut, tiga perusahaan migas akan memasok gas sebanyak 4,7 MMSCFD dengan suplai dari PT Medco EP sebesar 0,7 MMSCFD, PT Lapindo sebesar 2 MMSCFD, dan PT Pertamina EP sebesar 2 MMSCFD.

Sebelumnya, mulai 2009 PT Perusahaan Gas Negara Tbk sudah menggelar program serupa. Namun, karena margin usaha yang kecil, akhirnya dikembalikan ke

pemerintah. "Dulu PGN awal-awalnya bangun, tapi karena PGN sekarang Tbk, maka keuntungannya harus lebih besar, maka dikembalikan ke pemerintah," papar Evita.

Saat ini masih ada keluhan dari BUMD yang mengelola jaringan gas di daerah karena adanya sistem take or pay (TOP). Dengan adanya sistem itu, BUMD tersebut harus membayar total gas sebanyak 2 MMSCFD yang sudah disediakan. Padahal yang dipakai hanya sekitar 0,5 MMSCFD. Akibatnya, BUMD cenderung merugi.

Sumber: sentanaonline, bisnis, esdm.

<http://majalahenergi.com/nasional/sambungan-jaringan-gas-rumah-tangga>

2013

Wamen ESDM Resmikan Pengaliran Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Bontang Rabu, 30 Januari 2013

Bontang. Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo meresmikan pengaliran gas bumi melalui pipa untuk rumah tangga di Kabupaten Bontang, Rabu (30/1). Sebanyak 3.960 sambungan rumah dialiri gas bumi yang pasokannya berasal dari Total E&P Indonesia dan Inpex Corp dari Blok Mahakam sebesar 1.500 MMBTU per hari, terhitung 28 Januari 2013 sampai berakhirnya kontrak KKKS Mahakam di Tahun 2013.

Tampak hadir pada peresmian tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk, Walikota Bontang Adi Darma, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Umi Asngadah, Kepala Pusat Informasi ESDM Ego Syahrial dan Kepala Biro Perencanaan ESDM Rida Mulyana serta Direktur Gas BPH Migas Hendra Fadly.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas

Umi Asngadah dalam laporannya mengemukakan, pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga, dilakukan dalam rangka implementasi program diversifikasi energi dan upaya pengurangan subsidi BBM.

“Jaringan gas bumi ini dilakukan di beberapa kota atau kabupaten yang memiliki sumber gas atau dekat dengan pipa gas bumi,” katanya.

Pembangunan jaringan gas pipa telah dilaksanakan sejak 2009 dengan jumlah masyarakat penerima sebanyak 57.000 kepala keluarga yaitu di Palembang (3.311 sambungan rumah), Surabaya (2.900 SR), Sidoarjo (8.647 SR), Depok (4.000 SR), Tarakan (3.666 SR), Bekasi (4.628 SR), Bontang (3.960), Sengkang (4.172 SR), Rusun Jabodetabek (5.234 SR), Prabumulih

(4.650 SR), Jambi (4.000 SR), Bogor (4.000 SR) dan Cirebon (4.000 SR).

Tahapan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga terdiri dari perencanaan meliputi pembuatan feasibility study oleh BPH Migas, kemudian ditindaklanjuti oleh Ditjen Migas yaitu melakukan koordinasi dengan para KKKS untuk mendapatkan pasokan gas bumi sekaligus juga pemilihan lokasi tapping pipa.

“Selain itu, melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota untuk mendapatkan desa/kelurahan terpilih dan pembuatan desain berupa FEED/ DEDC termasuk calon pelanggan,” tambahnya.

Tahap selanjutnya adalah konstruksi dan pengoperasian melalui pemilihan operator dimana BUMD mendapatkan

prioritas pengelolaan jaringan gas tersebut.

Pengaliran gas bumi untuk rumah tangga Kota Bontang merupakan kota ke 7 dari 13 kota yang sudah selesai dikonstruksi. Ditargetkan ke 6 kota lainnya dapat dioperasikan pada awal 2013 ini.

Dalam kesempatan peresmian ini, Gubernur Awang Farouk mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ESDM karena telah membangun jaringan gas di daerahnya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Bontang.

Sementara kepada Walikota Bontang, ia berpesan agar pengelolaan jaringan gas bumi oleh BUMD dapat dilaksanakan dengan baik serta dikembangkan lebih lanjut.

<http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigas/detail/3041/Wamen-ESDM-Resmikan-Pengaliran-Gas-Bumi-Untuk-Rumah-Tangga-di-Bontang>

Siapkan Rp 250 Miliar, Pemerintah Bangun Jaringan Gas Kota di 5 Kota Ini

Rabu, 30 Januari 2013

Bontang -Kementerian ESDM akan membangun jaringan gas kota di 5 kota baru tahun ini, mengikuti Bontang, Kalimantan Timur yang diresmikan hari ini. Apa kelima kota tersebut?

Direktur Pembinaan Hilir Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Umi Hasnadah mengatakan, lima kota tersebut adalah Sorong (Papua), Subang (Jawa Barat), Ogan Ilir (Palembang), Blora (Jawa Tengah), dan Sidoarjo (Jawa timur).

“Lima kota itu targetnya,” kata Umi di Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (30/1/2013).

Program ini memakan anggaran Rp 250 miliar yang didapat dari APBN 2013. Umi menyatakan, dalam roadmap yang disusun, jaringan gas kota di 5 kota tersebut akan aktif

beroperasi di awal 2014.

“Dibangun melalui APBN, jadi harus selesai 31 Desember 2013. Tahun depan itu bisa dialiri gasnya,” ujar Umi.

Prosesnya, BPH Migas akan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu. Kemudian Ditjen Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) akan memastikan pasokan gas bumi. Selanjutnya, pembuatan disain berupa FEED/DEDC termasuk calon pelanggan. Tahap konstruksi dan penentuan operator.

“Tahap konstruksi akan selesai dalam waktu 8 bulan. Kemudian, dilakukan proses lelang untuk menentukan operator,” sambungnya.

la menambahkan, pihak penyalur gas sejauh ini sudah menyatakan sepakat

2013

untuk menyalurkan gasnya. Sorong akan dialiri gas dari Petrocina Kepala Burung. Subang dialiri gas dari Pertamina EP Region Jawa, Ogan Ilir mendapat gas dari Pertamina EP Regio Sumatera bagian Selatan, dan Bloro mendapat gas dari Pertamina EP Cepu.

“Dari KKKS, itu sudah ada komitmen,” terangnya. Umi menjelaskan, untuk daerah yang ingin memiliki jaringan gas kota, sebaiknya berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk merundingkan proyek ini.

“Dia harus kordinasi dengan Dirjen Migas, dan mereka juga harus mendukung perizinan, kontruksinya kan cukup panjang,” tutupnya.

<http://finance.detik.com/read/2013/01/30/171549/2156710/1034/2/siapkan-rp-250-miliar-pemerintah-bangun-jaringan-gas-kota-di-5-kota-ini>

Pembangunan Jaringan Gas Butuh Dukungan Pemda

Senin, 4 Februari 2013

Sejak tahun 2009, Pemerintah telah membangun jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga di sejumlah kota. Bagi daerah yang ingin memperoleh fasilitas ini, dapat berkoordinasi dengan Kementerian ESDM cq Ditjen Migas. Selain pasokan gas, Pemerintah juga memerlukan dukungan perijinan dari Pemda.

“Daerah bisa koordinasi dengan Kementerian ESDM. Sampaikan keinginannya (untuk dibangun jaringan gas). Pemda juga harus mendukung perijinan. Kalau nggak, kan susah,” kata Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Umi Asngadah, di Bontang, pekan lalu.

Menurut Umi, tanpa adanya dukungan perijinan dari Pemda, maka pembangunan jaringan gas tidak akan berjalan lancar. Padahal, pembangunan

jaringan harus selesai dalam waktu 1 tahun atau paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun tersebut.

Dukungan lain yang dibutuhkan adalah adanya pasokan gas. Setelah dukungan perijinan dan pasokan gas diperoleh, maka Pemerintah kemudian akan menjajaki kemungkinan pembangunannya. Jika dari hasil identifikasi tersebut jaringan gas dapat dibangun, maka pembangunan dapat dilaksanakan. Sebaliknya jika tidak memungkinkan, maka jaringan gas akan dialihkan ke kota lainnya. Sebagai contoh, Pemerintah tidak dapat membangun jaringan gas di Samarinda karena sumber gasnya terlalu jauh. Sementara di Lampung dan Semarang, ketiadaan pasokan gas membuat kota itu tidak dapat dibangun jaringan gas.

Untuk tahun ini, Pemerintah akan membangun jaringan gas di Sorong, Subang, Ogan Ilir dan Blora, dengan biaya sekitar Rp 250 miliar. Diharapkan pada awal tahun depan, gas sudah dapat dinikmati masyarakat.

Terkait rencana pembangunan itu, saat ini Pemerintah tengah menyiapkan proses lelang pembangunan konstruksinya. Diharapkan dalam 2 bulan ke depan, pembangunan sudah dapat dilaksanakan..

Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga dilakukan dalam rangka implementasi program diversifikasi energi dan upaya pengurangan subsidi BBM. Jaringan gas bumi ini dilakukan di beberapa kota atau kabupaten yang memiliki sumber gas atau dekat dengan pipa gas bumi.

Pembangunan jaringan gas pipa telah

dilaksanakan sejak 2009 dengan jumlah masyarakat penerima sebanyak 57.000 kepala keluarga yaitu di Palembang (3.311 sambungan rumah), Surabaya (2.900 SR), Sidoarjo (8.647 SR), Depok (4.000 SR), Tarakan (3.666 SR), Bekasi (4.628 SR), Bontang (3.960), Sengkang (4.172 SR), Rusun Jabodetabek (5.234 SR), Prabumulih (4.650 SR), Jambi (4.000 SR), Bogor (4.000 SR) dan Cirebon (4.000 SR). (Tursilowulan)

<http://www.migas.esdm.go.id/wap/?top=Berita&id=3049>

Pemkot Palembang Perluas Jaringan Gas Kota

Rabu, 8 Mei 2013

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan segera memperluas jaringan gas kota ke sejumlah usaha kecil menengah yang sebelumnya baru melayani rumah tangga.

Manager Badan Pengelola Jaringan Gas Kota PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J), Syamsu Bunyamin, Selasa mengatakan perluasan pelanggan gas kota itu sebagai upaya meningkatkan pelayanan guna mendongkrak omzet dari pendapatan penjualan bahan bakar itu.

Namun, perluasan untuk kebutuhan rumah tangga juga tetap mereka lakukan, katanya.

2013

Menurut dia, PT SP2J sebagai salah satu perusahaan daerah milik pemkot setempat sejak tahun 2010 telah mengelola jaringan gas kota.

Kelurahan Lorok Pakjo dan Siring Agung merupakan kawasan yang menjadi percontohan program gas kota secara nasional.

Ia mengatakan, jaringan gas kota ini merupakan salah satu program dari Kementerian ESDM untuk memberikan fasilitas bahan bakar pengganti minyak yang murah dan aman.

Setelah pembangunan jaringan sampai ke rumah tangga, pengelolaan gas kota diserahkan ke PT SP2J.

Dia menjelaskan, 3.655 pelanggan gas kota di Palembang telah menikmati bahan bakar murah pengganti minyak tanah.

Sebanyak 15 unit pelanggan diantaranya adalah usaha kecil menengah yang bergerak di berbagai bidang usaha.

Syamsu menambahkan, saat ini omzet penjualan gas alam itu mencapai Rp230 juta per bulan dengan keuntungan kisaran Rp15 juta.

Karena itu, perluasan sasaran pelanggan jaringan gas kota mereka targetkan ke usaha kecil menengah untuk meningkatkan omzet dan keuntungan.

Sementara Tiwi (25) pengguna gas kota mengatakan sangat diuntungkan dengan pemasangan jaringan gas sampai ke rumahnya karena tarifnya sangat murah.

Dengan gas alam pengeluaran dana

untuk bahan bakar hanya sekitar Rp23.000 per bulan sangat murah dibandingkan menggunakan elpiji setidaknya butuh Rp85.000 per bulan atau satu tabung isi 12 kilogram, katanya.

<http://palembang.tribunnews.com/2013/05/08/pemkot-palembang-perluas-jaringan-gas-kota>

Jaringan Distribusi Gas Bumi di Jateng Segera Dikembangkan

18 Maret 2013

Semarang, Suaramerdeka.Com - PT Perusahaan Gas Negara berencana mengembangkan jaringan distribusi gas bumi di Jawa Tengah, sepanjang 350 kilometer mulai tahun 2013 hingga 2019 mendatang.

Dikatakan General Manager Sbu Distribution li Vice President PT Perusahaan Gas Negara-PGN, Wahyudi, pada tahap awal nantinya, pihaknya akan membangun jaringan pipa di wilayah Semarang sepanjang 45 km, yang diharapkan selesai tahun 2015 mendatang.

Pengembangan jaringan gas tersebut, ditujukan untuk melayani pelanggan industri dan komersial seperti hotel, mall, apartemen, restoran hingga rumah tangga.

“Di kota Semarang sendiri, kami tengah melakukan *survey* dan ternyata terjangkau

masyarakat daripada menggunakan gas LPG, “ungkapnya.

Selain di Semarang, hingga tahun 2019 mendatang, jaringan gas juga akan di kembangkan ke kota lainnya seperti Kudus, Kendal, Ungaran dan Solo Raya.

Adanya jaringan gas ini, pihaknya berencana akan mengakselerasi pertumbuhan industri, penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan daya saing industri di provinsi Jawa Tengah.

“Untuk kebutuhan pasokan gas, kami akan mengambil dari blok-blok potensial di wilayah Semarang dan sekitarnya seperti Blok Cepu serta Blok Kepodang,” imbuh Wahyudi.

(Maya / cn19 / jbsm)

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/03/18/149446/Jaringan-Distribusi-Gas-Bumi-di-Jateng-Segera-Dikembangkan>

Menteri ESDM Dukung Penyediaan Gas Rumah Tangga, Listrik dan Air Tanah Perumahan Bagi MBR

Selasa, 01 Mei 2012

Jakarta. Sebagai bentuk dukungan peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Jero Wacik menandatangani MoU dengan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz tentang Percepatan Pemenuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan membantu penyediaan tenaga listrik, gas rumah tangga, dan pengeboran air tanah.

Penandatanganan dilakukan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (30/4) petang, disaksikan oleh Menko Perekonomian Hatta Radjasa dan pejabat lainnya. Pada kesempatan tersebut,

2013

ditandatangani pula MoU antara Menpera dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto mengenai Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Program Pengembangan Perumahan Rakyat.

Menteri ESDM menyambut baik penandatanganan MoU ini dan berharap agar kerja sama ini dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Ia telah meminta Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirut PT PLN untuk bekerja cepat dan tidak mempersulit pelaksanaan program tersebut.

“Ini agar masyarakat pekerja itu lebih sejahtera, lebih murah dapat rumahnya,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, dengan MoU yang

diperkuat Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian ESDM dan Kepala BPN ini, maka kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah akan perumahan, air bersih dan listrik dapat terpenuhi dengan biaya murah. Bahkan kalau perlu, lanjutnya, biaya sambungan listrik maupun air ini digratiskan sebagai bentuk CSR perusahaan baik BUMN maupun swasta.

<http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigas/detail/2718/Menteri-ESDM-Dukung-Penyediaan-Gas-Rumah-Tangga,-Listrik-dan-Air-Tanah-Perumahan-Bagi-MBR>

Gas, Era Baru Indonesia

Senin, 06 Mei 2013

JAKARTA - Setelah sekian lama bergantung pada minyak bumi, Indonesia memasuki babak baru yaitu era gas. Produksi minyak bumi yang terus merosot, menjadikan gas sebagai komoditas yang paling diburu saat ini. Gas menjadi salah satu andalan pendapatan negara dan penggerak perekonomian.

Hal itu diutarakan Dirjen Migas Kementerian ESDM A. Edy Hermantoro pada pembukaan Regional Workshop on The Changing Global Gas Market and Unconventional Gas di Hotel Gran Melia, Senin (6/5).

Dituturkan Edy, produksi minyak Indonesia pada tahun 1970-an mencapai lebih dari 1 juta barel per hari dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor minyak. Saat itu, gas belum menjadi salah

satu sumber daya alam yang dilirik. Situasinya kini berubah. Produksi gas terus meningkat, seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memerlukan banyak gas.

“Untuk memenuhi kebutuhan energi, Pemerintah Indonesia mengembangkan gas konvensional maupun non-konvensional seperti gas metana batubara (CBM) dan shale gas,” ujar Edy.

Produksi gas Indonesia, selain digunakan untuk ekspor, juga memenuhi kebutuhan dalam negeri. Prosentase gas untuk domestik tahun 2012 mencapai 45,4%, sedangkan ekspor 46,2%.

Produksi gas untuk domestik, selain untuk industri, juga digunakan untuk listrik, transportasi dan rumah tangga.

Khusus pengembangan gas non-konvensional seperti CBM, sumber

daya Indonesia termasuk peringkat 5 dunia dengan jumlah lebih dari 450 TCF. Hingga saat ini, telah ditandatangani 54 kontrak kerja sama CBM.

Sementara untuk shale gas, kontrak kerja sama pertamanya akan dilakukan pada pertengahan Mei 2013, pada ajang Konvensi dan Konferensi IPA ke 37 di Jakarta Convention Centre.

Dalam mengembangkan gas non-konvensional ini, diperlukan dukungan teknologi, infrastruktur dan investasi dari dalam dan luar negeri. Untuk itu, pemerintah memberikan insentif dan bagi hasil yang menarik serta berbagai kebijakan yang ramah kepada investor (TW).

<http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/6278-gas-era-baru-indonesia.html>

Beralih ke Gas, Pemerintah Laksanakan Berbagai Program

Selasa, 14 Mei 2013

JAKARTA - Untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak, Pemerintah Indonesia berupaya beralih ke gas melalui berbagai program yaitu konversi minyak tanah ke LPG, pembangunan pipa gas untuk rumah tangga serta konversi dari BBM ke bahan bakar gas untuk kendaraan dinas pemerintah, pemda dan angkutan umum. Pada tahun ini, rencananya akan dibangun SPBG dan pembagian konverter kit.

Hal itu dipaparkan Dirjen Migas Kementerian ESDM A. Edy Hermantoro pada acara US-ASEAN Workshop on Vehicle Fuel Efficiency di Hotel Sahid, Senin (13/5). Hadir dalam kesempatan tersebut, Director of European and Asia Pacific Affairs, US Department of Energy, Tom Cutler.

2013

Program konversi BBM ke LPG telah dibagikan 53 juta paket perdana. Untuk menyelesaikan konversi ke seluruh Indonesia, masih dibutuhkan sekitar 3,4 juta paket lagi. Program ini menghemat uang negara sebesar Rp 85 triliun.

Sementara untuk pembangunan pipa gas untuk rumah tangga, tak kurang dari 70.000 pipa sambungan telah terpasang yaitu Palembang, Surabaya, Sidoarjo, Depok, Bekasi, Tarakan, Sengkang, Bontang, Rusun Jabodetabek, Prabumulih, Jambi, Sorong, Blera, Ogan Ilir dan Subang.

Terkait konversi dari BBM ke bahan bakar gas, menurut Edy, hingga saat ini telah dipasang konverter kit di 5.000 kendaraan. Ini menghemat uang negara sebesar Rp 270 miliar per tahun.

“Pemerintah Indonesia tahun ini akan mengembangkan program konversi ke

bahan bakar gas dengan membangun SPBG dan membagikan konverter kit ke kendaraan dinas,” tambahnya.

Konversi BBM ke bahan bakar gas harus dilakukan karena peningkatan konsumsi BBM di sektor transportasi meningkat sekitar 8-12% per tahun. Oleh karena itu, efisiensi bahan bakar akan berdampak terhadap efisiensi BBM nasional. (TW)

<http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/6284-beralih-ke-gas-pemerintah-laksanakan-berbagai-program.html>

Harga Jual Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Kota Jambi US\$ 3,37 per MMBTU

Selasa, 28 Mei 2013

Jakarta. Menteri ESDM Jero Wacik menetapkan Kepmen ESDM No 2286 K/12/MEM/2013 tentang Harga Jual Gas Bumi Untuk Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Kota Jambi, tanggal 14 Mei 2013.

Ditetapkan bahwa harga jual gas bumi untuk jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga Kota Jambi yang bersumber dari JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang sebesar US\$ 3,37 per MMBTU.

Terhadap harga jual gas bumi untuk jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga Kota Jambi, diberlakukan eskalasi sebesar 3% per tahun.

Aturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

[http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigas/detail/3210/Harga-Jual-Gas-Bumi-Untuk-Rumah-Tangga-Kota-Jambi-US\\$-3,37-per-MMBTU](http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigas/detail/3210/Harga-Jual-Gas-Bumi-Untuk-Rumah-Tangga-Kota-Jambi-US$-3,37-per-MMBTU)

Tahun 2014, Pemerintah Usulkan Rp 2,49 Triliun Untuk Infrastruktur Migas

Rabu, 05 Juni 2013

Jakarta. Pemerintah mengusulkan tambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur migas tahun 2014 sebesar Rp 2,49 triliun.

Anggaran infrastruktur migas sebesar Rp 2,49 triliun itu, papar Dirjen Migas Kementerian ESDM A. Edy Hermantoro usai Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (4/6), diusulkan akan digunakan untuk pembangunan sarana bahan bakar gas seperti infrastruktur pipa dan gas di Jabodetabek dan pembangunan SPBG CNG dan infrastruktur pipa di Batam dan Semarang.

“Rencananya akan dibangun pipa gas sepanjang 100 km lebih,” katanya. Dalam pengantar pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian

dan Lembaga (RKA KL) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) APBN Tahun Anggaran 2014, Selasa (4/6) sore, Menteri ESDM Jero Wacik, memaparkan, Kementerian ESDM mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 28,47 triliun, terdiri dari Rp 13,50 triliun untuk pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 11,60 triliun.

Usulan tambahan anggaran itu dibagi dua yaitu infrastruktur migas dan kegiatan pendukung sebesar Rp 2,49 triliun dan infrastruktur kelistrikan Rp 9,11 triliun. (tw)

<http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigas/detail/3215/Tahun-2014,-Pemerintah-Usulkan-Rp-2,49-Triliun-Untuk-Infrastruktur-Migas>

2013

Tahun 2014, Pemerintah Akan Bangun Jaringan Pipa Gas Lagi

Kamis, 20 Juni 2013

Jakarta. Pemerintah telah bertekad akan membangun jaringan pipa gas secara masif. Tahun ini, akan dibangun pipa sepanjang 22,2 km di ruas Nagrak-Bitung. Pembangunan pipa akan dilanjutkan tahun depan oleh Ditjen Migas dan PT Pertamina dengan menggunakan dana APBN.

“Jaringan pipa akan ditambah terus,” ungkap Dirjen Migas Kementerian ESDM A. Edy Hermantoro di Hotel Aryaduta, kemarin.

Besaran biaya pembangunan jaringan pipa ini, lanjut Edy, belum dapat diketahui karena masih dalam pembahasan dengan DPR.

Selain membangun jaringan pipa, Kementerian ESDM juga berencana

menambah jumlah SPBG. Untuk Jabodetabek, rencananya akan dibangun 2 unit SPBG dan 4 unit Mobile Refuelling Unit (MRU). SPBG CNG juga akan dibangun di Semarang sebanyak 3 unit dan 3 unit mobile storage.

PT Pertamina dengan menggunakan dana APBN juga akan membangun beberapa SPBG, MRU dan jaringan pipa distribusi.

Pada tahun ini, Kementerian ESDM dan PT Pertamina juga membangun 8 SPBG CNG dan 4 MRU.

<http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigas/detail/3232/Tahun-2014,-Pemerintah-Akan-Bangun-Jaringan-Pipa-Gas-Lagi>

Warga Subang Dapat Jaringan Gas Rumahan Gratis

Rabu, 03 Juli 2013

TEMPO.CO, Subang - Sebanyak 4.000 kepala keluarga (KK) di wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat, mendapatkan layanan jaringan gas rumah tangga gratis dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). “Pembangunan jaringan infrastruktur sampai ke rumah-rumah warga dipastikan tuntas 31 Desember 2013. Tapi, pengoperasiannya baru bisa dilakukan 2014,” kata Direktur Pengelolaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, Umi Asnadah, kepada Tempo, di Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Rabu, 3 Juli 2013.

Menurut dia, penggratisan program jaringan gas untuk rumah tangga tersebut, hanya dalam pengadaan

fasilitasnya saja. Ada pun pemakaian gasnya, tetap bayar, tetapi harganya murah. Jika biaya pemasangan jaringan gas rumah tangga itu dibebankan kepada setiap warga, nilainya mencapai Rp 5 juta per rumah. Untuk seluruh biaya pemasangan jaringan 4.000 KK menghabiskan dana Rp 41 miliar.

Asnadah mencontohkan, di Kabupaten Tarakan yang sudah menikmati program jaringan gas rumah tangga, warga hanya membayar pemakaian gas per bulan tiga dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 30 ribu. Pertamina telah menyiaipkan 0,5 MMSCFD untuk memasok kebutuhan gas kepada 4.000 kepala keluarga di Subang. "Cadangan gas sebanyak itu, bisa dimanfaatkan buat 20 ribu sambungan ke rumah warga," kata Asnadah.

Artasih, seorang warga Desa Cidahu, mengungkapkan rasa senangnya.

"Berarti, nanti nggak masak pakai tungku dan kayu bakar lagi," kata ibu tiga anak itu.

Kecuali Subang, di Jawa Barat, warga yang sudah menikmati fasilitas jaringan gas rumah tangga itu yakni Kabupaten Bekasi untuk 4.100 KK dan Kota Depok untuk 4.000 KK.

Kepala Dinas ESDM Kabupaten Subang, Besta Besuki, menyatakan, 4.000 KK yang mendapatkan giliran pemasangan jaringan gas rumah tangga gratis itu baru di Desa Cidahu dan Dangdeur. "Kami meminta, proyek pro rakyat itu, ke depan bisa menjangkau 60 ribu KK yang tersebar di 60 desa," ujar Besta.

Bupati Subang, Ojang Sohandi, meminta pihak Kementerian ESDM menetapkan harga bersama melalui peraturan daerah (Perda). "Kami minta, harga gasnya bisa lebih murah dari harga HET gas elpiji tiga

kilogram. Atau, maksimal sama dengan Kabupaten Tarakan, Rp 30 ribu per bulan," ucap dia. **NANANG SUTISNA**

<http://www.tempo.co/read/news/2013/07/03/058493180/Warga-Subang-Dapat-Jaringan-Gas-Rumahan-Gratis>

2013

Kerugian dalam Program City Gas Diantisipasi

18 Juli 2013

BLORA, suaramerdeka.com - Gas yang akan dialirkan ke rumah-rumah warga dalam program city gas dipastikan harganya lebih murah dibanding gas elpiji. Pemkab Bloro maupun Badan Usaha Milik Daerah PT Bloro Patra Energi (BPE) yang akan mengelola city gas harus siap-siap tidak mendapatkan profit dari penjualan gas city gas tersebut.

Namun langkah antisipasi disiapkan agar tidak merugi. Caranya antara lain dengan meminta Pertamina tidak mengharuskan BUMD membeli semua alokasi gas city gas, tetapi hanya pemakaian gas saja yang dirupiahkan.

“Jadi yang dihitung hanya gas yang dipakai rumah tangga dalam city gas. Memang hal ini tidak lazim dalam dunia bisnis gas, tapi akan kami

upayakan pengajuan ke Pertamina,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT BPE, Christian Prasetya, Kamis (18/7).

City gas akan dilaksanakan di Bloro tahun 2014 di Kecamatan Kradenan dan sekitarnya. Pembangunan infrastruktur jaringan gas (jargas) ke rumah warga di ring I Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) mulai dilakukan. Gas yang akan dipakai dalam city gas adalah bagian kecil dari gas yang dihasilkan dalam proyek PPGJ di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan.

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyerahkan lapangan pembangunan pipa transmisi gas bumi dan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga, kepada kontraktor, Rabu (17/7).

Pembangunan jargas dijadwalkan selesai Desember 2013. Sehingga pada 2014 program city gas sudah bisa dilaksanakan. Melalui program city gas tersebut warga akan bisa memakai gas tak ubahnya seperti pemakaian air bersih yang disalurkan melalui pipa oleh PDAM ke rumah-rumah.

Di tahap awal dibangun jargas untuk 4.000 kepala keluarga (KK) di ring I proyek PPGJ. Selain masyarakat di Desa Sumber Kecamatan Kradenan, warga yang nantinya akan bisa menikmati pasokan gas dengan harga murah itu antara lain mereka yang berdomisi di Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan, Desa Wado, Desa Kemantren, Desa Pulo dan Desa Tanjung Kecamatan Kedungtuban serta Desa Kapuan Kecamatan Cepu. Untuk memenuhi kebutuhan gas warga akan dipasok gas sebanyak 0,02 juta kaki kubik perhari.

“City gas ini adalah proyek sosial.

Tapi kami juga tidak mau hanya melaksanakan program city gas saja. Karena itu dalam pengajuan awal ke pemerintah, kami juga minta bagian gas PPGJ untuk komersial,” tandas Christian Prasetya.

Pengajuan itupun dipenuhi pemerintah. Blora mendapat alokasi sekitar 4 juta kaki kubik (mmscf). Gas tersebut akan dijual kepada perusahaan industri, termasuk mendirikan stasiun pengisian bahan bakar gas.

“Dari situlah keuntungan bisa diperoleh. Keuntungan itu nantinya antara lain dipakai untuk operasional city gas,” kata Christian yang juga menjabat direktur utama PT Blora Patragas Hulu. (Abdul Muiz / CN19 / SMNetwork)

<http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/07/18/165025>

Wamen ESDM Resmikan Jaringan Gas di Sumsel

Senin, 22 Juli 2013

Prabumulih, GATRAnews - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meresmikan 4.600 sambungan gas untuk rumahtangga di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.

“Jaringan gas rumah tangga ini merupakan program dari pemerintah dalam rangka menggalakkan program konversi BBM ke gas, karena pemanfaatan gas lebih bersih, lebih efisien ramah lingkungan dan lebih murah,” ujar Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, dalam keterangan tertulis yang diterima GATRAnews, di Jakarta, Senin (22/7).

Program ini lanjut Wamen, merupakan program pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap

minyak bumi dan ini merupakan salah satu usaha pemanfaatan gas bumi untuk lebih optimal, selain gas untuk transportasi, pembangkit, dan industri.

Program konversi BBM ke gas untuk rumahtangga merupakan salah satu program prioritas nasional Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dengan pilot project di Kota Palembang dan Surabaya.

Hingga 2012, pemerintah telah membangun jaringan gas kota diberbagai wilayah Indonesia sejumlah 56.000 sambungan rumah. Tahun ini akan dilaksanakan pembangunan di kota Subang, Sidoarjo, Ogan Ilir, Blora dan Sorong.

2013

Guna menyukseskan program ini, pemerintah juga telah meminta kepada para pengusaha dan produsen gas bumi untuk dapat bekerja sama dengan menyisihkan sebagian kecil produksi gasnya, karena secara volume kebutuhannya tidak besar yaitu sekitar 0.5 mmscf/d untuk lebih dari 20.000 sambungan rumah.

“Program pembangunan jaringan distribusi gas bumi ini juga memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan instansi-instansi lain terkait untuk tetap berkoordinasi dan memberikan informasi sejelas-jelasnya khususnya bagi masyarakat yang akan menggunakan energi gas bumi,” ujar Wamen. **(*/DKu)**

<http://www.gatra.com/ekonomi-1/35242-wamen-esdm-resmikan-jaringan-gas-di-sumsel.html>

ESDM bangun jaringan distribusi gas rumah tangga di 13 kota

Sabtu, 20 Juli 2013

Merdeka.com - Pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga diyakini sebagai energi alternatif yang sangat potensial karena lebih efektif dalam penggunaannya. Salah satu caranya dengan menyediakan jaringan untuk distribusi gas bumi ke rumah tangga. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari upaya pengurangan subsidi minyak.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Eddy Hermantono mengatakan, pihaknya menargetkan pembangunan pemasangan jaringan distribusi gas bumi sebanyak 57.000 sambungan gas rumah tangga (RT) yang akan tersebar di 13 kota yang dekat dengan sumber gas bumi. Prioritasnya yang telah ada jaringan transmisi gas bumi.

“Tahun ini kami akan melaksanakan pembangunan field (lapangan) di kota

Subang, Sidoarjo, Ogan Liir, Blora, Sorong, Semarang, Bekasi, Bulungan (Kalimantan Timur), Batam,” ujarnya saat acara “Peresmian Jaringan Gas Bumi Prabumulih” di Sumatera Selatan, Sabtu (20/7).

Menurutnya, wilayah yang sudah melakukan konstruksi adalah Sorong-Papua, Subang-Jawa Barat, Ogan Liir dan Blora.

“Tahun ini pembangunan pemasangan jaringan distribusi gas bumi sebanyak 57.000 sambungan gas rumah tangga. Rata-rata nantinya setiap kota dapat menyalurkan 4.650. Angka ini memang paket standarnya dan ini juga pancingan untuk masing-masing Pemda karena kalau punya dana lebih segar harus dibangun jaringan gas bumi. Lagian untuk membangun rumah tangga dananya tidak besar,” jelas dia.

Untuk rencana tahun depan, pihaknya akan membangun field di Cilegon, Tenggarong, Kalimantan Timur, Balikpapan, Samarinda, Muara Hilim, Lampung, Buleleng.

Pihaknya mengaku, makin gencarnya pembangunan jaringan gas ke rumah tangga agar konversi energi semakin lancar dan dapat tercapai.

“Sekitar 0,5 MMSCFD dapat menghemat untuk lebih dari 20.000 sambungan rumah. Dan juga tentunya dukungan penuh dari Pemda dan instansi lain akan tetap berkolaborasi untuk menggunakan energi gas bumi khususnya bagi masyarakat setempat,” tutup dia. [noe]

<http://www.merdeka.com/uang/esdm-bangun-jaringan-distribusi-gas-rumah-tangga-di-13-kota.html>

ESDM Perluas Penggunaan Gas Rumah Tangga

22 Juli 2013

Jakarta-TAMBANG. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memperluas jaringan gas bumi untuk rumah tangga. Kali ini sebanyak 4.600 sambungan rumah tangga di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan yang mendapatkan gilirannya.

Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo dalam keterangan persnya hari ini (22/7) mengatakan, perluasan jaringan gas tersebut merupakan program pemerintah untuk mendukung program konversi dari BBM ke gas. Selain itu, menurutnya, cara ini dianggap efektif bagi rumah tangga karena ramah lingkungan dan murah.

“Ini merupakan program pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi dan ini

merupakan salah satu usaha pemanfaatan gas bumi untuk lebih optimal selain gas untuk transportasi, pembangkit dan industri,” ujar Susilo.

Kementerian ESDM menjadikan program ini sebagai prioritas untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM. Pada 2009, proyek percobaan telah dilaksanakan, dimulai dari kota Surabaya dan Palembang. Hingga saat ini sudah terhitung sebanyak 56.000 sambungan rumah telah terpasang. Rencananya, tahun ini Kementerian ESDM akan kembali membangun di kota Subang, Sidoarjo, Ogan Ilir, Blora, dan Sorong.

Susilo menambahkan, pemerintah telah meminta kepada para pengusaha dan produsen gas bumi untuk dapat bekerjasama dengan menyisihkan sebagian kecil produksi gasnya. Hal tersebut dilakukan karena secara volume

2013

kebutuhannya tidak besar yaitu sekitar 0.5 mmscf untuk lebih dari 20.000 sambungan rumah.

Sri, salah satu warga yang menggunakan jaringan gas ini menuturkan, program ini membantu dirinya karena selain aman dalam penggunaannya harga jual gas bumi lebih murah jika dibandingkan dengan LPG. Seperti diketahui, harga yang ditetapkan pemerintah untuk di Prabumulih Rp 2.700 per kubik. Dengan ketentuan tersebut, rumah tangga dapat menghemat pengeluaran untuk bahan bakar hingga 50 persen karena masyarakat akan mengeluarkan ongkos untuk membayar gas kota sebulan hanya sekitar Rp 30.000.

“LPG 3 kg kadang sulit dicari, langka di pasaran sehingga harganya bisa mencapai Rp 25.000 per tabung,” ujar Sri.

vicharius
http://www.tambang.co.id/detail_berita.php?category=18&newsnr=7715

Kementerian ESDM Bangun Jaringan Pipa Gas Bumi Secara Masif

Minggu, 18 Agustus 2013,

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan meningkatkan pemanfaatan gas bumi dengan membangun jaringan baru secara masif, sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa menikmatinya.

Edy Hermantoro, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, mengatakan pihaknya akan memperbanyak jaringan gas untuk masyarakat di wilayah penghasil gas bumi. Dengan begitu, program konversi ke bahan bakar gas (BBG) dapat dilakukan secara optimal.

“Kami akan memperbanyak jaringan gas langsung ke masyarakat di wilayah penghasil gas bumi, atau yang telah ada infrastrukturnya, baik dengan biaya dari anggaran negara maupun swasta,” katanya di Jakarta, Minggu (18/8).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 2013 di Gedung DPR menegaskan perlunya mendorong penggunaan energi alternatif, seperti konversi ke BBG. Untuk itu, pemerintah akan membangun perluasan jaringan gas dan sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa.

Kementerian ESDM sendiri bertekad untuk menyelesaikan pembangunan pipa ruas Nagrak-Bitung sepanjang 22,2 kilometer. Pemerintah pun akan segera mendiskusikan pembiayaannya bersama DPR, setelah menyampaikan nota keuangan RAPBN 2014.

Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan akan mengusahakan penyelesaian jaringan pipa trans Jawa tahun depan. Artinya, pipa ruas Semarang-Gresik dan Semarang-Cirebon sudah siap

digunakan untuk mengalirkan gas dari sumber gas yang ada.

Lili Sunardi, Editor : Nurbaiti
<http://m.bisnis.com/industri/read/20130818/44/157350/kementerian-esdm-bangun-jaringan-pipa-gas-bumi-secara-masif>

Dorong Energi Alternatif, Pemerintah Perluas Jaringan Gas

Selasa, 20 Agustus 2013

Untuk menunjang program ketahanan energi, dalam pidato kenegaraan di DPR, Jumat (16/8), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan alokasi belanja negara akan disesuaikan dengan rencana investasi. SBY merasa bersyukur penyesuaian beban subsidi BBM dapat dialokasikan ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak.

“Kita sadar bahwa penggunaan energi alternatif harus didorong. Untuk itu, dalam hal ini konversi penggunaan gas akan dibangun perluasan jaringan gas dan sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa serta pembangunan kilang mini-plant LPG,” kata SBY.

Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto menyambut baik langkah pemerintah menetapkan konversi

energi sebagai prioritas nasional. Menurutnya, pemerintah harus mulai berpikir untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Oleh karena itu Dito mendukung langkah pemerintah untuk mengoptimalkan energi alternatif.

“Gas kan bentuk energi alternatif juga, harus terus didorong untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap energi fosil,” ujarnya.

Untuk menunjang ketahanan energi alternatif, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan meningkatkan pemanfaatan gas bumi. Upaya yang segera ditempuh adalah membangun jaringan baru secara masif, sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa menikmatinya.

Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan,

2013

akan mengusahakan penyelesaian jaringan pipa trans Jawa tahun depan. Artinya, pipa ruas Semarang-Gresik dan Semarang-Cirebon sudah siap digunakan untuk mengalirkan gas dari sumber gas yang ada.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Edy Hermantoro, mengatakan pihaknya akan memperbanyak jaringan gas untuk masyarakat di wilayah penghasil gas bumi. Dengan begitu, program konversi ke bahan bakar gas (BBG) dapat dilakukan secara optimal.

“Kami akan memperbanyak jaringan gas langsung ke masyarakat di wilayah penghasil gas bumi, atau yang telah ada infrastrukturnya, baik dengan biaya dari anggaran negara maupun swasta,” katanya.

Kementerian ESDM bertekad menyelesaikan pembangunan pipa

ruas Nagrak-Bitung sepanjang 22,2 kilometer. Pemerintah pun akan segera mendiskusikan pembiayaannya bersama DPR, setelah menyampaikan nota keuangan RAPBN 2014.

Pengamat energi Komaidi Notonegoro berharap target pemerintah untuk menuntaskan perluasan jaringan gas dapat segera tercapai. Menurutnya, langkah ini juga harus menjadi pembuka jalan bagi pemerintah untuk mulai meneruskan rencana pengembangan bahan bakar non fosil.

Terlebih, cadangan bahan bakar fosil kita untuk minyak diperkirakan hanya sampai 12 tahun dan gas 32 tahun serta batu bara 77 tahun. “Pemerintah harus mulai meneruskan rencana pengembangan bahan bakar nonfosil,” ujarnya.

Komaidi yang juga Wakil Direktur ReforMiner Institute menjelaskan, jumlah ketersediaan bahan bakar fosil

itu berdasarkan data cadangan bahan bakar fosil per 2010 untuk jenis minyak mencapai 4,2 miliar barel dengan produksi sebesar 359,89 juta barel per tahun.

Begitu pula dengan gas yang cadangannya 108,40 TSCF dan produksi selama 2010 mencapai 471.507 MMSCF. Sedangkan untuk batu bara cadangannya 21,131 miliar ton dan produksi per 2010 mencapai 275,16 juta ton.

CR15

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5212fbc2a0804/dorong-energi-alternatif-pemerintah-perluas-jaringan-gas>

ASEAN lanjutkan rencana bangun jaringan pipa gas

Rabu, 25 September 2013

Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Pertemuan para Menteri Energi ASEAN (AMEM) ke-31 sepakat melanjutkan rencana pembangunan jaringan pipa gas Trans-ASEAN melalui perpanjangan nota kesepahaman proyek tersebut hingga 2024.

“Para menteri energi menandatangani perpanjangan MoU proyek Trans-ASEAN Gas Pipeline untuk sepuluh tahun lagi hingga Mei 2024,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik saat membacakan Pernyataan Bersama AMEM ke-31 di Nusa Dua Bali, Rabu.

Jero mengatakan, proyek jaringan pipa gas tersebut merupakan upaya mewujudkan konektivitas energi dari anggota Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).

Selain sektor gas, para menteri energi

ASEAN mendorong konektivitas bidang kelistrikan melalui proyek ASEAN Power Grid.

Indonesia dan Malaysia bahkan sudah menandatangani kontrak kerja sama pembangunan pembangkit listrik mulut tambang berkapasitas 2.000 MW. “Papua Nugini juga sudah menyatakan minatnya untuk melakukan kerja sama serupa,” katanya.

Menurut Jero Wacik, tiga fokus yang dibahas dalam pertemuan AMEM ke-31 yaitu mengembangkan diversifikasi energi dan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan minyak bumi dan meningkatkan efisiensi energi.

Rencana Aksi Kerja Sama Energi ASEAN 2010-2015 juga akan terus dijalankan melalui langkah memperkuat ketahanan energi regional, menciptakan kebijakan energi regional yang responsif serta

melibatkan swasta dalam mengamankan cadangan energi.

Dalam pertemuan selama tiga hari ini hadir para menteri dan delegasi dari Indonesia, Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Pertemuan dihadiri pula oleh delegasi negara mitra dialog ASEAN yaitu China, Jepang, Korea Selatan, Australia, India, Selandia Baru, Rusia dan Amerika Serikat.

Pada rangkaian acara AMEM ke-31 diselenggarakan Forum Bisnis Energi ASEAN dan pemberian ASEAN Energy Award bagi para pemenang kompetisi bidang energi di kawasan ASEAN, kata Jero Wacik.

Para menteri energi sepakat bahwa pertemuan AMEM ke-32 pada 2014 akan berlangsung di Laos.

<http://www.antaranews.com/berita/397422/asean-lanjutkan-rencana-bangun-jaringan-pipa-gas>

2013

1.200 Jaringan Gas Baru untuk Warga Miskin Bontang

Sabtu, 26 Oktober 2013

BONTANG, tribunkaltim.co.id - Pemerintah Kota Bontang, kembali melanjutkan pembangunan jaringan gas (Jargas) untuk rumah tangga, yang sempat terhenti dua tahun terakhir. Walikota Bontang Adi Darma mengungkapkan tahun ini pihaknya akan kembali memulai pembangunan Jargas di Kelurahan Telihan sebanyak 1.200 sambungan rumah (SR).

"Proses pelelangannya sudah rampung, kita harapkan akhir tahun ini, sambungan Jargas baru Telihan sudah bisa dinikmati warga," ujar Adi Darma, Jumat (25/10). Proyek ini merupakan kelanjutan dari program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2010, yang telah membangun 3.750 SR, di dua Kelurahan Apiapi dan Gunung Elai, Bontang Utara.

Pilihan melanjutkan proyek Jargas tahap dua, di kelurahan Telihan, dilakukan lantaran lokasi stasiun induk Jargas berada di Telihan. "Kan lucu kalau warga kelurahan lain sudah menikmati, sementara yang tinggal dekat

stasiun induk cuma jadi penonton. Dan lagi warga disana memang ingin menikmati fasilitas Jargas," katanya.

Pun demikian, proyek Jargas Telihan yang menelan dana APBD Bontang, sebesar Rp 18 miliar hanya diperuntukkan bagi warga miskin (Gakin) atau masuk dalam kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ini berbeda dengan pilot project dari Kementerian ESD yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kelurahan Api-Api dan Gunung Elai. "APBD kita kan terbatas, jadi tidak mungkin semua warga digratiskan," paparnya.

Bagi kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas yang berminat memanfaatkan layanan Jargas, tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan pemasangan sambungan ke PT Bontang Migas Energi (BME). Selanjutnya, PT BME selaku pengelola Jargas akan mempertimbangkan biaya pemasangan sambungan yang meliputi pembelian pipa dari jaringan induk beserta meterannya.

"Nantinya warga yang mampu tetap kita layani, tapi sifatnya sudah komersil," tambahnya

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Bontang, Riza Pahlevi mengatakan saat ini progres pembangunan Jargas di Telihan sudah mencapai 40 persen. Ia memperkirakan paling lambat akhir Desember 2013, pekerjaan penggalian, pemasangan pipa hingga pemasangan sambungan ke rumah calon pelanggan sudah rampung. "Kalau tidak ada kendala, akhir tahun ini sudah rampung dan langsung dilakukan commisioning. Untuk menguji pasokan gas ke rumah warga," ungkap Riza.

Ditanya soal pengembangan Jargas di Kelurahan lain, Riza mengaku belum memastikan sebelum dilakukan kajian dan perhitungan anggaran yang cermat. "Untuk pengembangan selanjutnya saya kira itu tergantung kemampuan APBD, yang jelas kita memang berharap proyek ini dilanjutkan," tandasnya.

Udin Dohang, Editor: Fransina, Sumber: Tribun Kaltim
<http://kaltim.tribunnews.com/2013/10/26/1200-jaringan-gas-baru-untuk-warga-miskin-bontang>



